MAJALAH

Ekonomi Syariah

Untuk keadilan & kesejahteraan bersama

BMT, PILAR EKONOMI UMAT

Said Hisyam :

"BMT Mandiri Tanpa Dukungan Birokrasi"

abotabek	Rp. 10.000,-
awa	Rp. 12.000,-
uar Jawa	Rp. 14.000,-
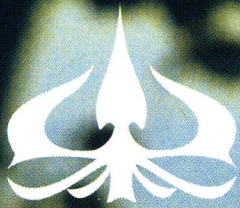
Ekonomi Syariah

Diterbitkan oleh EKABA Universitas Trisakti

Alamat Redaksi
Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Gedung K lt. 2 Kampus A
Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta Barat
Telp. 021-5669178 - 5663232 ext. 347, Fax. 021-5669178
e-mail : syafri@indo.net.id

Bank
BSM KPO Thamrin No. Rek. 0090066481
BMI Cab. Fatmawati No. Rek. 3040121622

Redaksi mengundang para dosen, mahasiswa, praktisi atau siapa saja yang tertarik dengan Ekonomi Syariah untuk bergabung dengan kami. Kirimkan tulisan anda mengenai Ekonomi Syariah baik berupa artikel, informasi, dsb, kirimkan juga kritik dan saran anda kepada kami. Bagi yang berminat dapat menghubungi kami di Ruang Redaksi Majalah Ekonomi Syariah.

ISSN : 1412 2383

Laporan Utama

Laporan Khusus

Bush dan Jurang Kaya Miskin

"Pada tahun 2001 dan 2003 hasil studi kongres menunjukkan bahwa potongan pajak yang dilakukan Bush menguntungkan orang kaya" **(hal. 45)**

Riba dan Bunga Bank : Tak serupa tapi sama ?

"Tambahan inilah yang oleh sistem perbankan konvensional disebut dengan bunga" **(hal. 47)**
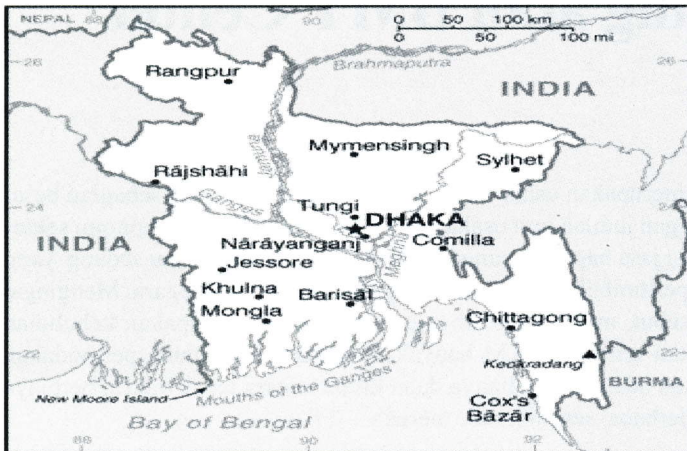
Ekonomi Kerakyatan dan Peranan Perguruan Tinggi di Bangladesh

"Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh, kredit mikro atau keuangan mikro adalah salah satu masalah yang paling menonjol" **(hal. 49)**

Hablum-Minallah dan Mahmudah sebagai Tonggak Keberhasilan Perekonomian Islam : Bukti empirik Darul Arqam di Malaysia

"Menurut Syukri Salleh, kekuatan gerakan ini sebelum 1994 adalah karena kuatnya hablum-minallah dan Mahmudah dikalangan anggota-anggotanya" **(hal. 52)**

Profile

Achyar Ilyas : "Perlu Ada UU Sistem Ekonomi Islam"

"UU ini menjadi payung besarnya, lalu didalamnya terdapat pengaturan mengenai sektor keuangan dan sektor riil-nya" **(hal. 56)**

Khazanah

TV East & TV Peace : televisi Kabel Muslim Amerika

"TV East juga menayangkan berbagai program acara dengan tujuan untuk memberikan rasa senasib, sepenanggungan dengan sesama kalangan muslim Asia Selatan di Amerika Serikat" **(hal. 59)**

Buku

- **Sisi Lain Konflik**

  Target Sudah, What's Really Behind The Crisis in Darfur?)

- **Membongkar Interpretasi Riba**

  Menyoal Bank Syariah : Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis **(hal. 61)**
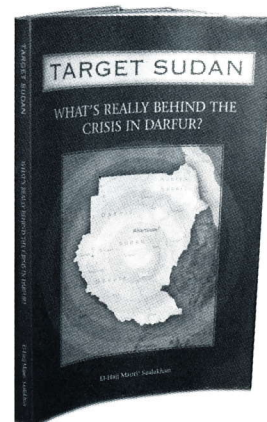
Ironika

Kebohongan Publik : Perpajakan Tak Islami

"Sudah lumrah apabila seorang kepala Kanwil mempunyai 1 BMW dan 1 CRV di garasinya, padahal gajinya paling banyak 15 juta rupiah, darimana ia mendapatkannya ? **(hal. 63)**

Indikator

- **10 Besar 500 Perusahaan di Indonesia**
- **5 Saham Top Volume Periode 14-18 Januari 2005** **(hal. 65)**

BMT Holding atau BMT Center

Mayoritas pelaku usaha di Indonesia merupakan usaha kecil dan mikro (UKM), yang sebagian besar omsetnya kurang dari Rp.1 miliar, dengan jumlah unit usaha lebih dari 39 juta. Fungsi ekonomi sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang yang telah menyumbang lebih dari separo pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara. Mengingat besarnya sumbangan usaha kecil tersebut, maka pengembangan usaha kecil merupakan kebutuhan yang mendasar bagi Indonesia. Namun ternyata UKM banyak menghadapi terutama permodalan. Bagi pengusaha kecil, yang dibutuhkan adalah tersedianya dana kredit secara tepat waktu, berbiaya murah dan jumlah, tata cara yang sederhana sesuai kultur mereka.

Pada tahun 1990-an telah berkembang lembaga keuangan yang berbasis pola bagi hasil yaitu BMT (Baitul Maal Wat-Tamwil) sebagai lembaga yang didirikan secara swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi para pengusaha UKM tersebut. Sampai bulan Mei 2002, BMT di Indonesia telah mencapai 3.037 unit dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp.250 miliar dan deposit Rp 272 miliar. Asset mereka pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. BMT Ben Taqwa di Purwodadi, BMT Bering Harjo di Yogyakarta, BMT Binama Semarang, BMT at-Taqwa dan BMT Al-Kariim di Jakarta adalah contoh-contoh BMT yang rata-rata mempunyai asset di atas 2 milyar.

Pada Oktober 2004 lalu, Dompet Dhuafa Republika (DD) mengadakan Simposium BMT yang diikuti 83 BMT. Dalam simposium ini melahirkan kesepakatan untuk membentuk BMT Center, atau BMT Holding. Langkah ini tentu saja penting bagi BMT, mengingat begitu banyak problema yang dihadapinya seperti lemahnya SDM dan manajemen kualitas. Banyak peran yang dapat dimainkan oleh BMT Holding, di antaranya menyediakan akses bisnis BMT, memfasilitasi perbaikan kualitas manajemen dan SDM BMT, membuat kode etik di antara para pelaku BMT, dan membuat standar operasi dan evaluasi BMT.

Itulah sebagian ulasan laporan utama ES pada edisi ini. Tak lupa juga kami hadirkan pada laporan khusus ulasan rekonstruksi Aceh pasca tsunami melalui skema-skema kontrak syariah seperti Istishna, Salam, Murabahah, Ijarah dan Qardhul Hasan. Dengan langkah tersebut, diharapkan Aceh pasca tsunami akan semakin kental warna Islamnya, tidak hanya dari segi ibadah namun juga dari segi muamalat.

Berita gembira dari kami, redaksi kedatangan tamu Prof. Dr. Willem Wolters dari University of Nijmegen, Belanda pada akhir Januari lalu. Profesor antropologi ini mewancarai Pemimpin Redaksi ES untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini membuktikan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah diakui di luar sana. Semoga hal tersebut terus memicu kami untuk menyajikan informasi ekonomi syariah yang terbaik untuk anda.

Sofyan S Harahap

Kirim Artikel

Assalammu'alaikum Wr Wb

Saya baru membaca majalah yang anda terbitkan dan saya rasa isinya menarik oleh karena itu saya ingin juga mengirimkan artikel kepada anda terutama yang mengenai masalah ekonomi syariah dan disamping itu saya ingin menanyakan apakah dapat dimungkinkan adanya suatu kerja sama antara majalah anda dengan institusi yang saya kelola untuk mengadakan suatu acara seminar. Hal ini saya tanyakan karena institusi yang saya kelola banyak berhubungan dengan dunia perbankan terutama dalam bidang pemasaran dan produk development sehingga saya dapat melihat banyak kesempatan dalam mengembangkan produk-produk yang sifatnya Islami tetapi sering kali terhambat dengan lamanya masa pengeluaran fatwa seperti contohnya kartu kredit Islami yang sampai saat ini masih belum keluar suatu kepastian mengenai dasar dari produk ini.

Sebagai informasi tambahan saya adalah alumni Fakultas Ekonomi Trisakati angkatan 1983 dan saat ini saya mengelola SMEMI suatu institusi yang membantu beberapa bank untuk memasarkan dan mengembangkan produk-produknya seperti Bank Permata, BII dan ANZ Panin.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalammu'alaikum Wr Wb
Ardimansyah Pohan

Jawab : silahkan saudara kirimkan artikelnya via e-mail atau ke alamat redaksi. Untuk kerja sama silahkan menghubungi EKABA di 021-5669178, terima kasih.

Kartu Debit Halal

Asslamu'alaikum

Ikwah sekalian, saya ingin mengetahui ada tidak di Indonesia Kartu Debit/kartu halal yang bisa digunakan untuk transaksi seperti layaknya kartu kredit ?

Wasalamu'alaikum
Agus Suhartono

Jawab : ada, beberapa bank telah mengeluarkan kartu kredit atau debit berbasis syariah salah satunya adalah BII dengan produknya yaitu BII Syariah Debit Card dan BII Syariah Card (BSC), kedua kartu tersebut memiliki perbedaan sebagai berikut :

BII Syariah Debit Card

- Nama Produk : Musafir
- Jenis : Tabungan
- Akad : Wadiah (titipan)
- Pilihan Kartu : Reguler, gold, platinum
- Fungsi : Sebagai kartu debit, ATM, kartu identitas dan kartu discount
- Berlaku : Lokal dan Internasional (jaringan master int'l)

BII Syariah Card (BSC)

- Nama Produk : BII Syariah Card (BSC)
- Jenis : Charge Card
- Akad : Qard dan Kafalah
- Pilihan Kartu : Gold (hanya tersedia jenis gold saja)
- Plafond : Rp.8 s/d 50 Juta
- Fungsi : sebagai kartu charge card, ATM, kartu indentitas
- Berlaku : Lokal dan Internasional (Jaringan Visa international)

Penjelasan lain : Credit card ini pada umumnya sama dengan kartu kredit konven-sional tetapi tagihan (billing) harus dibayar full (lunas) dan tidak ada bunga.

Kartu Belanja Carrefour

Assalamu'alaikum

Saya ingin menyampaikan complaint dan penolakan keras atas ketidak adilan yang saya terima berkaitan dengan pembebanan kartu belanja Carrefour yang bekerjasama dengan PT. GE Finance Indonesia. Masalahnya adalah pembebanan bunga yang sangat jauh dari norma kepatutan. Bayangkan saya dikenakan tingkat bunga 4823% per tahun. (Sekali lagi Empat ribu delapan ratus dua puluh tiga persen). Hanya karena kekurangan bayar sebesar Rp. 46.099.- detailnya sebagai berikut :

Saya menggunakan kartu sebesar Rp. 6.071.099,- merupakan tagihan dengan tanggal jauh tempo tanggal 31 Januari 2005. pada tanggal 31 Januari 2005 saya bayar sebesar Rp. 6.025.000,- saya waktu itu lupa angka sebenarnya sehingga pembayaran saya kekurangan sebesar Rp. 46.099,-.

Pada tagihan saya bulan berikutnya maka saya dikenakan Bunga sebesar Rp. 185.277,- disebabkan kekurangan bayar tersebut. Kalau dimisalkan kekurangan ini akan saya bayarkan pada tanggal 3 Maret atau satu bulan kemudian maka tingkat bunganya adalah sebesar 402% per bulan atau 4823% per tahun. Hal ini saya sampaikan kepada Kartu Belanja dan petugasnya menjawab : Begitulah system kami.

Saya praktisi bank syariah, tapi karena kartu belanja belum ada yang syariah maka saya terpaksa menggunakan ini agar lebih mudah dan muran belanja di Carrefour yang menurut saya merpuakan hyper market yang membunuh ekonomi rakyat tradisional. Jika ada kartu belanja syariah tentu saya akan memilihnya. Peristiwa ini menujukkan betapa arogansinya lembaga pengusaha dan lembaga keuangan kapitalis. Kemungkinan besar pengenaan bunga bukan atas yang kurang bayar tetapi atas total tagihan kendatipun sudah dibayar. Kalay ini terjadi bukan saja tidak adil tetapi tida ada dalam kamus peradaban Eropa atau zaman jahiliyah. Sudah sepatutnya regulator atau Pemerintah dapat menertibkan praktik-praktik bidab ini. Bagi pemilik kartu ini mohon hati-hati dan berontak jika diperlakukan seperti ini. Bagi lembaga keuangan syariah dan DSN mohon segera dapat merealisir kartu sejenis yang di-*manage* secara syariah.

Wassalamu'alaikum

Prof. Dr. Sofyan S. Harahap
Fakultas Ekonomi
Uniersitas Trisakti

Redaksi menerima Surat atau Artikel mengenai Ekonomi Islam yang disertai dengan identitas diri lengkap.

BMT, Pilar Ekonomi Umat

Masyarakat lapis bawah tidak mungkin menikmati manisnya lembaga keuangan syariah tanpa BMT, karena bank umum syariah tidak mungkin menyentuh lapisan terbawah ini dengan alasan ketidakefisienan

Mengingat kilas balik cikal tumbuhnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, tidak terlepas dari peran sejarah lembaga keuangan mikro syariah Baitul Maal Wattamwil atau lebih dikenal dengan BMT ini. Di awal tahun 1980-an telah berdiri Baitul Tamwil Teknosa di Salman ITB Bandung, kemudian menyusul Baitul Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Namun perkembangan di periode ini belum begitu menggembirakan. Baru kemudian pada tahun 1990-an BMT menggeliat berbarengan dengan munculnya BPRS Syariah dan Bank Muamalat. Bahkan pada periode ini BMT ini sempat menjadi Gerakan Nasional atas jasa PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) yang merupakan badan otonom ICMI untuk meyakinkan Mantan Presiden Suharto. Pak Harto sempat memberikan perhatian khusus, meskipun dalam nuansa menjaga perasaan umat lain. BMT tidak sematamata diartikan Baitul Maal Wattamwil, namun dinasionalkan menjadi Balai Usaha Mandiri Terpadu.

Fokus kebijaksanaan ekonomi kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu keharusan, apalagi bila diperhatikan mereka adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2000 sekitar 99,85 persen dari seluruh perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil, yang omsetnya kurang dari Rp.1 miliar, dengan jumlah unit usaha lebih dari 39 juta. Sementara untuk usaha dengan omset antara Rp.1 miliar hingga Rp.50 miliar, terdapat sekitar 55.000 unit usaha atau 0,14 % dari jumlah seluruh perusahaan. UKM mampu menyerap sekitar 73,5 juta pekerja atau 82 persen tenaga kerja di Indonesia.

Dalam sambutan sebagai pendiri PINBUK dalam "Pedoman Cara Pembentukan BMT", Mantan Presiden RI

BJ Habibie menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi pengusaha kecil untuk mendapatkan modal kerja adalah karena mereka masih menganggap bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Selain itu, lembaga keuangan dan perbankan pun sesungguhnya tidak terjangkau oleh mereka, mengingat sarana dan prosedur yang masih dianggap asing. Di sisi lain, lembaga keuangan dan perbankan yang ada tidak dapat menjangkau pengusaha kecil karena jumlahnya terlalu banyak sehingga kalau semuanya dilayani akan menyebabkan overhead cost terlalu mahal. Apalagi perbankan menerapkan standar penilaian yang sulit dipercaya pengusaha kecil.

Oleh karena itu, BMT memang diperlukan sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada usaha mikro. "Masyarakat lapis bawah tidak mungkin menikmati manisnya lembaga keuangan syariah tanpa BMT, karena bank umum syariah tidak mungkin menyentuh lapisan terbawah ini dengan alasan ketidakefisienan", papar Iwan Setiawan, Manajer Mikro Finance Baitul Maal Mumalat (BMM). BMT bisa dijadikan jaminan proteksi sosial yang menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya.

Sebut saja BMT Al-Kariim yang telah mencapai hampir 2000 nasabah, menyebar di 20 pasar tradisional wilayah Jakarta, di antaranya pasar Pondok Indah, Kodam, Kedip, Inpres, Blok A, Mede, Barito, Pondok Labu, Bintaro, Kebayoran Lama, Mayestik, Kostrad, Ceplak, Rengas dan BMT At-Taqwa dengan jumlah nasabah sekitar 2000 orang dengan jangkauan operasional meliputi pasar Slipi, Kopro, Kebun Jeruk, Grogol, Kelapa Dua dan Kebayoran Lama, bahkan hingga Tangerang dan Bekasi adalah bukti bahwa BMT memang benar-benar memberikan sumbangannya untuk pengembangan usaha mikro.

Dengan kehadiran BMT di banyak desa dan kota, paling tidak sendi-sendi ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor-sektor informal lainnya berkembang lebih baik. Dalam skala mikro, BMT cukup ampuh menghambat tangan-tangan bank konvensional menarik dana masyarakat pedesaan untuk diangkut ke Jakarta untuk kemudian dipinjamkan kepada konglomerat dan pengusaha besar. Di sisi lain, praktek-praktek rentenir yang telah mendarahdaging dalam kehidupan masyarakat pedesaan perlahan-lahan kehilangan peminat.

Berdasarkan laporan pengurus BMT yang difasilitasi oleh Pinbuk, di desa-desa tempat BMT beroperasi berbagai praktek rentenir hilang dan lenyap bagai ditelan bumi. Ini bukan karena BMT mampu menggantikan fungsi para rentenir, tetapi lantaran pengurus BMT dibantu oleh peran tokoh dan da'i setempat berhasil memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah dan tidak menjerat leher pengusaha kecil. Pengurus BMT juga mampu memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang mudah, merakyat, gampang, dan tidak birokratis. BMT berusaha menghindari ekslusivitas dan persyaratan yang rumit. Tidak jarang pengusaha kecil cuma bersandal jepit dan sarung datang ke kantor BMT melakukan transaksi. Di daerah pesisir seperti Serang, nelayan berbaju basah kerap melakukan transaksi tanpa hambatan.

Dari berbagai studi kasus pada beberapa BMT terbaik di Jawa Tengah, BMT Ben Taqwa di Grobogan-Purwodadi, BMT Bintoro Madani Demak, BMT Tumang di Cipego-Boyolali dan BMT Pekajangan Klaten terbukti bahwa BMT dapat menancapkan eksistensinya karena mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Pada BMT Ben Taqwa, misalnya, seorang juru dakwah khusus ditugaskan untuk melakukan tur ke masjid-masjid menjelaskan BMT.

Selama ini BMT kurang mendapat perhatian dan dukungan peraturan yang memadai. BMT tidak memiliki payung badan hukum yang jelas, apakah sebagai koperasi atau bank. Menurut pandangan Guritno Kusumo, Deputi Bidang Kelembagaan dan Perundangan Kementerian Koperasi, BMT memiliki kemiripan dengan koperasi simpan pinjam. "Namun semua tergantung pada pengelola, apakah akan mengarahkan BMT menjadi semacam koperasi yang bercorak agamis atau berbentuk bank syariah", tambahnya.

Namun, untuk sementara ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan status dalam Undang-undang Koperasi yang baru tentang BMT yang namanya disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, di mana karakteristik dan sistem pengelolaan manajemennya harus tunduk pada aturan lembaga keuangan syariah. "Kita berharap ini pertanda mulai konsennya pemerintah terhadap BMT, dan ke depannya akan lahir Peraturan Pemerintah (PP). Bagaimanapun juga, jika BMT tidak diatur oleh pemerintah akan riskan bagi perlindungan dana masyarakat", Iwan menjelaskan.

Pemerintah daerah pun seharusnya ikut mendukung perkembangan BMT. Sayangnya menurut Iwan, dukungan pemerintah daerah masih bersifat conditional. Artinya, apabila pejabat setempat memiliki hubungan yang dekat dengan fungsionaris BMT maka mereka akan memberikan dukungan. Dan sebaliknya apabila pejabat tidak memiliki hubungan yang dekat dengan fungsionaris BMT, dukungan tidak diberikan.

Said Hisyam, seorang praktisi Dompet Dhuafa yang konsen terhadap BMT justru tidak menjadikan pemerintah sebagai faktor dominan keberhasilan BMT. Terbukti saat ini BMT dapat berkembang baik tanpa dukungan pemerintah sekalipun. Seandainya pemerintah mau melakukan dukungan kepada BMT, sebatas perannya sebagai regulator dan fasilitator saja. Supportnya tidak boleh berlebihan, apalagi bermaksud membina tetapi malah membinasakan.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang sudah terbukti teruji sepak terjangnya mengangkat ekonomi rakyat kecil dan habitatnya yang sangat membumi dengan nafas kehidupan rakyat bawah, BMT tidak bisa tidak harus diyakini sebagai alternatif sistem perekonomian di Indonesia. Sudah seharusnya kita berharap ada perhatian lebih serius dari pemerintah dan dari semua kalangan masyarakat untuk mendorong agar lebih cepat lagi terjadi pertumbuhan BMT di tengah-tengah masyarakat. Amiiin. (njm)

Pemberdayaan Bagi BMT

> Permasalahan utama BMT adalah kualitas SDM, kesiapan pasar pengguna jasa dalam menerima konsep muamalah syariah dan sistem operasional. Lembaga pembina seperti PINBUK, Dompet Dhuafa, Baitul Maal Muamalat seharusnya bisa menjembatani permasalahan BMT tersebut.

Sampai bulan Mei 2002, BMT di Indonesia telah mencapai 3.037 unit dengan penyaluran pembiayaan sebesar Rp.250 miliar dan deposit Rp 272 miliar. Asset mereka pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. BMT Ben Taqwa di Purwodadi, BMT Bering Harjo di Yogyakarta, BMT Binama Semarang, BMT at-Taqwa dan BMT Al-Kariim di Jakarta adalah contoh-contoh BMT yang rata-rata mempunyai asset di atas 2 milyar. Kondisi ini di satu pihak memberikan dampak positif, khususnya menyangkut tumbuhnya kepedulian terhadap nasib perekonomian. Namun di lain pihak juga cukup mengkhawatirkan, terutama menyangkut pengendalian pengelolaan lembaga. Hanya BMT yang dikelola secara serius, baik dan profesional yang dapat tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat bermanfaat melayani kepentingan umat.

Pada umumnya masalah yang dihadapi BMT memiliki kesamaan antara satu BMT dengan BMT lainnya, dimana faktor dominan yang paling menonjol adalah kualitas sumber daya manusia, kesiapan pasar pengguna jasa dalam menerima konsep muamalah syariah dan faktor sistem sebagai komponen penunjang kegiatan usahanya. "Kendala utama yang BMT Al-Kariim rasakan adalah SDM. Untuk mengatasi ini, BMT Al-Kariim secara kontinyu melakukan training SDM 2 kali dalam sebulan terutama mengenai service excellence, mampu melayani dan memaintain nasabah dengan baik", ungkap Sulaeman Hayyun, Direktur BMT Al-Kariim Pondok Indah.

Salah satu kendala BMT adalah kesiapan pasar pengguna jasa dalam menerima konsep muamalah syariah

Hal senada juga diungkapkan oleh Iwan Setiawan bahwa kendala BMT di antaranya sebagian besar BMT belum memiliki Standar Operasional Prosuder (SOP) yang baku, kelemahan SDM terutama di second layer (staff) yang banyak belum ter-upgrade dengan pelatihan-pelatihan, kualitas aktiva produktif tidak bagus, rasio CAR yang tinggi dimana pertumbuhan aset yang cukup signifikan tidak disertai dengan pertumbuhan modal.

Said Hisyam mengungkapkan alasan manajemen BMT itu lemah karena banyak para pendiri BMT itu dipengaruhi oleh pendekatan sebuah gerakan sehingga kadang melupakan profesionalisme. Lembaga pembina seperti PINBUK, Dompet Dhuafa dengan Forum Ekonomi Syariah (FES), BMI dengan Baitul Maal Muamalatnya, BSM dengan Baitul Ummahnya seharusnya bisa menjembatani permasalahan-permasalahan BMT.

Dalam hal pembinaan BMT, PINBUK adalah pionirnya. Data 2001 menunjukkan terdapat terdapat 2938 BMT jaringan PINBUK tersebar di seluruh wilayah nusantara. Menyerap 14 ribu tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan strata satu, 2500 diploma tiga, dan 6.200 SLTA.

Ada 3 tingkat pelatihan yang digelar PINBUK : BMT Basic Training (BBT), BMT Intermediate Training (BIT), dan BMT Advance Training (BAT). PINBUK menggelar pelatihan ini setiap bulan dengan urutan BBT pada pekan pertama, BIT pekan kedua, dan BAT pekan ketiga.

Lebih dari itu PINBUK memberikan sertifikat operasi kepada BMT-BMT yang secara administratif telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Apabila dalam operasionalnya BMT-BMT tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka melalui fungsi pembinaannya PINBUK melakukan peneguran dan peringatan kepada BMT tersebut, bahkan PINBUK dapat mencabut kembali Sertifikat Operasi yang telah diberikannya.

Selain itu, untuk mengefektifkan pembinaan kepada BMT-BMT, agar kinerjanya lebih baik PINBUK telah menyusun dan menerbitkan perangkat-perangkat operasional BMT, meliputi pedoman cara pembentukan BMT, peraturan dasar dan contoh AD/ART BMT, pedoman kerja pengelola BMT, pedoman sistem komputerisasi akuntansi Hasna Amala, dan pedoman penilaian kesehatan BMT.

Adapun BMM telah mengeluarkan produk dengan nama B-BMT dengan memposisikan diri sebagai BMT-nya BMT. Pilihan penyaluran dana via BMT ini berdasarkan pemikiran bahwa lembaga yang berbasis wong cilik ini telah mengakar dan tersebar luas. Selain itu, BMM juga berniat menghapus sebagian citra jelek BMT yang beredar. Untuk peran ini BMM memberikan dana bantuan untuk penguatan modal BMT, membuat Standar Operasional Sistem (SOP), pembinaan terhadap skill SDM dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan, menyediakan perangkat software sistem informasi manajemennya, memberikan advokasi legal, menyediaan informasi-informasi yang dibutuhkan BMT, membuka peluang-peluang pasar.

BMM menetapkan kriteria bagi BMT yang masuk jaringan, yaitu minimal dalam posisi kurang sehat dan mempunyai potensi baik SDM, market dan dukungan pemerintah setempat untuk berkembang serta memiliki visi yang sama dengan BMM. "Mungkin ada satu BMT yang tidak berkembang dikarenakan BMT tersebut tidak pandai mengoptimalkan potensi yang ada, ini yang kita bidik untuk menyentuhnya sehingga mereka bisa mengoptimalkan potensi tersebut. Kami berharap dengan adanya pembinaan ini akan menjadikan BMT menjadi besar, sehingga akses pemberdayaan BMT kepada masyarakat juga bertambah besar", Iwan menjelaskan. Dari seluruh BMT binaan BMM, dibuat jaringan. Mereka dibuat berkelompok sesuai dengan area wilayah dan setiap kelompok ada koordinator jaringan.

Tahap rekrutmen yang dilalui yaitu, survey BMT, penawaran untuk ikut jaringan, seleksi, kontrak, dan yang terakhir pelatihan SDM. Tujuan pelatihan SDM ini diadakan adalah menyatukan visi dan membekali ilmu-ilmu manajerial dalam mengoperasikan BMT. Setelah itu pengucuran dana dengan berpedoman pada kemampuan BMT bersangkutan. Bagi BMT yang melanggar perjanjian kon-trak akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BMM dan ditariknya kembali dana yang telah diberikan BMM. Kini BMT memiliki 107 jaringan dengan jumlah kucuran dana sebesar Rp.1,45 milyar.

Selain itu, BMM memiliki Program Pember-dayaan Kemiskinan Ekonomi Rakyat (P2KER) dengan 1.830 lembaga ke-uangan mikro syariah, yang terdiri atas BMT, koperasi pondok pesantren (kopontren), dan koperasi simpan pinjam syariah (KSPS). Proyek yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini mencapai Rp.47,246 miliar.

Memang peranan lembaga pembina seperti ini menjadi sangat penting. Lembaga ini tidak sekedar berperan sebagai koordinasi antar BMT, namun juga sebagai konduktor BMT baik dalam meningkatkan kualitas internal lembaga, termasuk SDM maupun kesiapan mengembangkan hubungan dan transaksi kegiatan antar lembaga yang bersifat eksternal sehingga pada gilirannya akan meneguhkan posisi dan peranan BMT sebagai agen pemberdayaan di masyarakat wong cilik ini. (njm)

Pemberdayaan BMT, Tugas di Tahun 2005

Pada Oktober 2004 lalu, Dompet Dhuafa Republika (DD) mengadakan Simposium BMT yang diikuti 83 BMT. Dalam simposium ini melahirkan kesepakatan untuk membentuk BMT Center, atau BMT Holding. "Saat ini *micro finance* telah menjadi isu global, khususnya dukungan terhadap pengusaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, ketika kita akan memberdayakan UKM, kita juga harus memberdayakan lembaga keuangan mikro seperti BMT", ujar Kusnandar, General Manager Perencanaan dan Pengembangan DD.

Langkah ini tentu saja penting bagi BMT, mengingat begitu banyak problema yang dihadapinya seperti lemahnya SDM dan manajemen kualitas yang berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga ini. Banyak peran yang dapat dimainkan oleh BMT Holding, di antaranya menyediakan akses bisnis BMT, memfasilitasi perbaikan kualitas manajemen dan SDM BMT, membuat kode etik di antara para pelaku BMT, dan membuat standar operasi dan evaluasi BMT.

Mursyida Rambe, Direktur BMT Bina Dhuafa menyatakan bahwa mereka benar-benar membutuhkan BMT Holding. Ada 3 problem yang dapat diatasi oleh BMT Holding, modal likuiditas, aspek hukum dan jaringan. "Khusus untuk aspek legal, kami tidak mau dianggap sebagai bank illegal", Rambe menegaskan. BMT holding juga diperlukan untuk menjadi wakil dari ribuan BMT di Indonesia menyampaikan 'suara' kepada pemerintah. Memberdayakan BMT, inilah tugas berat di tahun 2005. (njm)

Mandiri Tanpa Dukungan Birokrasi

Kalau pemerintah mau melakukan dukungan kepada BMT, sebatas perannya sebagai regulator dan fasilitator saja. Supportnya tidak boleh berlebihan, apalagi bermaksud membina tetapi malah membinasakan.

Hiruk pikuk bermunculannya beraneka ragam lembaga keuangan syariah berskala besar, seakan menelan pemberitaan tentang perkembangan BMT. Namun bukan berarti Gerakan BMT ini sudah mati. Justru BMT kini lebih 'dewasa', mampu secara mandiri menggeliat dan mengembangkan diri tanpa harus bergantung pada dukungan birokrasi. Itulah gambaran tentang BMT yang coba digambarkan Said Hisyam, praktisi Dompet Dhuafa yang konsen terhadap perkembangan lembaga mikro syariah ini. Berikut petikan wawan-cara Majalah Ekonomi Syariah dengan Said Hisyam dikantornya di Dompet Dhuafa Republika Ciputat.

Salah satu bentuk kemandirian BMT dalam membantu umat

Sebenarnya BMT itu pada posisi badan hukumnya sebagai apa?

BMT itu secara generik adalah Baitul Maal (niaga) dan Baitul Tamwil (sosial). BMT pertama kalinya muncul difokuskan pada sebagai bentuk lembaga keuangan khususnya simpan pinjam. Dilihat dari sistem moneter Indonesia, BMT sekarang berada di posisi sebagai lembaga keuangan non bank, atau spesifiknya berada pada badan hukum sebagai sebuah koperasi sehingga namanya Koperasi Simpan Pinjam BMT, atau sekarang sudah muncul Undang-undang Koperasi yang baru tentang BMT yang namanya disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan syariah, maka karakteristik dan sistem pengelolaan manaje-mennya harus tunduk pada aturan lembaga keuangan syariah.

Kalau memang sistem bank syariah dan BMT sama, apakah memang sebaiknya tidak perlu ada BMT?

Memang secara prinsip Bank Syariah, BPRS dan BMT adalah sama, yang membedakannya adalah segmentasi skala usahanya. Untuk bank syariah berseg-mentasi skala besar, BPRS adalah skala menengah, dan BMT adalah skala kecil. Kalau pertanyaannya apakah memang perlu BMT, persoalannya adalah ketika kita berkonsentrasi melakukan manajemen pembiayaan. Bagi BMT yang sudah berkembangpun, maka tidak perlu menjadi BPRS, karena statusnya bukan karena besarnya dana yang dimiliki tetapi nasabah yang dibiayai. Dalam skala segmentasi, BMT harus berorientasi pada usaha mikro, orientasi corporate dilakukan oleh bank syariah.

Bagaimana dengan kendala manajemen yang sering terjadi di BMT?

Persoalan manajemen adalah persoalan klasik. Mengapa sering dikatakan manajemen BMT itu lemah, karena banyak para pendiri BMT itu dipengaruhi oleh pendekatan sebuah gerakan, yang penting ini gerakan ekonomi menolong umat, ini sesuai dengan syar'i, maka allahu akbar, sehingga kadang melupakan professionalisme. Bagaimana menga-tasinya, sekarang ada beberapa lembaga yang mengklaim dirinya sebagai lembaga pembina, misal Dompet Dhuafa dengan Forum Ekonomi Syariah (FES), BMI dengan Baitul Maal Muamalatnya, BSM dengan Baitul Ummahnya seharusnya bisa menjembatani permasalahan-permasalahan BMT. Masalahnya, PR mengenai permasalahan BMT ini sendiri terlalu banyak, sehingga dengan jumlah 5 atau 6 lembaga pembina saja tidak cukup.

Apakah 5 atau 6 lembaga ini perlu bersinergi untuk membentuk BMT Center sehingga permasalahannya menjadi lebih mudah teratasi?

Ini semata-mata fastabiqul khairat saja. Kemarin ada kongres para pengurus BMT yang merekomendasikan perlunya lembaga-lembaga pembina tersebut memiliki sebuah forum yang concern terhadap permasalahan yang dihadapi BMT. Insya Allah tahun ini rekomendasi ini akan terwujud.

Apakah BMT memang telah memainkan perannya dalam memberdayakan ekonomi umat kecil ?

Saya berani mengklaim itu sudah dilakukan, paling tidak selama pengelola BMT masih berada dalam koridor ke pemberdayaan. Yang diperjuangkan sekarang adalah bagaimana akad syariah diimplementasikan secara konsisten. Apalagi pada lima tahun terakhir ini BMT boleh dikatakan lebih settle, karena telah belajar dari pengalaman pasang surut.

Bagaimana seharusnya pemerintah sehingga dapat mendorong BMT berkembang lebih baik?

Saya justru tidak menjadikan pemerintah sebagai faktor dominan keberhasilan BMT. Terbukti saat ini BMT dapat berkembang baik tanpa dukungan pemerintah sekalipun. Justru ketika pemerintah banyak ikut campur, maka pengalaman seperti koperasi akan terjadi. Semakin banyak program pemerintah untuk koperasi, semakin koperasi tidak berkembang. Contohnya KUD Mandiri, ketika masing-masing KANWIL berupaya berprestasi memiliki Koperasi Mandiri, salah satu syaratnya dengan melunasi hutang yang akhirnya dilunasi dengan hutang juga. Kalau pemerintah mau melakukan dukungan kepada BMT, sebatas perannya sebagai regulator dan fasilitator saja. Regulasi juga yang bersifat umum saja, misal keputusan tentang pendirian BMT, tidak mendetail. Tetapi kalau berperan sebagai pembina, sebaiknya jangan. Supportnya tidak boleh berlebihan, apalagi bermaksud membina tetapi malah membinasakan.

Apa yang seharusnya BMT lakukan untuk bisa survive ?

Sederhana saja. Selama BMT konsisten baik dalam akad syar'i maupun kaidah-kaidah perbisnisan, insya Allah BMT akan mampu survive. Akad-akad syariah demikian kaya, sayangnya praktisi syariah belum sepenuhnya mampu mengaplikasikannya secara baik. Maka saran saya tidak usah memakai produk syariah yang bervariasi, tapi tidak menerapkannya secara konsisten. Seandainya hanya mampu akad murabahah, ya murabahah saja. Jangan memakai akad musyarakah atau mudharabah tetapi tidak konsisten menerapkannya.

Kalau murabahah saja, berarti inti bank syariah sebagai bank bagi hasil tidak berjalan ?

Saya tidak mengatakan harus inti dan tidak, tetapi konsistensinya. Contohnya saja di lembaga keuangan konvensional, ada produk perbankan di bank, leasing di lembaga leasing, modal ventura di multi finance. Sekarang ada sebuah lembaga yang namanya BMT menjalankan berbagai macam produk, apakah mampu? Jelas tidak mampu, karena masyarakat belum bisa membedakan antara bunga di bank konvensional dan bagi hasil di bank syari'ah. Jadi kalau mau bicara konsistensi, jangan serakah semua akad dilaksanakan.

Bagaimana caranya supaya masyarakat segera memahami sistem bagi hasil ?

Pemahaman praktisi lembaga keuangan syariah tentang sistem bagi hasil harus terus ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga, praktisilah yang mempunyai tugas utama melakukan deseminasi dan sosialisasi terhadap kliennya. BMT A punya klien 500 orang, terhadap 500 orang inilah BMT A punya kewajiban mensosialisasikan dan mendeseminasikan sistem bagi hasil. Sayangnya hal ini belum banyak dilakukan.

Dilihat dari nama, BMT terdiri baitul maal atau baitul tamwil, dengan nama baitul maal apakah BMT juga berperan sebagai LAZ ?

Salah satu penyebab BMT tidak berkembang itu adalah ketika manajemennya tidak mampu melakukan pengelolaan dengan dua model sekaligus. Seorang manajer baitul tamwil juga sekaligus menjadi manajer baitul maal, pada akhirnya bekerja tidak fokus. Bukti ini sudah sudah diakui oleh BMI yang akhirnya harus memisahkan fungsi LAZ nya dalam manajemen tersendiri menjadi Baitul Maal Muamalat (BMM). Ini sebuah indikasi bahwa idealnya, BMT jangan melakukan fungsi bisnis dan sosial sekaligus. Bisnis ya bisnis saja, sosial ya sosial saja. Kalaupun menjalankan maalnya, hanya sekedar sampingan saja. (njm)

BMT-At Taqwa Menjadi BMT Percontohan

"Kalau pemerintah mau melakukan dukungan kepada BMT, sebatas perannya sebagai regulator dan fasilitator saja. Supportnya tidak boleh berlebihan, apalagi bermaksud membina tetapi malah membinasakan"

Bagi BMT At-Taqwa, keberhasilan tidak hanya melihat keberhasilan dari sisi finansial, tapi dari sisi keberhasilan mampu merubah kehidupan religius nasabah menjadi lebih baik.

Ketika BMT menjadi Gerakan Nasional, sebagian besar BMT lahir dari 'perut' masjid, BMT At-Taqwa adalah salah satu di antaranya. Berawal dari pembagian zakat oleh Panitia Ramadhan 1392 H Masjid At-Taqwa yang terlihat kurang pas, sulit berkembangnya usaha masyarakat yang ada di sekitar Masjid At-Taqwa akibat kurang modal kerja, lebarnya kesenjangan sosial ekonomi di lingkungan Masjid At-Taqwa antara miskin dan si kaya, akhirnya para pengurus Yayasan Taqwa Bhakti sepakat mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang diberi nama BMT At-Taqwa, dengan mengambil tempat berkantor di salah satu ruang Masjid At-Taqwa.

Belajar dari BMT Bina Insan Kamil, sebagai pelopor pembentukan BMT di Indonesia, akhirnya BMT ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1994 yang dihadiri oleh pejabat pajak, Komisaris Bank Muamalat Prof. Dr Amin Azis, Dewan Syariah Bank Muamalat Syafi'i Antonio, dll. Memang perkembangan BMT yang berbadan hukum Koperasi Karyawan Yayasan Taqwa Bhakti No.016/PAD/KDK 9.3/XI/2000 ini tidak terlepas dari kerja sama dengan Bank Muamalat. "Dari modal awal 23 juta rupiah, 10 juta merupakan dana qardhul hasan dari Bank Muamalat, dan kerja sama terus berlangsung sampai sekarang", ungkap Ismail, Kepala Divisi Operasional BMT At-Taqwa.

BMT At-Taqwa berlokasi di Komplek Pajak Kemanggisan Jakarta Barat

Dengan misi menjadi pilar ekonomi umat, BMT At-Taqwa terus konsisten membenahi diri menjadi BMT percontohan bagi BMT-BMT baru lainnya. Kualitas SDM terus ditingkatkan dan berusaha untuk mensejahterakan SDMnya. Selain diberi gaji tetap, karyawan juga diberikan dana pensiun, asuransi, THR, bantuan kesehatan, bantuan pembinaan. Tak salah bila banyak BMT baru yang memilihnya sebagai tempat belajar, diantaranya BMT yang baru-baru ini berdiri yaitu BMT Ar-Rizaq yang salah satu Dewan Komisarisnya artis Dewi Yull dan BMT Taruna di Yogyakarta.

Satu dasa warsa BMT At-Taqwa telah beroperasi, dan boleh dikategorikan sebagai salah satu BMT yang 'diperhitungkan'. Modal awal sebesar Rp. 23 juta meningkat hingga sebesar Rp.120 juta pada tahun 2003 dengan asset Rp.2,2 milyar. Sedangkan dari sisi SDM bertambah dari 3 orang menjadi 13 karyawan. Kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat dengan terhimpunnya dana dari masyarakat sebesar Rp.1,9 milyar dengan jumlah

nasabah sekitar 2000 orang. Jangkauan operasionalnya juga semakin luas meliputi pasar Slipi, Kopro, Kebun Jeruk, Grogol, Kelapa Dua dan Kebayoran Lama, bahkan hingga Tangerang dan Bekasi.

Sebuah kepercayaan yang tidak diperoleh begitu saja tentunya. Dengan landasan kerja professionalisme dan membudayakan perilaku yang diajarkan Rasulullah dalam bermuamalah, yakni shidiq (jujur), tablig (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (cerdas) serta komitmen akhlak Islami, karyawan BMT At-Taqwa tidak segan-segan memberikan dedikasi dan integritasnya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Layaknya lembaga keuangan, BMT At-Taqwa juga memiliki program penghimpunan dana (funding) dan pembiayaan (lending), dengan masing-masing produk pendukung-nya. Produk simpanan yang mendapatkan bagi hasil berupa Tabungan Masa Depan, Tabungan Hari Raya, Tabungan Hijrah dan Simpanan Berjangka IMAN. Sedangkan produk simpanan yang tidak mendapatkan bagi hasil berupa Tabungan Wajib dan Simpanan Amanah. Khusus untuk pembiayaan, BMT At-Taqwa hanya membuka produk pembiayaan murabahah (jual beli) dan qardhul hasan (pinjaman lunak hanya mengembalikan pokok saja). Pembiayaan musyarakah tidak diterapkan karena memang tidak mudah mencari orang amanah dan sekaligus memahami akad musyarakah ini.

BMT mengadakan kerjasama dengan PT. Asuransi Takaful dalam menanggung pembiayaan, dengan memberikan asuransi jiwa kepada nasabah pembiayaan. Artinya bila terjadi kematian yang menimpa debitur pembiayaan yang masih dalam masa pertanggungan, maka akan digantikan Asuransi Takaful sesuai dengan pertanggungan/sisa pembiayaan yang harus dipenuhi.

Selain mengeluarkan produk simpanan dan pembiayaan, lembaga yang berlokasi di Komplek Pajak Kemanggisan Jakarta Barat ini juga menggulirkan program pengembangan usaha yaitu Fokus Umat (Forum Komunikasi Usaha Untuk Masyarakat). Pada forum ini, BMT At-Taqwa mendatangkan pakar perbankan syariah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep ekonomi syariah. " Kami juga bekerjasama dengan Baitul Maal Muamalat (BMM) mengadakan pelatihan perbankan syariah dan operasional BMT bagi para pengelola BMT agar mereka dapat meningkatkan kinerja BMT yang dikelolanya", ujar Ismail.

Salah satu usaha binaan BMT At-Taqwa

Kegiatan atau program yang bekerja sama dengan pihak lain, BAZIS DKI untuk penyaluran ZIS, Bank Muamalat dan PNM menjadi sponsor kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan masjid seperti khitanan massal.

Bagi BMT At-Taqwa, keberhasilan tidak hanya melihat keberhasilan dari sisi finansial, tapi dari sisi keberhasilan mampu merubah kehidupan religius nasabah menjadi lebih baik. "Kita merasa berhasil dan bangga, apabila ada nasabah yang sebelum menjadi nasabah belum menunaikan shalat, namun setelah menjadi nasabah BMT At-Taqwa, mereka secara rutin menunaikan shalat", ungkap Ismail. Bahkan bagi nasabah yang dianggap mampu bersikap jujur dan amanah dengan pembiayaan yang diberikan, tak segan-segan pihak manajemen BMT memberikan diskon mark up atas pembiayaan murabahah yang diberikan.

Margin yang ditetapkan juga berdasarkan tawar menawar. BMT At-Taqwa akan mempertimbangkan margin yang memang disanggupi nasabah, sehingga kebutuhan primer atau dapur nasabah tidak terganggu dengan adanya keharusan membayar pembiayaan. "Kefleksibelan seperti ini sengaja kami terapkan sehingga nasabah merasa BMT At-Taqwa adalah milik mereka, sehingga besar kecilnya BMT merekalah yang berperan", Ismail mengungkapkan alasannya. Untuk prinsip kehati-hatian BMT at-Taqwa juga menerapkan sistem jaminan. Namun, sistem jaminan ini bukan menjadi syarat pokok pinjaman.

Jurus ini memang cukup membuat banyak nasabah yang benar-benar merasa BMT At-Taqwa adalah milik mereka. "Ada seorang nasabah dengan simpanan Rp 25 juta, namun karena ada keperluan mendesak terpaksa harus diambil. Dengan meminta maaf, nasabah itu berjanji dalam waktu paling lama 1 bulan akan menabung kembali uang yang diambil tersebut, dan seandainya belum punya pengganti, nasabah tersebut akan menarik depositonya di tempat lain untuk disimpan kembali ke BMT At-Taqwa", Ismail bercerita.

Keberadaan BMT ini memang sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat disekitarnya. Mereka yang merasakan manfaat bantuan pembiayaan dari lembaga ini adalah Heri Suwatno, seorang pedagang bubur ayam. Heri Suwatno merasa terbantu sekali dengan pembiayaan yang diberikan BMT At-Taqwa sebesar 11 juta rupiah. Uang itu dibelikan sepeda motor untuk memperlancar mobilitas usahanya. Dengan adanya sepeda motor itu, maka setiap hari Heri dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya transportasi dalam berbelanja bahan-bahan dagangannya. Dan masih banyak Heri-Heri lain yang merasakan manfaat ini. (njm)

BMT Al-Kariim Pondok Indah

Fokus pada Service Excellence

"Sistem operasional BMT Al-Kariim telah menggunakan sistem aplikasi komputer syariah, yaitu sebuah program aplikasi komputer yang berorientasi pada penanganan kegiatan operasional dan administrasi BMT yang berazaz syariah"

Persaingan di segmentasi pasar mikro semakin ketat, karena semakin banyak bank umum yang turut serta bermain di pasar-pasar tradisional, oleh karena itu sangat diperlukan maintenance nasabah yang baik

Keterbatasan fisik tak membuatnya putus asa untuk berusaha. Di sebuah toko tak seberapa besar di pojok pasar Blok A Jakarta Selatan, Mamad berbaring di atas kursi malas melayani pelanggannya. Kaki kirinya yang kecil tak mampu menopang badannya untuk berdiri. Mamad bercerita, tokonya bisa seperti sekarang bermula dari uang Rp 15 ribu. Kucuran bantuan modal dari BMT Al-Kariim sebesar Rp.500 ribu banyak memberikan manfaat bagi usahanya. Kini tokonya Mamad mampu menutupi biaya listrik, menjadi wajib pajak yang baik, mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga besarnya dan membiayai sekolah sebagian adiknya hingga lulus SMA.

Itu hanya sekelumit cerita salah satu nasabah pembiayaan BMT Al-Kariim, yang telah mencapai hampir 2000 nasabah menyebar di 20 pasar tradisional wilayah Jakarta, di antaranya pasar Pondok Indah, Kodam, Kedip, Inpres, Blok A, Pasar Mede, Barito, Pondok Labu, Bintaro, Kebayoran Lama, Mayestik, Kostrad, Ceplak, Rengas. Sejak berdirinya pada tanggal 15 Juli 1995, keberadaan BMT ini memang telah menjadi 'setetes air' bagi banyak pedagang kecil di pasar-pasar tradisional khususnya wilayah Jakarta Selatan. Melalui bantuan modal usaha dengan persyaratan sederhana, fleksibel, efisien, efektif, BMT Al-Kariim terus melaju untuk mewujudkan visinya pada perkembangan usaha yang berskala kecil.

Bermula dari diklat pengelolaan ZIS dan Ekonomi Syariah yang diadakan oleh Dompet Dhuafa Republika tanggal 11 sampai 15 Januari 1995 di Yogyakarta yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Di antara peserta diklat tercatat nama Deni Nuryadin, M. Ikhwan dan Sulaeman hayyun yang kemudian bersama-sama bertekad membentuk sebuah lembaga Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) di Jakarta. Gayung bersambut, ide mereka mendapat sambutan dari beberapa Remaja Masjid Pondok Indah di antaranya Iwan Setiawan, Febriyanti Husni, Syafri Muharram, M. Zakarullah Zein, Tina Azwarini, Engkus Kusnandar dan Ramiah. Dengan tekad yang bulat, akhirnya ke sepuluh remaja masjid tersebut memproklamirkan berdirinya BMT Al-Kariim yang bertempat di Masjid Raya Pondok Indah tanggal 15 Juli 1995.

BMT Al-Kariim membagi kegiatannya menjadi tiga bagian, yakni Baitul Maal (Lembaga Amil Zakat), Baitul Tamwil (Lembaga Keuangan Mikro) dan sektor ritel. Kegiatan Baitul Maal Al-Kariim adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penyalurannya melalui program pemberian dana beasiswa untuk siswa miskin yang berprestasi dan berpotensi, beasiswa untuk anak-anak yatim, santunan kesehatan, pemberian bantuan modal kerja lewat dana qardhul hasan melalui program "Satu Tahun Dhuafa Menjadi Berdaya", bantuan pada gharimin yang terlilit hutang, pelayanan pengobatan gratis, pelayanan konsultasi zakat, pembinaan rohani melalui pengajian-pengajian, bantuan dan pembinaan manajerial untuk usaha kecil dan bantuan sosial untuk korban bencana alam.
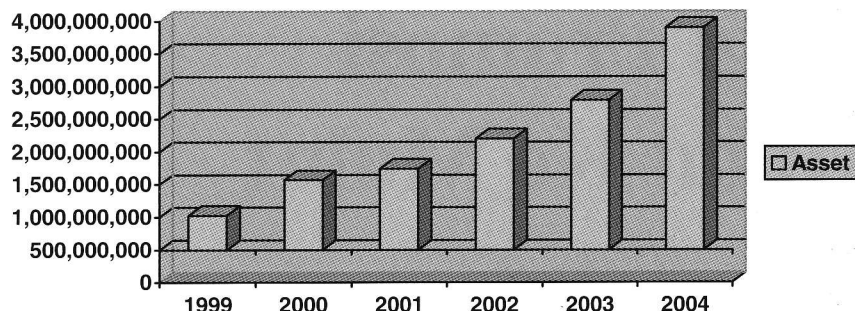
Kegiatan Baitul Tamwilnya adalah di bidang jasa simpanan berupa Simpanan Al-Kariim (simpanan anggota yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan kapan saja), Mudharabah Berjangka (simpanan anggota yang pengambilannya dilakukan sesuai dengan waktu jatuh tempo), Simpanan Pendidikan (simpanan anggota yang pengambilannya hanya untuk keperluan biaya pendidikan dan dapat dicairkan hanya pada bulan Juni dan Desember), Simpanan Wadiah (Titipan) dan pelayanan jasa pembiayaan berupa pembiayaan musyarakah (kerjasama modal kerja), pembiayaan mudharabah (kerjasama usaha di mana sumber modal sepenuhnya dari BMT), dan murabahah (pembiayaan dengan sistem jual beli). Sedangkan sektor riel sedang dirintis, dengan anggota yang tersebar di berbagai pasar dan jenis usaha.

Kendala sistem operasional yang dulu dialami, kini sudah teratasi. Sistem operasional BMT Al-Kariim telah menggunakan sistem aplikasi komputer syariah, yaitu sebuah program aplikasi komputer yang berorientasi pada penanganan kegiatan operasional dan administrasi BMT yang berazaz syariah, berbahasa Indonesia, fleksibel, berfasilitas dan berdayaguna tinggi, berbasis Windows 95/98/ME/2000/NT. Dalam menjalankannya seluruh aktivitas kerja, Al-Kariim telah menggunakan standar operasional ISO 2000 di mana seluruh kegiatan mengacu kepada standar opersional tersebut.

Namun, kendala SDM belum terlepas dari BMT Al-Kariim. Untuk mengatasi ini, BMT Al-Kariim secara kontinyu melakukan training SDM 2 kali dalam sebulan terutama mengenai service excellence, mampu melayani dan me-maintain nasabah dengan baik. "Persaingan di segmentasi pasar mikro semakin ketat, karena semakin banyak bank umum yang turut serta bermain di pasar-pasar tradisional, oleh karena itu sangat diperlukan maintenance nasabah yang baik", ungkap Sulaeman Hayyun, Direktur BMT Al-Karim.

Ada beberapa langkah yang dilakukan BMT Al-Kariim dalam rangka service excellence ini. Langkah tersebut diantaranya adalah sistem jemput bola, nasabah penabung maupun peminjam didatangi secara langsung untuk melakukan transaksi, melakukan pembinaan usaha, mampu mendengarkan keluhan-keluhan nasabah termasuk masalah keluarga dan memberikan solusi, silaturahmi secara rutin ke rumah nasabah. Untuk keperluan ekspansi, BMT Al-Karim juga menggalang dana dari berbagai pihak seperti dari Dompet Dhuafa Republika berupa dana penyertaan, pinjaman lunak dari BAZIS DKI, Care International, Bank Muamalat, PNM IKSP, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BAMUIS BNI dan Baitul Maal Muamalat.

Untuk dedikasinya terhadap perkembangan lembaga keuangan mikro ini, BMT yang telah disahkan Menteri Koperasi dengan SK Menteri Negara Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah RI Nomor 77/BH/KDK.9.4/X/2000 ini mendirikan Kariim Center. Kariim Center dijadikan sebagai pusat training bagi BMT lain/BMT baru yang ingin belajar mengenai per-BMT-an. (njm)

Satu Tahun Dhu'afa Berdaya

BMT Al-Kariim membuat program yang diberi nama "*Satu Tahun Dhuafa Berdaya*". Program ini bermanfaat untuk membantu pedagang mikro dalam menyediakan modal usaha, meningkatkan aset dan omsetnya, dan membina mereka menjadi pedagang yang berakhlak serta bagi BMT sebagai pelaksana memperoleh manfaat minimal dapat menampung tenaga kerja. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp.100 juta, yang diperoleh dari BMT Al-Kariim sebesar 20 persen, lembaga donor 70 persen serta masyarakat 10 persen yang diambil dari simpanan pokok masyarakat di BMT Al-Kariim.

Pembiayaan yang diberikan untuk tahap pertama berkisar Rp 500 ribu sampai 1 juta, dengan syarat telah lolos seleksi survey calon peserta. Bagi yang lolos seleksi dan mendapat modal, ia juga berhak mendapat dana pendidikan dan kesehatan. "Fasilitas pendidikan dan kesehatan diberikan untuk menghindari ditariknya dana yang seharusnya untuk modal, terpakai untuk biaya kesehatan dan pendidikan. Dari banyak kasus, habisnya modal karena digunakan untuk berobat dan membayar SPP sekolah", kata Sulaeman Hayyun. (njm)

BMT Citra Hasanah

Strategi Promosi Dari Mulut Ke Mulut

Perjalanan menuju kesuksesan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu, keseriusan dan kerja keras. BMT Citra Hasanah yang berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam IA/4 Jakarta ini begitu merasakan hal tersebut. Didirikan pada tahun 1995, ketika BMT sedang 'hanga-hangatnya' menjadi alternatif bisnis, BMT ini berdiri hanya dengan berbekal modal awal Rp. 2 juta. Modal yang sedikit ini ternyata membuat BMT ini tidak bisa berkembang baik, di mana selama hampir 4 tahun BMT ini sempat vakum.

Kevakuman yang cukup lama ini tidak membuat putus asa pemilik dan sekaligus Direktur BMT Citra Hasanah, Nirmawati, SE. Niat untuk kembali menggiatkan BMT Citra Hasanah terus menggelitik pikirannya. Dengan langkah awal memperbaharui jumlah modal awal dan mengurus perizinan operasinya, BMT Citra Hasanah kembali beroperasi pada awal tahun 2001 dengan mengantongi izin usaha berjenis koperasi dengan Badan Hukum No.56/BH/Meneg.I/X/2000.

"Dengan strategi promosi mulut ke mulut, pedagang-pedagang kecil, home industry yang ada di sekitar Tebet menjadi target nasabah kami", kata Nirmawati. Selain itu, BMT Citra Hasanah juga membuka layanan di pasar Citeureup. Sedikit demi sedikit BMT Citra Hasanah terus berkembang, hingga akhirnya kini asetnya telah mencapai Rp. 600 juta. Rencananya tahun ini akan membuka layanan di salah satu pasar Bogor, dan karyawannya akan ditambah sebanyak 3 orang.

Adapun produk penghimpunan dana BMT Citra Hasanah melalui tabungan mudharabah, sedangkan produk pembiayaannya berupa pembiayaan murabahah. Walaupun perannya terhadap pemberdayaan pengusaha kecil masih terbatas dengan 200 nasabah, pengusaha kecil yang ada di sekitar Tebet cukup terbantu.

Koperasi BMT Citra Hasanah

Aceh Pasca Tsunami, Kultur Islam Harus Kental

"Dalam masa pembangunan kembali Aceh inilah, potensi yang paling besar untuk bisa membantu adalah dari kalangan perbankan"

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tertimpa bencana tsunami pada Ahad, 26 Desember 2004 yang lalu kini sudah memasuki tahap rekonstrusi dan pembangunan kembali, terutama setelah masa tanggap darurat bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan lebih sedikit pasca bencana tersebut. Sekarang, banyak pihak yang mengingatkan kepada pemerintah agar konsep cetak biru pembangunan kembali Aceh tidak melupakan fakta yang ada bahwa Aceh merupakan sebuah daerah yang memiliki kultur Islam yang kuat di sana. Tidak heran pihak MUI sudah meminta kepada pemerintah agar melibatkan kalangan ulama, terutama ulama setempat dalam proses pembangunan daerah itu kembali. Hal itulah yang membuat dilakukannya pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kalangan ulama Aceh di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana Negara Jakarta. Bahkan dalam rangka menjaga kultur dan budaya serta tradisi beragama masyarakat Aceh telah dilakukan pembicaraan telpon antara Presiden Yudhoyono dengan PM Malaysia Abdullah Badawi. Pembicaraan tersebut mengenai konsep tata kota dan tata pembangunan Aceh di masa yang akan datang, yang diperkirakan akan meniru konsep yang ada di Putrajaya, Malaysia. Hal ini dilakukan karena negeri jiran tersebut tampak serius dalam rangka membantu usaha Indonesia untuk melakukan pembangunan kembali di tanah Serambi Mekkah tersebut. Sikap dari Malaysia ini sudah diketahui semenjak Indonesia bekerjasama dengan PBB menyelenggarakan KTT Tsunami yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara ASEAN serta para pemimpin dari negara-negara yang terkena dampak dari bencana tersebut. Sikap Malaysia ini merupakan bukti dari solidaritas yang kuat antara negara-negara

serumpun dan sama sama dihuni mayoritas oleh umat Islam. Bahkan sebagai langkah perwujudan untuk menindaklanjuti dari keseriusan Malaysia tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengutus Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam rangka mempelajari pembangunan Putrajaya di sana. Meskipun begitu, pemerintah telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan meniru secara mentah-mentah konsep pembangunan yang ada di Putrajaya, Malaysia. " Kami tidak akan mengubah Aceh menjadi seperti kawasan Timur Tengah di sana, akan tetapi kekentalan tradisi Islam di sana akan tetap dijaga, bahkan perlu ditingkatkan", demikian Wakil Presiden Yusuf Kalla.

Hal ini perlu ditekankan karena selama berabad-abad masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari pedoman hidup mereka. Bahkan dalam masa pemerintahan reformasi ini syariat Islam telah diberlakukan di Aceh, baik dalam hal pidana, perdata, muamalah, munakahat, mawaris, akhlak, dan dalam berbagai aspek lainnya. Hal ini semua diatur dalam UU No 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi NAD. UU ini sendiri merupakan sebuah pengakuan kepada bangsa Indonesia yang diberikan pada Aceh sebagai penghargaan atas perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang selama bertahun-tahun lamanya hidup dan dipelihara di daerah tersebut. Selain itu keistimewaan Aceh juga terdapat dalam UU No 18 tahun 2001 dan Qanun NAD No 11 tahun 2002.

Karena Aceh sudah menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari, maka ada harapan agar tradisi Islam di Aceh semakin kental, proses rekonstruksi dan pembangunan kembali Aceh dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi syariah. Apalagi sudah menjadi bukti bahwa proses penyelesaian tanggap darurat di Aceh menjadi lebih mudah karena tanggapnya kalangan perbankan syariah disana. Apa yang dilakukan oleh jajaran Bank Syariah Mandiri di sana dapat menjadi contoh yang nyata dalam hal ini. Dapat diketahuinya oleh pihak pemerintah pusat bahwa 6 ribu orang yang ada di orang pulau Simeuleu masih hidup dan selamat dari bencana ini adalah karena laporan pihak kantor pusat BSM Jakarta. Pihak divisi Teknologi Informasi BSM di kantor pusatnya menyebutkan dalam laporannya bahwa kantor cabang di pulau tersebut masih berfungsi secara normal dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya arus transaksi di pulau tersebut pada tannggal 27 Desember 2004, atau hanya sehari setelah peristiwa tersebut. Masyarakat pulau tersebut memang banyak yang selamat karena mereka sudah berpengalaman dalam menghadapi bencana gempa yang pusatnya berada di dalam laut, sehingga mereka lebih waspada dan lebih dini dalam menyelamatkan diri.

Dalam masa tanggap darurat di Aceh, pihak perbankan syariah yaitu pihak BSM juga mempermudah proses transasaksi yang terjadi di sana. Bagi para nasabah yang kehilangan buku tabungan dan identitas yang mereka miliki, mereka tetap

"Mungkin inilah salah satu **"blessing in disguise"**, dari apa yang terjadi di Aceh, bahwa Aceh pasca tsunami harus lebih menunjukkan wajahnya yang **Islami**"

dapat melakukan pencairan dana dengan dibantu oleh pihak BSM dimana pihak bank akan melakukan penelusuran identitas para nasabah tersebut. Sedangkan bagi para nasabah baru yang ingin membuka tabungan di sana, syarat-syarat pembukaan rekening disederhanakan oleh pihak BSM. " Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang terkena bencana" demikian direktur BSM M Haryoko kepada pers. Dengan adanya penyederhanaan ini, maka masyarakat Aceh dapat menerima berbagai bantuan kerabat mereka yang ada di luar Banda Aceh secara on-line" demikian Haryoko kembali menambahkan.

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak BSM tersebut memang mendapatkan pujian dan sokongan dari pihak pemerintah. Dalam kesempatan beroperasi pertama kalinya BSM di daerah tersebut, hadir mewakili pemerintah adalah Menko Kesra Alwi Shihab serta wakil dari badan PBB yaitu dari United Nations Office For The Coordinator of Humanitarian Affairs (OCHA), dimana pihak PBB tersebut langsung membuka rekening dalam rangka menyalurkan bantuan kemanusiaan mereka di sana. Bahkan segera setelah itu, bank ini akan segera membuka cabang di 5 lokasi yaitu di Meulaboh, Lhokseumawe, Langsa, Singkil, dan Calang. BSM berharap kehadiran mereka di sana akan dapat membantu proses rekonstruksi dan pembangunan kembali Aceh pasca bencana tsunami.

Dalam masa pembangunan kembali Aceh inilah, potensi yang paling besar untuk bisa membantu adalah dari kalangan perbankan. Dan disinilah perbankan syariah memegang peranan penting dalam proses rekonstruksi di Aceh. Menurut Agustianto, Direktur Centre for Islamic Economic Studies dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Dilihat dari berbagai skema yang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah, proses rekonstruksi Aceh dapat dilangsungkan dengan skema-skema sebagai berikut :

1. Skim Istishna, yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan berbagai infrastruktur, seperti sarana dan prasarana, berbagai bangunan kantor, gedung, jembatan, dan lainnya.
2. Salam dalam rangka pembiayaan untuk pertanian dan perkebunan, selain dengan menggunakan skim muzara'ah
3. Murabahah, yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian alat-alat kantor, transportasi antar instansi, serta berbagai alat-alat untuk keperluan industri
4. Mudharabah dan musyarakah yang dapat digunakan untuk membiayai usaha-usaha produktif rakyat daerah Aceh
5. Ijarah yang berguna untuk pembiayaan perumahan
6. Qardh Hasan yang dapat digunakan untuk membangun rumah sakit serta pembiayaan lunak bagi para pengusaha kecil.
7. Pembangunan berbagai BPR Syariah di berbagai penjuru NAD dalam rangka menumbuhkan dan membangun kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil yang berkembang di berbagai penjuru NAD dan berada di desa-desa yang letaknya relatif jauh dari kota-kota besar di sana.

Dengan berbagai langkah yang dilakukan di atas, dapat diharapkan Aceh pasca tsunami akan semakin kental warna Islamnya. Tidak hanya dari segi ibadah, akan tetapi juga dari segi muamalah. Dengan kehadiran perbankan syariah dalam jumlah yang besar sebagai bagian dari implementasi konsep ekonomi syariah di Serambi Mekkah tersebut pasca tsunami, maka kondisi dan perkembangan perekonomian di sana diharapkan akan semakin berkembang. Mungkin inilah salah satu "blessing in disguise ", dari apa yang terjadi di Aceh, bahwa Aceh pasca tsunami harus lebih menunjukkan wajahnya yang " Islami", dengan proses rekonstruksinya yang dilakukan berdasarkan syariah Islam" demikian John T. Ritonga, pengamat ekonomi dari USU menambahkan. (hkl/ dari berbagai sumber)

Budi Wisakseno
Direktur Utama Bank Syariah Mega Indonesia

"Pangsa Pasar Bank Syariah Masih Besar Sekali"

Jumlah perbankan syariah di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Setelah selama 5 tahun terakhir tingkat pertumbuhan hanya terjadi dengan lahirnya berbagai unit usaha syariah dan pembukaan cabang di berbagai tempat dari 2 bank umum syariah yang ada, maka pada tahun 2004 ini telah lahir satu bank umum syariah yang baru, yaitu Bank Syariah Mega Indonesia (nama resminya,red) yang dikenal di kalangan masyarakat dengan nama Bank Syariah Indonesia (nama populer, red).

Bank Syariah Mega Indonesia (atau BSI) merupakan sebuah bank umum syariah milik swasta ke dua di Indonesia yang dimiliki oleh Grup Para milik konlomerat televisi dan perbankan, Chairul Tanjung. Pengusaha muda ini juga dikenal dengan kepemilikannya atas PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) dan PT Bank Mega Tbk.

Pada bulan Oktober 2001, tepatnya tanggal 10 Oktober 2001, Chairul Tanjung dan Grup Para-nya mengakuisisi PT Bank Tugu yang pada saat itu dalam kondisi tidak sehat. Dalam proses penyehatannya, mereka ingin mengkonversi bank ini menjadi sebuah bank umum syariah. Atas dasar itulah, maka pihak Para sangat menyadari perlu menempatkan seorang "nakhoda" baru dalam rangka proses penyehatan bank tersebut dan juga sebagai persiapan untuk menjadikan bank ini sebagai bank umum syariah ke tiga di Indonesia. Hal hal itulah yang menjadi landasan dari pengangkatan Budi Wisakseno, salah seorang direktur Bank Muamalat, menjadi Direktur Utama bank tersebut.

Kinerja keras Budi dalam menyehatkan bank tersebut tidak sia sia, karena pada tahun ini jajaran direksi yang dipimpinnya berhasil menjadikan bank ini sebagai bank umum syariah.

Berikut petikan wawancara Mohamad Heykal dan Siti Najma dari ES dengan bankir yang ramah dan murah senyum ini di sela-sela kesibukannya :

ES : "Bank Syariah Mega Indonesia ini kan sebelumnya adalah Bank Tugu, apa yang menjadi alasan konversi dari bank tugu yang konvensional menjadi sebuah bank umum syariah, dan apakah ini yang menjadi alasan dari pengangkatan bapak menjadi direktur utama di bank ini ? "

Budi Wisakseno (BS) : "Kalau ditanya alasan sebenarnya lebih tepat bila ditanya ke pemilik ya, karena alasan tersebut sebenarnya adanya pada pihak pemilik. Tapi dapat dikatakan begini, yaitu adanya keterpanggilan pemilik terhadap agamanya. Sebagai seorang pengusaha di banyak tempat dan dalam berbagai industri. Kemudian beliau banyak melakukan diskusi dengan mereka yang ahli dalam bidang perbankan syariah, sehingga timbullah niat untuk juga membuka juga sebuah bank syariah, jadi bisa dikatakan panggilan hati , alasan emosional. Kedua, alasan tersebut kok juga sesuai dengan kondisi yang ada 3 tahun terakhir tentang perkembangan perbankan syariah yang pesat, kok ini mengggejala, membesar, dan kok bisa direspon oleh masyarakat. Kalau dia seorang pebisnis tulen, ya benar, ini bisnis, maka jadinya klop. Jadi karena alasan emosional dan juga alasan rasional. Nah yang kedua, siapa yang cocok untuk menjadi nakhodanya. Nah kemudian mereka mencari-cari, ya karena kehendak Allah-lah maka akhirnya saya di sini (tersenyum).

ES : " Kapan rencana konversi ke bank syariah ini dimulai sebenarnya ? "

" Di tahun 2001, ada investor yang masuk yaitu Paraglobal Investindo dan Partan Investama. Dua PT tersebut dimiliki oleh satu orang, yaitu pak Chairul Tanjung, dan diambillah resmi pada 10 Oktober 2001. Terus terang, bank ini dulu hampir mati, dan dengan metodologi penyehatan, maka masuklah investor baru. Nah 2001 Oktober hingga 2002 bank ini disehatkan dulu. Kalau kita analogikan dulu bank ini sakit, dan dalam kondisi koma, maka bank ini sekarang sudah sehat, dan sudah bisa keluar dari rumah sakit. Nah di situlah tugas kita sebagai manajemen agar bank ini bisa sehat penuh dan kemudian secara perlahan-lahan mulai dikonversi menjadi bank syariah. Sedikit-sedikit kita bedah dan pelajari tentang bank ini, dan kita lihat masih ada hal-hal yang harus dibenahi agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Terus hingga akhirnya keluarlah ijin prinsip itu pada tanggal 13 Oktober 2003. Ijin prinsip diberikan kepada kita dari BI. Menurut peraturan 6 bulan setelah ijin prinsip, harus keluar ijin operasi. Keluarlah ijin operasinya pada 27 Juli 2004, dan sejak itulah kita menjadi bank syariah.

ES : " Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Bank Syariah Mega Indonesia terhadap tenaga sumber daya manusianya ? "

"Pertama-tama dalam melakukan perekrutan sumber daya yang ada kan kita tidak bisa berlaku semena-mena. Kita harus ingat bahwa kita masuk kemari ini kan ada badan yang sudah tumbuh di sini, maka mereka harus kita utamakan. Jadi banyak sekali ceritanya. Selain kita bertugas untuk mensyariahkan bank ini, maka kita juga harus membikin normal bank ini sebagaimana bank pada umumnya. Segala aspek, mulai dari operasional, pemasaran, teknologi, dan juga sumber daya manusianya. Memang ada lack dalam pengetahuan tentang bank normal pada umumnya dengan sebuah bank syariah. Nah di situ yang kita kejar. Nah tapi kita kan juga berlomba dengan waktu. Kan nggak mungkin kita hanya fokus pada internal saja, sementara kita juga berlomba di pasar. Nah dengan begini kita " import " tenaga dari luar. Sementara yang di dalam kita arahkan untuk menjadi tenaga di bank syariah, dan untuk mempercepatnya maka kita juga mengusahakan agar mereka yang di dalam juga belajar dari tenaga yang import ini.

ES : "Bagaimana cara BSI untuk bersaing dengan 2 bank umum syariah yang lain yang sudah besar ?"

"Pangsa pasar bank syariah ini masih sangat besar. Dari potret yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia sendiri, kondisi bisnis perbankan syariah itu, ini tidak perduli BUS (Bank Umum Syariah, red) atau UUS (Unit Usaha Syariah, red) itu baru sekitar 0,1 persen hingga 0,2 persen. Pembiayaan juga masih kecil, baru sekitar 0,5 persen dari total perbankan nasional yang ada. Maka bila ada pertanyaan, apa tidak berebutan, ya tidak, sebab pangsanya memang masih besar sekali. Lahan yang digarap juga masih besar sekali. Kemudian bagaimana dengan yang 2 besar itu, apa mereka tidak menganggap akan ada pesaing baru, menurut saya nggak, karena mereka sudah memiliki jalur masing-masing. Anda pergi ke stasiun, ada berapa rel, ada berapa jalur. Jadi banyak. Saya rasa tidak ada yang merasa terganggu. Contoh kecil saja, Bank Syariah Mega Indonesia ini memang terhitung masih baru. Nah sebelum kita konversi menjadi bank syariah bank ini terkenal dengan layanan " consumer banking". Nah, begitu kita konversi, maka layanan ini menjadi salah satu strength point kita. Tapi bukan berarti kami paling bagus di sini, tidak, akan tetapi di sini pesat, meskipun kami juga harus bisa ke sektor lain, seperti commercial, dan lain lain.

ES : "Bagaimana dengan pangsa pasar yang dituju nantinya oleh bank ini, apakah akan merambah ke pasar emosional atau juga mencoba ke pasar rasional ? "

"Kami dari dulu sudah memiliki semboyan bahwa kami akan tetap merangkul kalangan emosional, akan tetapi the ultimate goal adalah tetap menuju ke pasar rasional. Pendapat tadi saja sudah membedakan kami dengan bank bank syariah yang lain kan. Contoh ada bank syariah yang sudah menegaskan bahwa pasar mereka adalah pasar emosional, akan tetapi bukan tidak mungkin bahwa kalangan rasional masuk ke kawasan ini. Ini saja kan sudah beda. Jadi kami tetap merangkul kalangan emosional, akan tetapi dengan tujuan utama untuk merangkul kalangan bisnis.

Budi Wesakseno pada saat penandatanganan MoU

Budi sudah lama berkarir sebagai bankir semenjak dirinya lulus dari Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi pada tahun 1980.

> "Ada bank syariah yang sudah menegaskan bahwa pasar mereka adalah **pasar emosional**, akan tetapi bukan tidak mungkin bahwa kalangan rasional masuk ke kawasan ini"

Bahkan sebelum dirinya lulus pun ia sudah bekerja di Citibank Jakarta sebagai tenaga staf di sana hingga tahun 1981. Semenjak saat itu, dunia perbankan seperti menjadi makanan sehari-hari kehidupan Budi, antara lain ia sempat bekerja di Bank Duta, Bank Universal, Rabobank dan Bank Danamon, hingga akhirnya hijrah dari perbankan konvensional ke perbankan syariah dengan bekerja di Bank Muamalat dengan berbagai posisi seperti GM Human Resources dan Finance dan posisi sebagai direktur kepatuhan dan direktur keuangan yang dijabatnya hingga tahun 2002. Pada tahun 2003, PT Bank Tugu (Kini Bank Syariah Mega Indonesia) merekrut ayah 2 putri ini untuk menjadi Direktur Utama bank tersebut, hingga sekarang.

ES : " Bagaimana pendapat bapak tentang konsep pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah sekarang ini, dimana didominasi secara terus menerus dengan konsep murabahah, dan bagaimana langkah yang tepat sehingga dominasi tersebut bisa dikurangi untuk menuju ke musyarakah dan mudharabah ? "

"Ini sudah menjadi pembicaraan yang panas di mana-mana. Baru baru ini saya diminta untuk berbicara di PPSK (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, red) BI. Nah, menurut saya, berdasarkan pembicaraan yang berkembang, apakah salah murabahah? Itu kan merupakan salah satu cara berbisnis bank syariah juga. Nah, kemudian bagaimana untuk meningkatkan musyarakah dan mudharabah itu ? itu semua (musyarakah, mudharabah, murabahah, red) semuanya tepat untuk perbankan syariah. Cuma, ada tingkatannya. Murabahah itu kan yang paling mudah, nah dan bank wajar kalau pingin itu yang duluan, karena ia ingin memberikan bagi hasil yang baik kepada para deposannya, tetapi ia juga harus ingat bahwa itu tidak bisa lama-lama. Nah, kembali kita dalam cara untuk merangkul semua pihak itu, terutama kalangan rasional, dengan semua skim diusahakan, termasuk dengan skim murabahah.

ES : "Kalau kita boleh tahu apa langkah-langkah yang sedang dikerjakan saat ini oleh BSI ?"

"Terus terang saat ini kita berpacu dengan yang sudah ada dua itu. Jadi kita tidak bisa mendahulukan apa yang dinamakan intensifikasi dulu, baru kemudian ekstensifikasi, jadi harus dikerjakan dua-duanya, hanya dengan proporsi beda-beda. Ternyata selama setahun yang lalu itu kita intensifikasi itu nggak cukup, masih banyak yang harus dibenahi, tapi kita juga harus menyebar ke luar. Nah,tingkatannya bagaimana? Kita mengerjakan kedua-duanya, namun kalau dalam bisnis kita harus melihat, kekuatan kita ada di mana. Sekarang ini kita lihat, bahwa pada 2005 kita masih harus mempertahankan portofolio kita dalam sektor consumer banking, karena nggak bisa dipungkiri bahwa itulah strength point kita yang bisa menahan dan menarik para deposan kita yang lama. Nah hasil dari margin murabahah ini dapat kita bagi hasil kepada deposan. Tapi kalau nanti kita sudah buka cabang di mana-mana, maka hasil ini tidak bisa menjadi single mayority. Nah yang kedua ini dengan cara murabahah kita bisa mengenal para calon klien kita, bagaimana pengurusan perusahaannya, dan lain sebagainya. Nanti, kalau sudah setahun dua tahun, baru kita pakai skim mudharabah, atau musharakah.

ES : "Bagaimana dengan sumber daya manusia yang dipergunakan oleh Bank Syariah Mega Indonesia ini, apakah ada tenaga yang non muslim mengingat bank ini dahulu kan merupakan bank konvensional ? "

"Sampai detik ini total karyawan yang non muslim ada 15 orang orang. 6 orang di Jakarta dan 9 orang di Surabaya, karena cabang kami baru dua. Tapi entah kenapa, dan ini bukan karena kemauan management, mereka tetap bergabung dengan kami. Padahal kami tidak menjual agama, karena ini bisnis. Tapi karena mungkin setelah mereka diterangkan dengan konsep ini, mereka melihat bahwa konsep ini adalah yang paling adil, maka mereka tetap bergabung. Bahkan dari 15 orang itu, ada 4 orang yang performancenya paling bagus, dan wakil pimpinan di Surabaya, kebetulan ia WNI keturunan yang non muslim, bisa mendapatkan dana dari para deposan non muslim dengan sangat besar.

ES : "Bank ini dikenal dengan dua nama, yaitu Bank Mega Syariah Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, bagaimana hal ini bisa terjadi ? "

"Nah ini ada kisahnya. Pemilik memilih nama dari sekian ratusan nama adalah Bank Syariah Indonesia. Jadi di kala itu, tahun 2003, PT-nya Bank Syariah Indonesia, dan logonya juga sama (Bank Syariah Indonesia, red). Nah, waktu kami urus ke Depkeh-HAM, mereka menolak PT-nya, kalau logonya nggak masalah. Jadi harus ada sisipan, entah di depan kata syariah atau sebelum kata Indonesia. Maka, kemudian manajemen dan pemilik mengganti PT-nya dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia, kalau logo dan yang lainnya tidak ada masalah. Tapi untuk ke depan kami merencanakan untuk menjadikan nama bank ini satu nama dan dengan logo yang sama dengan nama PT-nya (ES).

Survey : Jakata Kota Terkorup di Indonesia

Persepsi kalangan pengusaha terhadap korupsi memang tidak identik dengan realitas korupsi

Predikat baru diberikan oleh Transparency International Indonesia (TII) kepada kota Jakarta. Berdasar survei yang telah dijalankan, TII menjuluki Jakarta sebagai kota yang paling korup. Maksudnya, korupsi di Jakarta nilainya paling besar dibandingkan 21 kota/ kabupaten yang menjadi area survei lembaga tersebut.

Ketua Badan Pengurus TII, Todung Mulya Lubis, menjelaskan survei dilakukan dengan mewawancarai 1.305 pebisnis yang terdiri atas 1.117 pebisnis local dan 118 pebisnis multinational. Kata dia, melalui survei ini, TII ingin mengetahui persepsi para pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri menyangkut kegiatan korupsi di Indonesia.

Todung menambahkan, persepsi kalangan pengusaha terhadap korupsi memang tidak identik dengan realitas korupsi. Namun demikian, jelasnya, kenyataan korupsi itu bisa ditunjukan secara riil keberadaannya melalui persepsi tersebut, mengingat para pebisnis berinteraksi langsung dengan korupsi setiap hari.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap Jakarta mendapatkan poin 3,38 – poin terendah berarti korupsinya tertinggi – disusul oleh Surabaya (3,93), Medan (4,09), Semarang (4,17) dan Batam (4,23). Hasil yang menunjukan Jakarta sebagai kota yang terkorup tidaklah mengejutkan karena peredaran uang dan keputusan-keputusan ekonomi maupun politik banyak dibuat disitu.

Selain berdasarkan wilyah, TII juga memuat persepsi tentang korupsi berdasarkan kelembagaan yang rawan kegiatan interaksi korupsi. Lembaga yang dipersepsi paling sarat interaksi korupsi adalah Bea Cukai dengan prosentase tertinggi (62 persen dari seluruh transaksi). Kemudian disusul oleh kepolisian (56 persen), militer(49 persen) dan lembaga peradilan (48 persen). Partai politik berada di urutan terakhir.

Masih terkait dengan korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) juga mencatat volume laporan korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) menduduki urutan kelima di Indonesia. Lembaga tersebut pun telah mrurunkan satgas ke Sumsel guna menyelusuri laporan-laporan masyarakat soal dugaan korupsi.

BPS : Investasi Gairahkan Pertumbuhan Ekonomi 2004

Badan pusat statistik (BPS) mencatat investasi ikut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004. Pertumbuhan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), mencapai 5,13 persen dari tahun sebelumnya hanya 4,1 persen.

Kepala BPS, Choiril Maksum, mengatakan pertumbuhan PDB tertinggi dihasilkan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,70 persen. Diikuti oleh sektor bangunan sebesar 8,17 persen, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 7,72 persen. Pertumbuhan PDB terjadi hampir di semua sektor ekonomi kecuali pertambangan dan penggalian.

Pendorong PDB memang sama kuatnya antara konsumsi dan pembentukan modal (investasi). Tahun ini investasi akan berperan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 ini, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 2.303 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp 1.660 triliun.

Laju pertumbuhan ekonomi 2004 didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat yang meliputi pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,94 persen dan konsumsi pemerintah 1,95 persen. Pembentukan modal tetap bruto 15,71 persen, ekspor 8.47 persen serta pertumbuhan impor sebesar 24,95 persen. Apa yang dicapai pada tahun 2004 ini merupakan sinyal bagus bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen di APBN 2005 dapat dicapai.

Presiden Setuju, Maret TKI Ilegal Ditindak Tegas

Dalam pembicaraan empat mata dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyepakati dilakukannya tindakan keras terhadap tenaga kerja Indonesia illegal yang masih berada di Malaysia pada awal Maret 2005. Presiden Yudhoyono berharap sisa waktu yang ada dimanfaatkan untuk menangani masalah yang belum terselesaikan, seperti pembayaran gaji dan pengurusan dokumen TKI.

Menurut Presiden Yudhoyono, semangat pertemuan dengan perdana menteri (PM) Badawi semata-mata untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal selama februari 2005, sebelum pada maret 2005 pemerintah Malaysia menerapakan operasi Nasihat berupa pengejaran dan penangkapan tenega kerja illegal yang masih berada di Malaysia , termasuk TKI.

Presiden Yudhoyono berharap Maret nanti sudah banyak masalah TKI illegal yang diselesaikan, seperti pembayaran gaji oleh para majikan yang saat ini masih tertunda dan pengurusan izin kerja TKI itu sendiri.

Untuk langkah ke depan, jika masih ada TKI illegal di Malaysia pada Maret 2005, Presiden meminta agar Duta Besar Indonesia untuk Malaysia serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil langkah-langkah tepat.

India

Mahathir Mohamad : "Negara-Negara Islam Harus Mengurangi Penggunan Dollar Amerika"

Mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, dalam kesempatan penganugerahan Dr HC untuk dirinya dari Dhaka University mengungkapkan harapannya agar negara-negara muslim yang ada di dunia tidak melakukan perdagangan luar negeri dengan mata uang Dollar Amerika. "Penggunaan mata uang Dollar Amerika hanya akan mengakibatkan negara tersebut (AS, red) menjadi bertambah kaya, dan uang tersebut akan dipergunakan oleh AS untuk mendanai dan membangun Israel. Pada akhirnya Israel akan membeli senjata untuk membunuhi masyarakat Islam di sana", demikian Mahathir menegaskan.

Mahathir mengatakan bahwa ia sudah berkali-kali mendesak negara Arab agar tidak menggunakan mata uang dolar Amerika dalam kegiatan perdagangan yang mereka lakukan. Dikatakan olehnya lagi, penggunaan mata uang tersebut (US $, red) hanya akan mengakibatkan nilai mata uang tersebut menjadi terus meningkat dan memperkuat ekonomi AS, sedangkan bila negara-negara muslim tidak mempergunakannya maka dengan sendirinya akan memperlemah kondisi perekonomian negara tersebut. Ia juga menegaskan kembali akan idenya agar negara-negara muslim mempergunakan mata uang dinar sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan integrasi perdagangan di antara dunia Islam. "Kita harus terus memperkuat kekuatan ekonomi di antara kita sendiri, karena hanya selalu menyalahkan Amerika Serikat dan Israel tidak akan menyelesaikan masalah bila kita berada dalam posisi yang lemah" ujarnya dengan tegas. (hkl)

Sudan

Krisis Darfur di Sudan, Bagaimana Perkembangannya ?

Sudan, sebuah negara yang penduduknya mayoritas mulim di kawasan Afrika bagian tengah sebenarnya merupakan negara di benua Hitam yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Akan tetapi tampaknya negara ini tidak henti-hentinya dirundung berbagai masalah. Sebagai negara Islam, sudah lama Sudan mengalami krisis politik yang berkepanjangan sebagai akibat perang saudara yang terjadi antara pemerintah Sudan di kawasan Utara yang mayoritas muslim dengan sebagian kecil penduduk di kawasan Selatan negara tersebut yang mayoritas Kristen dan dikoordinir di bawah gerakan Sudan's Liberation Army (SLA) di bawah pimpinan John Garang. Konflik ini tidak dapat dikatakan baru, karena sudah lama terjadi semenjak Sudan berada di bawah kepemimpinan Sadik Al Mahdi selaku PM dan eskalasinya semakin meningkat semenjak Jend. Omar Hassan Al Bashir dan guru spiritualnya Sheik Hassan Turabi berada di puncak kekuasaan.

Akan tetapi, krisis yang terjadi di Sudan ternyata menjadi semakin parah karena adanya krisis lain di sana, yatu konflik yang terjadi di kawasan Darfur, sebuah propinsi di Sudan yang penduduknya mayoritas Muslim. Konflik yang terjadi ini mengakibatkan krisis kemanusiaan yang cukup parah di sana. Itulah yang mengakibatkan munculnya tudingan dari sebagian negara, terutama negara-negara Barat bahwa konflik yang terjadi di Darfur, Sudan merupakan sebuah aksi pembersihan etnis (genosida) (hkl).

Amerika Serikat

Jimmy Walter : "11 September Konspirasi Pemerintah AS"

Sekitar akhir tahun lalu, seorang milyuner AS, Jimmy Walter mengungkapkan kepada pers dalam negeri AS dirinya yakin dan memiliki bukti bahwa peristiwa 11 September 2001 yang menyerang serta menghancurkan 2 menara kembar (twin tower WTC) adalah sebuah konspirasi tingkat tinggi yang dirancang oleh pemerintah AS. Bahkan karena yakinnya, Walter berani mengumumkan sebuah sayembara "siapa saja yang bisa membuktikan bahwa teori yang diumumkan oleh pemerintah AS adalah benar, ia akan diberi $ 100.000" ujarnya. Ia berani mengumumkan tantangan ini setelah dirinya melakukan investigasi dalam masalah ini dengan menelan biaya lebih dari $ 3 juta.

"Sudah pasti kita sama sekali tidak mengharapkan adanya pemenang dalam kontes ini" ujar pria berusia 57 tahun ini. Bahkan direncanakan ia akan mengeluarkan tantangan ini tidak hanya kepada para orang dewasa, akan tetapi juga kepada kalangan anak-anak sekolah, terutama anak-anak SMA. Hadiah yang ditawarkan kepada mereka adalah $ 10.000.

Hingga berita ini diturunkan tidak pernah ada tanggapan resmi dari pihak resmi pemerintah AS atas pendapat yang diberikan oleh Jimmy Walter, termasuk dari pihak Komisi Penyelidik peristiwa tersebut (hkl).

Iran

Peringatan 26 Tahun Revolusi Iran

Sekitar 2 juta penduduk Teheran berbondong-bondong memenuhi ruas jalan utama di Teheran serta memadati Azadi Square dalam rangka peringatan 26 tahun revolusi Islam Iran. Para penduduk Teheran ini seolah tidak menghiraukan cuaca dingin yang mencapai – 4 derajat celcius dan salju setebal 50 cm yang menyelimuti kota Teheran.

Para penduduk yang hadir tersebut tidak hanya terdiri dari para orang tua, akan tetapi anak-anak dan juga bayi dilibatkan oleh para orang tua mereka dalam rangka mengenang peristiwa yang berlangsung 26 tahun yang lalu itu. Mereka tidak akan pernah lupa ketika Imam Khomeini dengan gagahnya kembali dari pengasingannya di Perancis pada 1 Februari 1979 dimana kepulangannya menghancurkan sisa-sisa rezim terakhir syah Iran Mohammad Reza Pahlevi yang dipimpin oleh Shahpour Bakhtiar. Meskipun para pelaku sejarah peristiwa tersebut banyak yang sudah almarhum saat ini akan tetapi semangat dari revolusi ini sendiri masih menjiwai banyak dari masyarakat Iran.

Dalam kesempatan tersebut massa yang hadir dengan bersemangat mengikuti setiap orasi yang diberikan oleh para pemimpin Iran yang berorasi dalam kesempatan tersebut. Mereka yang memberikan orasi diantaranya adalah Presiden Iran Mohammad Khatami. Dalam sambutannya ia menyatakan bahwa "meskipun banyak perbedaan pendapat di dalam negara Iran sendiri, akan tertapi kami sangat menentang adanya invasi ke negara. Mereka yang mencoba untuk menyerang Iran akan berhadapan dengan neraka" demikian ungkapnya yang langsung disambut dengan teriakan *"Marg Bar Amrika, Marg Bar Bush, dan Marg Bar Israil* (Matilah Amerika, Matilah Bush, dan Matilah Israel) (hkl).

Palestina

Terpilihnya Mahmud Abbas, Angin Surga Bagi Perdamaian ?

Terpilihnya Mahmud Abbas sebagai presiden baru di Otoritas Palestina menggantikan alm. Yasser Arafat diperkirakan akan membawa angin pembaruan bagi perdamaian di Palestina. Hal ini terlihat dari sambutan yang diberikan oleh banyak negara di dunia yang menyambut dengan baik kemenangan Abbas dalam pemilihan presiden tersebut. Antara lain dari negara-negara Eropa, AS, dan juga dari negara-negara Timur-Tengah. Sambutan bernada positif, meskipun masih bersayap juga datang dari para pemimpin zionis Israel, termasuk dari PM Ariel Sharon. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya baru-baru ini, ia mengungkapkan bahwa pemerintahnya berencana untuk maenghapuskan permukiman Yahudi yang dibangun oleh pemerintah Zionis di jalur Gaza dan Tepi Barat. Bila hal ini benar-benar dilaksanakan, tentunya keinginan untuk mewujudkan sebuah negara Palestina yang berdaulat akan benar-benar terwujud. Akan tetapi, pernyataan ini masih ditambah sebuah ungkapan " bila Mahmud Abbas benar-benar bisa menegakkan perdamaian di wilayahnya serta mencegah adanya berbagai serangan terhadap Israel".

Pernyataan bersayap inilah yang seringkali membuat pesimistis banyak pihak bahwa perdamaian sejati benar-benar akan terwujud di kawasan Timur Tengah. Apalagi banyak pihak belum lupa bahwa PM Israel ini sudah pernah membuat Mahmud Abbas berada dalam kesulitan dengan "memutuskan" semua kontak dengan pihak Otoritas Palestina justru pada saat awal dirinya terpilih sebagai presiden Otoritas tersebut. Langkah awal yang tidak simpatik dari Ariel Sharon itulah yang membuat Menlu AS yang baru, Condolezza Rice mendesak pemerintah Israel agar tidak melakukan tindakan politik yang akan mempersulit posisi Mahmud Abbas di mata rakyatnya sendiri (hkl)

IDB Cairkan Pinjaman Dana untuk Rekonstruksi NAD

Bank Pembangunan Islam (IDB) berkomitmen untuk segera mencairkan pinjaman sekitar 443 juta dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 4,12 triliun dalam rangka mendukung program rehabilitasi dan penyelamatan yang ada di propinsi Naggroe Aceh Darussalam. Pinjaman tersebut akan diberikan dengan skim murabahah dengan keuntungan antara 2,5% hingga 6 % dari jumlah pinjaman yang diberikan. Demikian yang diungkapkan oleh Charmeida Tjokrosuwarno, Kepala perwakilan IDB untuk Indonesia di Jakrarta dalam rangka konferensi Khusus ASEAN dan Dunia pasca Tsunami tersebut.

Disebutkan olehnya lagi bahwa IDB telah menyampaikan komitmen bantuan berupa pinjaman lunak sebesar 50 juta dollar AS serta dana hibah sebesar 3 juta dollar AS. Selain itu IDB akan memberikan pinjaman normal sebesar 160 juta dolar AS yang akan digunakan dalam rangka pengadaan peralatan serta pembaungan sarana fisik dan non fisik di Aceh. "IDB juga sudah menetapkan bahwa akan ada tambahan pinjaman khusus untuk keperluan perdagangan, yakni untuk pembelian barang-barang impor terkait dengan kebutuhan penanggulangan bencana senilai 230 juta dollar AS. Pembelian barang impor tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pemerintah Indonesia" Charmeida menambahkan.

Pinjaman yang diberikan oleh pihak IDB ini dapat dikatakan sangat ringan, karena jika dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya yang telah membebani berbagai biaya, seperti biatya komitmen dan final, bahkan ketika pinjaman tersebut belum dapat dicairkan (hkl)

Pembiayaan Syariah bagi Para Petani

Setelah selama 5 tahun berada di bawah para kader PDI-P yang sama sekali tidak menunjukkan minat akan dunia ekonomi syariah, pergantian wajah penguasa Departemen Pertanian juga membawa perubahan baru terhadap sikap departemen tersebut terhadap konsep ekonomi syariah. Kesempatan kepemimpinan Menteri Pertanian Anton Apriyantono, salah seorang kader PKS ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan konsep ekonomi syariah kepada jajaran departemennya dengan memberikan ide untuk memberikan semacam kredit/ pembiayaan syariah bagi para petani. " sistem ini cukup fair bagi para petani karena tidak akan membebani mereka dengan bunga tapi melalui perhitungan nisbah yang wajar," demikian Anton menambahkan.

Selama ini kredit yang diberikan kepada para petani adalah kredit ketahanan pangan yang menggunakan sistem subsidi bunga kepada para petani. Dana dari program ini diambil dari daftar isian proyek khusus sebesar Rp 115 miliar per tahun. Program kredit komersial ini menawarkan kredit dengan bunga di bawah 10% dan di bawah kredit komersial yang mencapai 14%. Dengan adanya ide untuk mengeluarkan pembiayaan syariah bagi para petani ini, maka nantinya di Departemen tersebut akan terdapat dua program pembiayaan.

Pola yang akan diterapkan dalam kredit syariah ini adalah Departemem Pertanian tidak akan langsung mengucurkan kredit kepada para petani. Mereka hanya akan menjaminkan kredit ke dalam sektor agribisnis dengan melakukan penyetoran dana ke perbankan syariah dengan menggunakan dua nama lembaga penjaminan yang ada di Departemen Keuangan, yaitu Askrindo dan Perum Sarana Penjaminan Usaha "dengan menggunakan dana dari APBN 2005" katanya lagi. Akan tetapi, dana jaminan yang dipergunakan ini merupakan dana bergulir, jadi tidak akan habis seperti anggaran" ujar menteri yang dikenal sangat sederhana dan "ogah" untuk naik mobil dinasnya yang mewah ini. (hkl)

JII Belum Cerminkan Pasar Modal Syariah

Jakarta Islamic Index (JII) yang selama ini dikenal sebagai sebuah indeks syariah di Bursa Efek Jakarta hingga sekarang belum bisa dianggap sebagai cerminan dari sudah berkembangnya pasar modal syariah di tanah air. Hal itul ditegaskan oleh anggota Dewan Syariah Nasional MUI yang selalu berkecimpung dalam dunia pasar modal, M Gunawan Yasni. Dikatakan olehnya bahwa *"demi menuju sempurnanya pasar modal syariah, maka seyogyanya pihak Bapepam mulai mengakomodir fatwa yang ada dari DSN mengenai obligasi dan reksa dana syariah"*. Dalam pengamatannya, hingga saat ini belum ada satu pun fatwa-fatwa dari DSN yang berkaitan dengan pasar modal syariah yang dimasukkan ke dalam peraturan Bapepam.

"Hal ini berbeda dengan yang ada di Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah, di mana di sana terdapat fatwa DSN mengenai giro wadiah atau tabungan dengan konsep mudharabah" katanya lagi. Ditegaskan

pula oleh Yasni bahwa langkah menuju ke penyempurnaan pasar modal syariah di tanah air dapat dimulai dengan revisi UU Pasar Modal yang saat ini sedang dikerjakan oleh DPR, dimana dalam revisi tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pasar modal bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah (hkl)

Badan Amal Islam Diminta Bayar Ganti Rugi 156 Juta Dollar AS

Tekanan dan cobaan terhadap umat Islam AS tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat ini. Baru baru ini, pengadilan di Chicago, AS telah memutuskan agar 4 badan amal Islam di negeri Paman Sam itu agar membayar ganti rugi sebesar 156 juta dollar AS. Dana ini harus dibayarkan bagi orang tua David Boim, seorang remaja Yahudi yang tewas tertembak di kawasan jalur Gaza ketika sedang menunggu bis pada bulan Mei 1996, atau sekitar 9 tahun yang lalu. Kedua orang tua anak tersebut, Stanley dan Joyce Boim menuding kelompok Hamas yang ada di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai pelakunya.

Sebagai akibat dari peristiwa tersebut, kedua orang tua David tersebut kemudian melakukan gugatan kepada 4 badan amal Islam yang ada serta terhadap seorang individu dengan tuduhan keempatnya diduga turut mengumpulkan dana bagi operasional kelompok Hamas dengan tuntutan sebesar 300 juta dollar AS, yang akhirnya hanya dikabulkan sebesar 156 juta dollar AS.

Salah satu organisasi yang diperkarakan tersebut, The Qur'anic Institute menyatakan mereka tidak melakukan perlawanan dalam persidangan karena pengacara mereka sangat sedikit memiliki waktu untuk mempelajari masalah ini. "Selain itu kami rasa sikap anti Islam sangat mewarnai sistem peradilan di AS" demikian diungkapkan oleh salah seorang pengurusnya kepada pers (hkl, dari berbagai sumber)

Obligasi Syariah Tidak Menciptakan Gap

Obligasi Syariah mudharabah PT Indosat saat ini merupakan salah satu obligasi syariah yang memberikan *return* rata-rata paling tinggi. Atas prestasinya itu obligasi syariah mudharabah milik PT Indosat memperoleh rating *Triple A Plus*.

Dengan *return* setara *rate* yang pernah mencapai 20 persen dan terendah 16 persen, obligasi syariah PT Indosat yang menggunakan akad bagi hasil ini merupakan obligasi syariah pertama yang tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES). Atas prestasinya PT Indosat menerima penghargaan dari BES sebagai *The First Syariah Bond Listed on Surabaya Stock Exchange* (SSX).

Menurut *Vice President Investor Relation* PT Indosat, M Wahid Sutopo, *return* yang diberikan oleh Indosat kepada pemegang obligasi sebetulnya fluktuatif atau naik turun, "jika pendapatan dari dua unit bisnis itu tinggi maka tinggi pula yang kami bagikan kepada pemegang obligasi. Tapi jika turun maka berkurang pula *return*-nya" ujarnya.

Dengan akad mudharabah, menurut Wahid, memungkinkan tidak adanya gap antara pendapatan dan *return* yang diberikan kepada pemegang obligasi. Karena memiliki *return* yang cukup bagus, obligasi syariah PT Indosat merupakan obligasi yang diminati. Sayangnya, karena memiliki *return* yang tinggi, pemegang obligasi enggan melepas obligasinya ke pasar sekunder. Memang kecenderungan pasar seperti itu. "jika memiliki *return*-nya bagus buat apa dijual lagi,"kata Wahid. (bud)

Booming Bank Islam di Pakistan

Industri perbankan Islam (PI) di Pakistan sedang booming. Selama 18 bulan terakhir, *outlet* lembaga keuangan Islam disana benar-benar meningkat pesat. Tidak saja bank lokal, tetapi bank-bank asing yang beroperasi di sana juga berlomba-lomba membuka layanan berbasis islam. Menurut Pervez Said, direktur Departemen Bank Islam pada Bank Sentral Pakistan, "bank Islam saat ini sudah eksis". Saat ini di Pakistan baru ada dua bank yang benar-benar atau yang beroperasi penuh sesuai dengan syariah Islam. Pesatnya pertumbuhan keuangan Islam ini merupakan hasil perjuangan masyarakat muslim negara tersebut sejak 1960an.

Pada tahun 1984 Presiden Pakistan saat itu, Zia ul-Haq (alm, red) memerintahkan industri perbankan menjalani sistem syariah. Tapi perintah ini tidak didukung oleh regulasi dan infrastruktur keuangan yang sesuai. Dalam dua tahun terakhir situasi berubah total. Untuk menandai perubahan periode, Bank Sentral Pakistan mengizinkan Citibank, ABN Amro, dan tujuh bank lain membuka layanan sesuai dengan syariah. ''Hampir seluruh bank besar sudah mengajukan izin untuk membuka layanan syariah," kata Pervez.

Berdasarkan riset dan survei yang dilakukan baru-baru ini menyebutkan bahwa kebutuhan layanan bank Islam amat tinggi. Bank Islami adalah bank yang akan beroperasi secara Islami. Pertengahan bulan Februari ini bank Islami sudah bisa beroperasi dan siap membuka lebih dari enam cabang baru. Bank Islami akan menjadi bank ketiga yang beroperasi secara Islami (bud)

Indonesia Kita ?

Ternyata, Departemen Keuangan memiliki banyak rekening antara yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digunakan untuk menampung dana yang belum disetorkan ke kas negara. Rekening yang di atas namakan Menteri Keuangan ini menurut BPK berjumlah 16 rekening dan sampai dengan bulan Janurai 2005 lalu, bersaldo lebih kurang Rp. 20 trilliun. BPK juga menemukan 4 rekening lain yang khusus menampung hasil penjualan obligasi negara dan saldo di rekening tersebut sebesar Rp.172,8 milyar yang belum disetorkan ke kas negara. Meskipun menurut Departemen Keuangan dana tersebut nantinya akan disetorkan juga ke kas negara, tetapi bentuk seperti ini akan membuka peluang terjadinya penyelewengan terhadap dana-dana tersebut oleh Departemen Keuangan, apalagi rekening ini sepertinya tak terbuka secara transparan. Bagaimana kita dapat mempercayai Departemen Keuangan untuk mengurus keuangan negara kita?

BPK melaporkan satu kasus di departemen keuangan. Dalam pemeriksaan mereka terhadap Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun 2003, terdapat belanja negara sebesar Rp. 8 milyar yang tidak didukung bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Dana tersebut dicairkan melalui surat permintaan pembayaran (SPP) dari Bendaharawan Rutin Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dan tercatat dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk alokasi anggaran operasional taktis pengamanan peneri-maan negara. Kenyataannya dalam laporan keuangan pemerintah disebutkan SPP tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu dan dilampiri oleh surat yang menyatakan dana tersebut digunakan untuk keperluan khusus dan rahasia sesuai perintah Sekjen atau Menteri. *Wallahualam!*
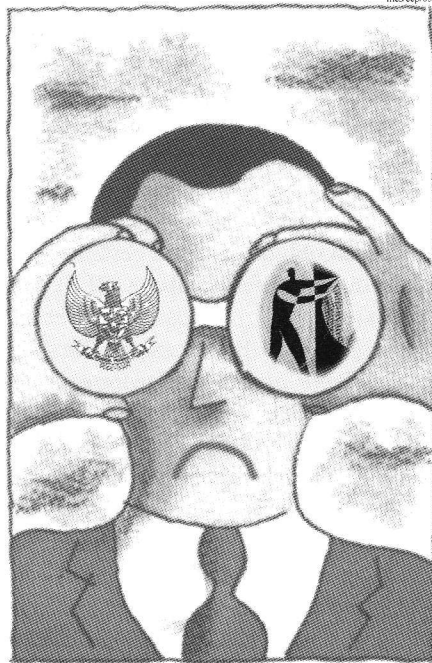
Ternyata, Pemerintah telah memundur kan jadwal pelayanan satu atap untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang akan kembali bekerja di Malaysia karena kesulitan dalam menyatukan 6 instansi terkait. Ke-6 instansi tersebut adalah Departemen Hukum dan Ham, Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Asal TKI. Pemunduran ini menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat lebih disebabkan oleh masalah tehnis; misalnya masalah gedung, anggaran (*kan* ada rekening antara yang tak tentu untuk dikemanakan uangnya oleh Departemen Keuangan-red), dan masalah sistem informasi online yang belum siap. Ternyata memang benar bahwa antara badan-badan milik pemerintah sangat kurang kerjasamanya.

Dan ini mudah-mudahan tidak menjadi isapan jempol belaka karena ini sangat Islami yaitu Jakarta sedang menuju ke predikat kota bersih dari asap rokok yang berarti juga akan menjadi kota yang sehat. Mulai tahun 2006 nanti, Jakarta akan mengeluarkan peraturan dilarang merokok di tempat umum. Apabila melanggar akan didenda sebesar Rp.50 juta atau kurungan enam bulan penjara. Mudah-mudahan Jakarta sudah siap sedia dengan segala perangkat penunjangnya agar aturan ini dapat berjalan dengan baik dan yang terpenting tidak akan terjadi cara-cara sebelumnya yang melibatkan aparat pemerintah dengan si pelanggar peraturan yaitu 'berdamai saja'.

Semakin ironis saja. Pada masa-masa sulit 100 hari pemerintahan Soesilo B. Yudhoyono dan Yusuf Kalla dalam mendayung biduk pemerintahan Indonesia, kabar buruk datang menimpa para pembantunya. Meskipun kabar buruk ini tidak begitu saja akan mendepak mereka dari posisi masing-masing setidaknya kabar buruk ini dapat menggambarkan cara kerja mereka, pemahaman mereka, dan inisiatif mereka terhadap tanggung jawab yang mereka emban. Kabar ini datang dari "Tim Indonesia Bangkit", yang melakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja mereka. Apabila evaluasi ini berdasarkan metode didik terbaru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi, maka hanya Menteri Perhubungan saja yang akan lulus dalam evaluasi ini. Bagaimana perahu Indonesia akan terus berlayar? (mzh)

Simposium Nasional Tentang Pembiayaan dan Asuransi Syariah di Bidang Agribisnis

Diadakan oleh Pusat Studi Pengembangan Agribisnis bekerja sama dengan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dilaksanakan pada tanggal 2-3 Maret 2005 bertempat pada Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah, JL.Ir.H. Juanda No.95, Ciputat, Jakarta 15412. Acara seminar berlangsung dari pukul 09.00-16.00.

Euromoney Training Asia Islamic Capital Markets & Financial Management

Euromoney Training Asia mengadakan program pelatihan khusus selama 4 hari yang menawarankan solusi praktis untuk strukturisasi produk dan harga, resiko dan manajemen modal serta akutansi dan penerapan terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Pelatihan ini diadakan pada tanggal 16-19 Mei 2005 dan akan dilaksanakan di Singapura.

Program pelatihan khusus ini ditujukan kepada para professional dari berbagai macam latar belakang, termasuk :

- Eksekutif Manajemen dan Keuangan
- Professional yang bergerak pada bidang produk, pemasaran dan penjualan.
- Professional yang bergerak di bidang akutansi dan auditor.
- Dan para eksekutif serta professional yang terlibat atau bekerja pada bidang Keuangan Islam.

Untuk mengikuti program pelatihan khusus ini dikenakan biaya US$ 3,950/ orang. Biaya itu termasuk biaya pelatihan, makan siang, snack dan bahan-bahan untuk pelatihan tersebut. Biaya ini tidak termasuk akomodasi hotel namun diberikan special rates bagi para peserta yang mengikuti pelatihan ini.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Phone/Fax : (+852) 2520 1481, (+852) 2866 7340
(+852) 2842 7042
Mail : EuroMoney Training 17/F, Printing House 6 Duddell Street Central, Hongkong
E-mail : enquiry@euromoneyasia.com

Euromoney Training Asia Islamic Capital Finance

Euromoney training asia mengadakan kursus dan pelatihan yang mengedepankan masalah dan konsep dalam Keuangan Islam seperti : Prinsip, Produk, Penerapan dan masalah-masalah strategis.

Kursus dan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 11 Maret serta tanggal 13 s/d 16 September. Kursus dan pelatihan ini dibagi menjadi dua bagian (modul), yaitu :

1. Perbankan dan Keuangan Islam (8-9 Maret 2005 dan 10-11 March 2005, Singapore)
   - Bertujuan untuk memahami dasar-dasar fundamental yang mendasari keuangan Islam modern
   - Cara mengelola Institusi Islam
   - Antisipasi terhadap masa depan keuangan Islam
2. Inovasi pada produk keuangan Islam (13-14 September 2005 dan 15-16 September 2005, Singapore)
   - Pengenalan terhadap instrumen dan produk Islami
   - Membuat dan memasarkan produk keuangan Islam baru
   - Merubah Produk konvensional menjadi Produk Islam
   - Menciptakan strategi pemasaran dan pertumbuhan

Pelatihan dan kursus ini ditujukan kepada para professional yang terlibat atau berperan dalam keuangan Islam. Pelatihan dan kursus ini dikenakan biaya sebesar :

Dua Modul (1 & 2)
8-11 Maret 2005, Hong Kong : US$ 4,200
13-16 Maret 2005, Singapura : US$ 4,200

Modul 1
8-9 Maret 2005, Hong Kong : US$ 2,500
13-14 Sept. 2005, Singapura : US$ 2,500

Modul 2
10-11 Maret 2005, Hongkong : US$ 2,500
15-16 Sept. 2005, Singapura : US$ 2,500

Untuk Informasi lebih lanjut dan registrasi dapat menghubungi :

- Telp : +0852 2520 1481
- Fax : +0852 2866 7340
- Mail : euromoney Training 17/F, Printing House 6 Duddell Street Central, HK
- E-Mail : enquiry@euromoneyasia.com

Muamalat Institute Training Core Financing for Banks and Public

14-19 February 2005 Cisarua, Bogor

Tidak diragukan lagi bahwa produk penanaman dana (pembiayaan) menjadi tulang punggung perbankan syariah dalam menciptakan atau menghasilkan keuntungan (profit), disamping dukungan fasilitas pelayanan yang prima. Kunci utama kesuksesan pada umumnya terletak pada kepiawaian account officer/account manager dalam melayani, menganalisa proposal pembiayaan yang diajukan nasabah (costomer). Untuk itu maka diperlukan account officer/account manager yang tangguh dan handal yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam pekerjaan yang menjadi tugasnya. Muamalat Institute menawarkan program pelatihan Core Financing yang ditujukan khusus buat account officer/account manager. Dari pelatihan ini peserta

diharapkan menjadi A/O yang tangguh yang dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya yang baik.

TUJUAN PROGRAM

- Memberikan pengetahuan dan informasi kepada peserta tentang pembiayaan/ penananman dana pada bank syariah
- Peserta akan mendapatkan pemahanan tentang aplikasi dan proses penyaluran penanaman dana
- Peserta akan memiliki keahlian dalam mengantisifikasi produk penanaman dana yang diduga atau diprediksi bermasalah sehingga dapat memberikan jalan keluar atau pemecahan masalah.

MODUL MATERI

- Product Knowledge
- Financing Process and Overview
- Analisa Keuangan
- Analisa Pembiayaan and Project Financing
- Analisa Yuridis
- Trade Financing
- Pricing and Repayment Schedule

STAF PENGAJAR

- Staf pengajar adalah para praktisi perbankan syariah yang memiliki spesialisasi dan pengalaman pada bidang pembiayaan syariah.

Seminar-Seminar EKABA

Berikut ini adalah seri Seminar yang dilakukan oleh EKABA Universitas Trisakti baik seri seminar Nasional maupun Internasional.

Seminar-seminar yang telah dilakukan oleh EKABA adalah :

Pembicara	Judul Seminar
Zainul Arifin, Komisaris Utama Bank Syariah Mandiri	"Bank Syariah, Tantangan dan Permasalahannya di Indonesia"

Seminar-seminar yang akan dilakukan oleh EKABA adalah :

Pembicara	Judul Seminar
Prof. DR. Roszaini Haniffa, Lecturer of Bradford University, England	"The Trend of Islamic Economics and Accounting Studies in Europe"
	March 23rd 2005 Trisakti University
Prof. DR. Roszaini Haniffa, Lecturer of Bradford University, England	"Disclosure Through Annual Report by Islamic Financial Institution"
	March 23rd 2005 Trisakti University
Prof. Omar Abdullah Zaid, PhD, ACA, President International Conference VI	"International Conference VI : Accounting, Commerce and Finance"
	March 29th – 31st 2005
Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR Republik Indonesia.	"National Seminar : Effisiensi dan Penghematan Nasional serta Pemberantasan Korupsi"
	March 8th 2005
Dr. Dadang Hawari, pakar psikologi Islam	
	April 9th 2005
Bank Permata, Bank Indonesia, MUI dan Universitas Trisakti.	"Seminar Islamic Credit Card"
	April 19th 2005
DR. Jafril Khalil, LC	"Hukum Ekonomi Islam : Cakupan dan Perbandingan dengan Hukum Positif"
	May 3rd 2005

Pusat Pengkajian Ekonomi, Keuangan, Asuransi, Perbankan & Akuntansi Syariah

Gedung K Lantai 2
Kampus A Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol
Jakarta 11440

Untuk Informasi serta Pendaftaran :

Universitas Trisakti Program Magister Akutansi
Gedung I Lantai Dasar
Telp : 021-5669178, 021-5663232 ext 347
Fax/telp : 021-5669178
Contact Person : Siti Najma dan Moh. Heykal

ACCOUNTING, COMMERCE & FINANCE:

THE ISLAMIC PERSPECTIVE

"The vehicle for exploring and implementing Shari'ah Islami'iah in accounting, commerce & finance

INTERNATIONAL CONFERENCE VI

JAKARTA - INDONESIA, 29-31 MARCH 2005

Invitation

Conference theme

Application of shari'ah Islami'iah in accounting, commerce, finance & management

Conference objectives

- To provide a forum for Muslim and Non-Muslim academics, professionals, postgraduate students, entrepreneurs and other parties interested in understanding the Islamic perspective in accounting, commerce & finance;
- To cater for the specific educational and professional needs of Muslim societies and Islamic universities in accordance with Shari'ah Islami'iah (Islamic teachings);
- To encourage academic and professional objective exploration and analysis of the Islamic perspective of related areas in accounting, commerce & finance in the interest of promoting worldwide inter human academic and professional understanding and cooperation.

Hosted by:
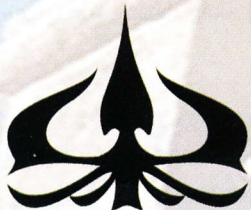
University of Trisakti

Co-sponsored :

IEF ekaba
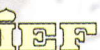
MAKSI

President of International Conference VI:

Prof. Omar Abdullah Zaid
P.O.Box 124 Lakemba NSW 2195
email: omarzaidabdullah@yahoo.com.au

Ani Murdiati
Direktur Bisnis Bank Syariah Mega Indonesia

Berbagi Hasil dengan Si Capital

PT Bank Syariah Mega Indonesia
Wisma Tugu II
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-7
Jakarta 12940
Tel.: 021-520 8428 (hunting)
Fax. : 021.529 62638
Email: idjokomono@bsmi.co.id

Sulit dihindari, hingga saat ini, masih banyak pengusaha di Indonesia (khususnya pengusaha kecil-menengah seperti pengrajin, furniture, garmen, bengkel dan lainnya) yang tidak memanfaatkan jasa perbankan bagi kebutuhan modalnya, kendati omzet usahanya telah mencapai ratusan juta rupiah. Mereka membiayai usahanya, dengan modal patungan dari keluarga, bahkan saat ingin mengikuti tender internasional sekalipun.

Apakah mereka benar-benar tidak butuh dana dari perbankan? Jika ditanya demikian, sesungguhnya bukan mereka tak mau. Sebagian menyatakan tidak terlalu percaya diri meminjam uang dari bank yang perhitungannya tidak mereka mengerti. Sebagian lagi, khsuusnya pengusaha muslim, tidak ingin modalnya mengandung unsur riba.

Para pengusaha ini sesungguhnya sangat tepat menggunakan skim pembiayaan Si Capital dari Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Fasilitas pembiayaan dengan skim Mudharabah (pembiayaan penuh) maupun Musyarakah (penyertaan dana) sungguh sangat tepat digunakan pada usaha riil semacam itu. Di samping bank syariah tidak menerapkan riba, bank syariah juga sangat mengedepankan prinsip keterbukaan yang memungkinkan mereka memahami perhitungan bagi hasil yang akan diterapkan.

Apa dan bagaimana sesungguhnya pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah ini? Skim Mudharabah, prinsipnya merupakan akad kerja sama antara bank dengan nasabah, dengan bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi berdasarakan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian, ditanggung oleh pihak bank selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu merupakan kecurangan si nasabah, ia harus bertanggung jawab pada kerugiannya.

Sedangkan skim Musyarakah meru-pakan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk bekerjasama dalam suatu proyek, dengan masing-masing pihak sama-sama memberikan kontribusi permodalan, dengan porsi yang telah disepakati. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan porsi modalnya.

Sesungguhnya, pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah ini merupakan pilar bagi perbankan syariah. Karena, secara teoritis skim ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain, mampu mengatasi problem *asymmetric information* yang selama ini banyak dialami oleh pasar keuangan konvensional. Selain itu, melalui model pembiayaan ini, kejujuran dan keadilan ekonomi dapat lebih dikembangkan.

Khusus mengenai Si Capital, di mana saja letak keunggulannya? Pembiayaan ini sangat ideal bagi pengusaha dari kalangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) karena prosesnya mudah, cepat dan murah. Lebih elok lagi pengembalian fasilitas ini disesuaikan dengan kemampuan dan *cash flow* dari si pengusaha.Plafon pembiayaan bergerak pada angka Rp 100 juta hingga Rp 2 miliar. "Sedangkan masa pembiayaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan," begitu penjelasan Ani Murdiati, Direktur Bisnis BSMI.

Pengusaha yang layak memperoleh pembiayaan Si Capital tentulah mereka yang memiliki reputasi baik untuk melakukan sesatu kegiatan produktif tertentu. "Ukurannya, paling tidak ia telah beroperasi secara terus-menerus minimal selama dua tahun, dan tentu saja dengan kinerja yang baik," kata Ani. Kinerja yang baik ini tentu saja menurut rasio-rasio tertentu yang sudah disepakati dalam dunia keuangan syariah. Si pengusaha juga bukanlah seseorang yang masuk daftar hitam pengusaha, baik di BI maupun di BSMI. Agar bisa diketahui kinerjanya selama dua tahun terakhir, si pengusaha wajib menyerahkan Neraca dua tahun terakhir dan Laporan Rugi Laba dalam dua tahun terakhir pula.

Tentu saja sebagaimana layaknya pengusaha yang meminta pembiayaan, ia harus membuat *business plan* seputar proyek yang hendak dijalankannya itu. Dalam business plan hendaknya tergambar dengan jelas apa yang hendak dilakukannya, bagaimana prospeknya dan bagaimana pula perkiraan *cash flow* yang bakal diperolehnya. InsyaAllah, jika usahanya memang prospektif, Si Capital akan datang menghampiri Anda.**

Investasi Reksadana Untuk Naik Haji

Banyak jalan menuju Mekkah. Di antara jalan itu, adalah dengan cara berinvestasi di reksadana Haji Syariah atau I-Hajj Fund. PT. Insight Invesment Management, sebuah perusahaan manajemen investasi yang dikelola oleh tim profesional berpengalaman di bidang Fixed Income dan Invesment, yang memiliki komitmen kuat terhadap dunia sosial, telah meluncurkan Reksadana syariah inovasi baru ini pada pertengahan bulan Januari lalu.

Produk ini memiliki konsep yang berbeda dengan reksadna pada umumnya karena menawarkan untuk berinvestasi sekaligus menyempurnakan diri dalam beribadah. I-Hajj Syariah Fund dirancang sebagai suatu reksadana yang bertujuan memberi kesempatan kepada investor dalam membantu masyarakat menengah bawah menunaikan ibadah haji melalui penyisihan yang berupa infaq haji. "Kita ambil 1 persen dari nilai aktiva bersih (NAB) untuk memberangkatkan haji", kata Siti Arimbi Pulungan, Direktur Insight Investment Management.

Dengan penyertaan investasi minimal 500.000, semua investor memiliki peluang yang sama. "Katakanlah unit penyertaan reksadana haji tahun ini mencapai Rp 200 miliar, berarti ada Rp 2 miliar, berarti ada Rp 2 miliar untuk pendanaan haji," tambah Siti. Dengan asumsi paket ONH senilai Rp 30 juta berarti ada 30 orang investor bakal diberangkatkan pada tahap pertama. Penentuan siapa yang akan berangkat diputuskan oleh tim independen. Reksadana Haji ini memberikan pengembalian investasi sekitar 10-11 persen per tahun, atau lebih tinggi 2 – 3 persen dari deposito mudharabah.
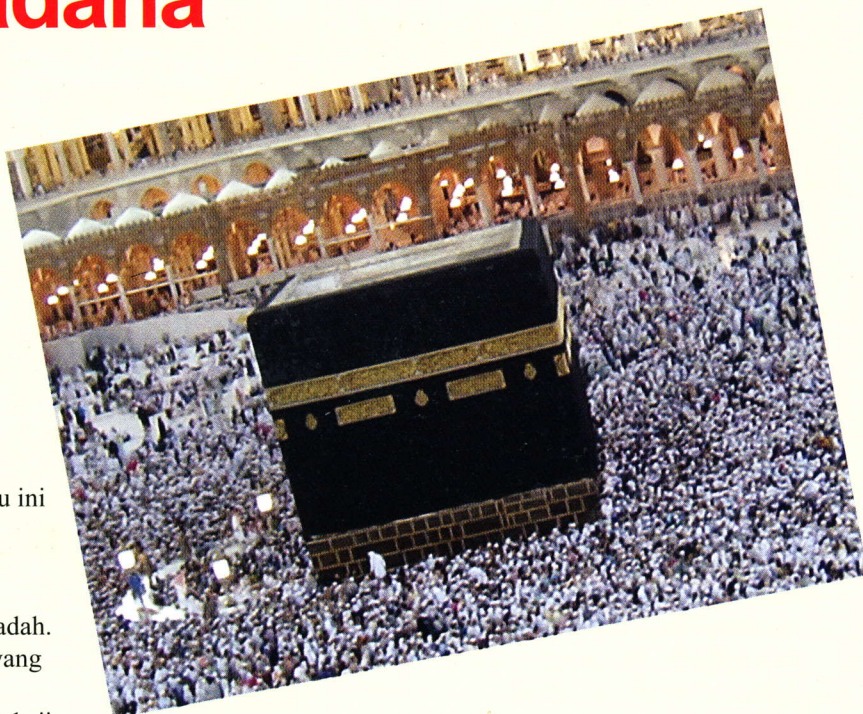
Dial-a- Prayer

Short Massage Service atau yang lebih akrab di telinga dengan sebutan SMS kini telah menjadi alat komunikasi terfavorit yang dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek religius. Di Inggris, dengan menggunakan fasiitas British- based Islamic Alert Service, mengirim lebih dari 70.000 ribu SMS perbulan untuk dikirimkan pada masyarakat Muslim yang hidup di negeri Pangeran Charles ini. Adapun isi dari SMS ini adalah pengingat waktu untuk shalat dan kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an. "Kami juga mengirimkan pengingat hari-hari besar Islam seperti awal dan akhir Ramadhan dan juga hari raya haji", kata Saadi Hussain, Marketing MS Wireless.

Biaya SMS ini cukup mahal dibandingkan dengan standar SMS di Inggris yang hanya 5 sen per SMS. Islamic Prayer Alert Service mengenakan biaya kepada pelanggan sebesar 25 sen per SMS, atau kira 912.5 poundsterling per tahun. Namun, para pelanggan tidak merasa keberatan dengan tarif ini, karena 65 persen pendapatan akan dicatat sebagai dana amal. "Ini adalah cara mudah untuk memenuhi kewajiban umat Islam memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan", tambah Saadi.

Lembaga amal kristen juga mencoba memperoleh dana melalui harga premium layanan SMS umat. Kampanye yang didukung oleh kelompok Kristen Inggris ini menawarkan SMS Bible dengan biaya 15 sen per SMS.

Aceh

BSM Buka 5 Cabang di Aceh

BSM memberi kemudahan bagi nasabah yang kehilangan buku tabungan dan identitas diri

Gempa dan tsunami telah meluluhlantakkan Aceh, sehingga roda perekonomiannya hampir tidak berjalan. Untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Bank Syariah Mandiri (BSM) berencana memperluas jaringan kantornya di provinsi tersebut. Dalam waktu dekat ini, 5 cabang akan dibuka, masing-masing berlokasi di Meulaboh, Lhokseumawe, Langsa, Singkil, dan Calang.

BSM menyadari betul pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat Aceh membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dengan hadirnya BSM yang memiliki layanan online, masyarakat bisa menikmati layanan perbankan syariah yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

BSM memberi kemudahan bagi nasabah yang kehilangan buku tabungan dan identitas diri, di mana pencairan dana tetap dapat dibantu dengan penelusuran identitas dan data yang telah tersimpan sebelumnya. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin membuka tabungan, syarat membuka rekening disederhanakan. Masyarat Aceh dapat menerima bantuan dari sanak saudaranya di luar Banda Aceh secara online, sehingga tidak khawatir dana bantuannya tidak sampai.

Ketika terjadi musibah tsunami pada tanggal 26 Desember silam, dua kantor BSM di propinsi tersebut tidak mengalami kerusakan yang berarti. Bahkan, kantor BSM di Semeleu, pulau terdekat dengan episentrum gempa, masih tegak berdiri. Mesin ATM dan komputer AS 400 yang digunakan untuk jaringan online masih berfungsi dengan baik. Hal ini terdeteksi dari adanya transaksi real time online beberapa nasabah pada hari kedua gempa.

New York

Index Dow Jones Berkembang

Perkembangan pasar modal syariah internasional sangat menggembirakan, ditandai dengan terus berkembangnya Indeks pasar modal Islami Dow Jones. Dow Jones Islamic Market Index (SM) adalah produk layanan dari Dow Jones and Company Inc. Indek ini mewakili stok perdagangan dari 34 negara dan meliputi 10 sektor ekonomi, yang terdiri dari 19 sektor pasar, 40 kelompok industri dan 70 anak perusahaan.

Saat ini indeks kelompok Dow Jones Islamic Market meliputi DJ Islamic Market Index SM, DJ Islamic Market US Index SM, DJ Islamic Market Technology Index SM, DJ Islamic Market Extra Liquid Index SM, DJ Islamic Market Canadian Index SM, DJ Islamic Market UK Index SM, DJ Islamic Market Europe Index SM, dan DJ Islamic Market Asia/Pacifix Index SM. Dow Jones Islamic Index juga sedang berupaya membuat index harga saham Islami di bursa saham Turki.

Sekuritasi index tersebut terus dipantau oleh Shariah Supervisory Board of Dow Jones SM yang mempekerjakan para ahli dari seluruh dunia da para investor yang menginginkan investasi dengan sistem Islami.

Jakarta

Danamon Syariah Melirik Pasar Mikro

Bank Danamon Syariah akan membuka cabang pembantu syariah di Tanah Abang, Bekasi, dan Cikampek

Usaha Mikro dan Menengah (UKM) telah memainkan perannya menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terbukti pada masa krisis, UKM-lah yang mampu bertahan melawan 'badai'. Salah satu unit bank syariah, yaitu Bank Danamon mulai tertarik memasuki pasar mikro ini. Kepala Unit Usaha Syariah Bank Danamon, Heriyakto S. Hartomo menyatakan bahwa pasar mikro dianggap paling potensial karena operating cycle yang cukup tinggi.

Saat ini Danamon sedang mengembangkan unit bisnis baru bernama Danamon Simpan Pinjam yang melayani pembiayaan mikro hingga dibawah Rp 5 juta. Model ini akan dikembangkan untuk Danamon Syariah. Bahkan Danamon Syariah melayani pembiayaan Rp 1 juta.

Bank Danamon Syariah akan membuka cabang pembantu syariah di Tanah Abang, Bekasi, dan Cikampek. Danamon syariah di Cikampek akan dikhususkan pada layanan gadai syariah. Hal ini terkait dengan karakter bisnis dan masyarakat di wilayah setempat. Danamon Syariah di Tanah Abang membidik pedagang grosir di Tanah Abang. Sedangkan di Bekasi dibuatkan lebih beragam. Konsumen bisa mengajukan pembiayaan modal kerja dan lainnya dengan tetap berskala UKM.

Kantor yang paling bagus perkembangannya akan dikaji lebih jauh untuk ditetapkan sebagai *role model* pengembangan Danamon syariah ke depan. Menurut rencana, Danamon Syariah akan membuka 20 cabang pembantu syariah tahun ini.

Jakarta

Enam Rumusan Fatwa Baru Dewan Syariah Nasional MUI

Banyaknya fatwa DSN MUI yang keluar seiring dengan berkembang pesatnya perbankan syariah di Indonesia. Enam fatwa baru tengah di kaji oleh DSN MUI yang berhubungan dengan praktek perbankan syariah di Indonesia. Keenam fatwa tersebut antara lain menyangkut line facility, potongan utang pembiayaan murabahah, rescheduling pembiayaan murabahah, reconditioning pembiayaan murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu bayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah.

Fatwa pertama tentang line facility adalah alokasi plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan yang mengikat secara moral. Penyediaan plafon dilakukan berdasarkan janji antara bank dan nasabah yang kemudian diwujudkan dalam MoU. Akad pembiayaan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, bisa murabahah dan juga murabahah. Selanjutnya fatwa kedua adalah potongan utang bagi pembiayaan murabahah, pemberian diskon kepada nasabah baik yang melunasi cicilan tepat waktu dan nasabah yang berkurang kemampuannya karena satu sebab. Fatwa ketiga adalah rescheduling utang pembiayaan murabahah yang bermasalah berupa opsi rescheduling penjadwalan kembali pembiayaan. Bentuknya bisa beberapa macam seperti memperpanjang waktu pembiayaan atau lainnya. Keempat, reconditioning yaitu pembuatan akad baru bagi nasabah yang tidak bisa melunasi utang sesuai waktu yang disepakati. Fatwa kelima adalah prosedur penyelesaian (settlement) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan sesuai waktu yang disepakati. Fatwa keenam merumuskan tentang pencadangan dalam pembiayaan bagi hasil.

Menurut Irfan Helmi, Humas dan Sekretariat DSN, pembahasan enam fatwa tersebut diharapkan selesai pada Februari ini. Fatwa tersebut akan menjadi dasar hukum praktek perbankan syariah di Indonesia.(bud)

Jakarta

MoU Universitas Trisakti Dengan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)

Universitas Trisakti sebagai salah satu lembaga pendidikan yang konsern terhadap perkembangan ekonomi syariah, menindaklanjutinya dengan penandatanganan kerjasama dengan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada awal Februari lalu dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, professionalisme dan pengembangan intelektual di bidang perbankan syariah. Perjanjian kerjasama yang ditandangani oleh Rektor USAKTI Prof. Dr. Thoby Mutis dan Direktur Utama serta Direktur BSMI Budi Wisakseno dan Ani Murdiati ini akan berlang-sung selama 3 tahun.

Adapun lingkup kegiatan dan usaha kerjasama ini berupa promosi, sosialisasi, penelitian bersama di lingkungan Universitas Trisakti, pemasaran produk-produk perbankan syariah, pertukaran tenaga ahli, penyediaan dan pertukaran bahan kepustakaan, pengembangan kewirausahaan dan usaha koperasi berdasarkan syariah, pengembangan produk-produk syariah baru dan indeks margin produk-produk syariah dan penyaluran lulusan fakultas ekonomi sebagai tenaga fresh graduate di BSMI melalui proses seleksi.

Dalam hal pengembangan kewirausahaan dan usaha koperasi, kedua belah pihak sepakat mengembangkan kewirausahaan baik melalui pelatihan, penelitian maupun praktek magang. Selain itu akan disinkronkan dengan pembinaan UKM dan koperasi di lingkungan Universitas Trisakti dengan memanfaatkan jasa layanan BSMI. "Penanaman jagung dan kelapa sawit di area tanah milik Trisakti dengan skema pembiayaan musyarakah dari BSMI adalah suatu terobosan yang harus dipertimbangkan" papar Thoby Mutis. (hkl)

Seminar Penelitian

Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi

Ahmad Baraba : "Yang salah justru konsep murabahah (jual-beli)yang bohong-bohongan, yang kadang kala dipraktikkan di lembaga keuangan syariah"

Sebuah seminar tidak perlu diselenggarakan dalam tempat yang nyaman dan luas serta dihadiri oleh banyak peserta. Jumlah peserta yang selektif, tempat yang nyaman dan luasnya tidak seberapa justru akan sangat menunjang hidupnya suasana seminar tersebut. Itulah yang mewarnai suasana seminar penelitian tentang dominannya pembiayaan non bagi hasil di perbankan syariah di Indonesia di gedung Bank Indonesia, pada 25 November lalu dimana ES hadir di dalamnya. Seminar ini sendiri merupakan ajang eksplorasi hasil penelitian yang bertema " Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi " yang dikerjakan oleh para peneliti senior dari Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, yaitu Ascarya, Diana Yumanita, dan Ahmad Arief. Seminar menghadirkan pembicara yaitu Ascarya serta para pembahas yaitu Budi Wisakseno, Dirut Bank Mega Syariah Indonesia serta Prof. Dr. Sofyan S. Harahap, Komisaris Bank Syariah Mandiri sekaligus anggota Komite Ahli Perbankan Syariah Nasional.

Dalam makalahnya, Ascarya mengungkapkan bahwa dominannya pembiayaan non bagi hasil di perbankan syariah bukan hanya masalah yang dihadapi di Indonesia saja, akan tetapi sudah menjadi masalah yang mendunia, terutama terjadi pada negara-negara yang menerapkan konsep " dual banking system " dalam sistem perbankannya. Bila pembiayaan non bagi hasil mendominasi dunia perbankan syariah pada saat-saat awal perkembangannya sebagian masih memandangnya secara wajar, mengingat adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pembiayaan bagi hasil. Akan tetapi, bila hal ini berlangsung terus menerus dan terdapat kecenderungan untuk mendominasi, maka hal ini sebenarnya merupakan " lampu kuning " bagi dunia perbankan syariah, karena akan banyak sekali nasabah yang mempertanyakan apa perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional bila dominasi terjadi pada pembiayaan non bagi hasil.

Ascarya tidak lupa memberikan contoh 3 negara yang juga mengembangkan perbankan syariah, yaitu Sudan, Malaysia, dan Indonesia. Sudan sebagai contoh pertama. Dikatakan olehnya bahwa di negara tersebut yang mendominasi pembiayaan dari perbankan syariah adalah pembiayaan *musyarakah.* Hal ini terkait dengan budaya yang ada pada masyarakat Sudan yang lebih senang melakukan kegiatan pembiayaan dibandingkan dengan melakukan penyimpanan dana. Dengan adanya *musyarakah* diharapkan agar nasabah berpartisipasi juga dalam hal keuangan, dimana diharapkan akan tercipta dorongan untuk menabung pada masyarakat Sudan. Sedang pembiayaan mudharabah justru hampir tidak diminati oleh masyarakat Sudan, karena dinilai sangat beresiko disebabkan dana 100 % berasal dari bank. Apalagi dalam pembiayaan mudharabah tidak ada partsipasi dari pihak nasabah yang akan menyebabkan risiko yang semakin tinggi.

Meskipun begitu, dengan banyaknya keikutsertaaan masyarakat Sudan dalam pembiayaan musyarakah, maka terdapat keseimbangan yang relatif cukup baik dalam pembandingan antara pembiayaan non bagi hasil dengan pembiayaan bagi hasil. Bahkan, tingkat pembiayaan yang bermasalah (Non Performing Financing) hanya sekitar 2,8%. Selain itu penempatan Dewan Syariah

Nasional yang berada dalam struktur Bank Of Sudan selaku bank sentral juga turut membantu pengaturan perbankan syariah yang ada di negara tersebut.

Bagaimana dengan kondisi perbankan syariah yang ada di negeri jiran kita, Malaysia ? Malaysia, sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim merupakan sebuah negara yang mempelopori untuk pertama kalinya pendirian bank berbasis Islam di negara tersebut. Diawali dengan The Bumiputera Economic Congress yang mendesak pihak pemerintah untuk melakukan pendirian bank Islam di negara tersebut. Setelah dilakukan serangkaian kajian dan rekomendasi terhadap pihak pemerintah, maka pada bulan Juli tahun 1983 berdirilah " Bank Islam Malaysia Berhad" dan pada tahun 1999 juga berdiri " Bank Muamalat Malaysia Berhad".

Seperti di Indonesia, perbankan syariah yang ada di Malaysia juga didominasi oleh pembiayaan *murabahah* (jual beli). Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral di negara tersebut lebih cenderung untuk mengikuti keinginan pasar. Hal ini berbeda dengan Sudan di mana bank sentral Sudan lebih berperan dalam rangka mengarahkan kebijakan yang ada di pasar. Ascarya menyebutkan bahkan hingga sekarang, dari pihak bank sentral Malaysia belum terlihat kebijakan yang mendorong untuk meningkatkan skim pembiayaan dengan bagi hasil. Padahal, dalam struktur bank sentral Malaysia para anggota Dewan Syariah Nasional negara tersebut juga menjadi anggota bank sentral negeri Jiran tersebut. Tidak heran bila banyak muncul anggapan bahwa Malaysia masih banyak menerapkan prinsip *" trial and error "* dalam pengembangan perbankan syariah di negara tersebut, serta terhitung " berani " dalam melakukan inovasi di dalam dunia perbankan syariah.

Indonesia menjadi negara ketiga yang dicantumkan dalam hasil penelitian yang dipaparkan oleh Ascarya dan timnya. Berbeda dengan dua negara tersebut, Dewan Syariah Nasional memiliki peranan yang independen serta tidak berada dalam struktur Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pihak DSN dalam kegiatan transaksi perbankan syariah tidak bisa langsung mengikat, akan tetapi harus melalui proses legalisasi terlebih dahulu oleh pihak Bank Indonesia. Meskipun begitu, dengan posisinya yang independen dan berada di luar bank sentral, maka DSN bisa lebih dengan leluasa untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan transaksi di berbagai lembaga keuangan syariah, dan tidak hanya lembaga perbankan syariah saja.

Hal ini menjadi bahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian dan hal inilah yang dikaji oleh para peneliti muda ini. Pertama-tama Ascarya mengemukakan tentang berbagai persepsi responden terhadap pembiayaan bagi hasil, seperti dari sisi internal bank syariah itu sendiri, nasabah, dari segi regulasi, dan pemerintah serta kelembagaan Berbagai persepsi responden ini digalinya melalui beberapa cara, antara lain dengan Focus Group Discussion dan indepth interview. Dari kedua langkah yang ditempuh tersebut dapat diketahui bahwa dari sisi internal perbankan syariah masih terdapat masalah seperti pemahaman akan esensi perbankan syariah yang masih kurang, adanya orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, kualitas serta kuantitas SDI yang belum memadai, sikap *aversion to effort* serta *aversion to risk.* Ascarya menyebutkan bahwa yang paling penting adalah berusaha untuk mengubah pola pikir yang ada di kalangan perbankan syariah, terutama yang ada di level direksi dari pola pikir konvensional menuju ke pola pikir syariah.

Selain langkah tersebut di atas, secara umum dalam rangka untuk meningkatkan persentase pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah, Ascarya juga menawarkan beberapa solusi yang dapat dipergunakan, antara lain dengan meningkatkan pemahaman di kalangan pegawai akan konsep perbankan syariah, sosialisasi secara terus menerus kepada para nasabah tentang apa itu bank syariah serta berbagai produk yang ditawarkannya. Selain itu pihak manajemen pusat juga sebaiknya memberikan dukungan dalam rangka usaha untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang tercermin dari jumlah pembiayaan yang dianggarkan dalam anggaran kerja tahunan perusahaan. Bahkan bila perlu diberlakukan sistem *reward and punishment* oleh Bank Indonesia selaku regulator dalam rangka untuk meningkatkan pembiayaan dengan bagi hasil.

Dalam seminar tersebut, pada dasarnya penelitian ini mendapatkan pujian dari para peserta dan juga para pembahas. Meskipun begitu, para pembahas tetap mengingatkan bahwa dominannya pembiayaan non bagi hasil di perbankan syariah bukan merupakan suatu kesalahan, karena pembiayaan dengan konsep jual-beli juga dihalalkan. Mengutip pendapat Ahmad Baraba, pakar perbankan syariah yang kini aktif di kantor konsultan Ernst & Young, "Yang salah justru konsep murabahah (jual-beli)yang bohong-bohongan, yang kadang kala dipraktikkan di lembaga keuangan syariah" ujarnya dalam kesempatan tersebut. "Apalagi pembiayaan non bagi hasil biasanya diperlukan untuk memacu perkembangan bank syariah tersebut, terutama yang masih baru" tambah Budi Wisakseno, salah seorang pembahas yang juga Direktur Utama Bank Mega Syariah Indonesia.

Karakter pembiayaan bagi hasil memang memerlukan tingkat kejujuran yang sangat tinggi dari pihak yang mendapatkan pembiayaan. Inilah yang membuat bank syariah masih belum berani berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil. Mengutip Prof Sofyan S Harahap, pakar perbankan dan akuntansi syariah dari Universitas Trisakti Jakarta, dikatakan bahwa karakter tersebut sangat mirip dengan kondisi umat pada zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi, bagaimanapun juga, usaha untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil tetap diperlukan, karena konsep tersebut pada dasarnya merupakan inti dari perbankan syariah (hkl)

Ceramah Umum Prof. Joseph P. Stiglitz

Stiglitz : "Di dunia ini sistem keuangan global hampir semuanya berada di bawah pengaruh Dana Moneter Internasional (IMF)"

Pada akhir tahun 2004 yang lalu, ES berkesempatan untuk menyaksikan sebuah acara yang langka dari segi acara, akan tetapi sangat bermutu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi, yaitu ceramah umum yang disampaikan oleh pemenang nobel Ekonomi tahun 2001, yaitu Prof Joseph P Stiglititz. Pakar ekonomi kelas dunia yang juga mantan Wakil Presiden Bank Dunia ini merupakan sedikit dari seorang tokoh ekonomi dunia yang pandangannya berbeda dibandingkan pandangan rekan-rekannya sesama ekonom dari negara-negara Barat. Hal ini terjadi karena Stiglitz dikenal sebagai salah seorang pengecam kapitalisme paling keras serta orang yang radikal dalam kritiknya terhadap berbagai lembaga keuangan dunia. Pandangan-pandangan Stiglitz inilah yang membuat ISEI bekerja sama dengan Bank Indonesia berusaha (dan berhasil) untuk menghadirkan Stiglitz di Indonesia.

Stiglitz, pria kelahiran Indiana, AS, pada 61 tahun yang lalu itu membawakan makalah yang bertema" Isu-Isu Ekonomi Terkini dan Dampaknya pada Negara Berkembang ". Dalam ceramahnya di hadapan para pakar ekonomi tanah air ini mantan penasehat ekonomi pemerintah AS di masa Presiden Clinton ini mengungkapkan agar pemerintah Indonesia memfokuskan kebijakan ekonominya pada apa yang menjadi landasan utama mayoritas penduduk. Dikatakan oleh beliau bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia berani mengajukan konsep yang membela mayoritas rakyat dalam perundingan dengan berbagai lembaga kreditur internasional dan menyatakan " ini tawaran yang kami ajukan, jika (anda)mengajukan suatu rancangan kebijakan apapun yang akan merugikan rakyat kami, maka negara tidak akan pernah menmberlakukan kebijakan tersebut. ini tawaran yang kami ajukan , jika (anda) mengajukan suatu rancangan kebijakan apapun yang akan merugikan rakyat kami, maka negara tidak akan pernah memberlakukan kebijakan tersebut", demikian ungkap Stiglitz dalam seminar tersebut.

Memang sebagai sebuah negara yang agraris dan kaya akan sumber daya alam serta sumber daya manusia, sungguh ironis bahwa negara ini terjerat hutang. Oleh karena itu, menurut Stiglitz pemerintah harus bisa memberikan penjelasan kepada rakyatnya ketika memutuskan untuk berhutang kepada berbagai lembaga kreditur. " mereka harus bisa menjelaskan kepada rakyat bahwa eksploitasi sumber daya alam ini dalam rangka pemulusan pengucuran dana pinjaman", demikian penulis buku Globalization and Its Discontent ini melanjutkan.

Stiglitz mengingatkan bahwa di dunia ini sistem keuangan global hampir semuanya berada di bawah pengaruh Dana Moneter Internasional (IMF).Lembaga ini dikenal sangat berpengaruh dalam penentuan setiap kerja sama atau kontrak baru dalam rangka untuk memperoleh hutang. Sebagai salah satu anggota IMF, Indonesia harus tunduk terhadap aturan dan syarat-syarat yang mereka tetapkan, sementara syarat-syarat tersebut sama sekali tidak menguntungkan bagi mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai sebuah negara agraris, sudah seyogyanya sektor agraria mendapatkan perhatian dan stimulus yang lebih dari pemerintah.

Atas dasar inilah Stiglitz berpendapat agar Indonesia tidak terlalu terburu-buru untuk terjun ke dalam liberalisasi perdagangan, mengingat sektor agraris akan terkena dampak buruk dari liberalisasi perdagangan. Menurutnya, liberalisasi dalam bidang perdagangan dan aset negara yang terwujud dalam privatisasi akan sangat merugikan sektor agraria karena sektor ini merupakan sektor riil yang tidak memiliki perwakilkan yang layak dalam sebuah lembaga kelas dunia. "kalau privatisasi lebih parah lagi. Bila kebijakan ini diambil oleh pemerintah secara terlalu cepat hanya akan mengakibatkan kerugian besar dalam sekelompok besr masyarakat yang ada di negara berkembang, dan yang diuntungkan hanya sebagian kecil dari masyarakat, diantaranya adalah\ para konglomerat hitam dan koruptor kelas ikan paus " demikian ayah dari 1 anak ini melanjutkan.

Stiglitz mengakui bahwa selama ini ia sudah cukup khawatir melihat perkembangan situasi ekonomi yang ada di Indonesia. Program privatisasi yang dijalankan di Indonesia telah berlangsung dengan salah kaprah, dimana " para pialang memiliki kekuasaan untuk menjuali aset-aset negara dengan dalih program privatisasi, sementara harga yang ditetapkan dalam program tersebut adalah harga yang menguntungkan bagi para pialangnya".

Pada akhir ceramahnya, Stiglitz menyimpulkan serta mengharapkan agar berrbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada sektor mayoritas sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika yang ada di pasar. " Mayoritas masyarakat Indonesia berada dapa sektor agraris, oleh karena itu pengembangan perekonomian yang berfokus pada kondisi mayoritas penduduk sudah seharusnya menjadi tugas yang relevan dan penting (hkl)

Kaum Melayu Singapura Harus Belajar Bahasa Mandarin

Dr. Lily Zubaidah Rahim : "Tidak seorangpun yang mengetahui berapa sebenarnya kuota yang disediakan untuk pelajar Melayu serta India di Universitas-universitas di Singapura dan perkara ini tidak pernah diperjelas karena di anggap sensitif"

Baru-baru ini Dr. Lily Zubaidah Rahim, penulis buku *The Singapore Dilemma: The Political Educational Marginality of the Malay Community (Dilemma Singapura: Peminggiran Politik dan Pendidikan Melayu)*, dan anak dari serang mantan Menteri Negara di negara tersebut, almarhum Abdul Rahim Ishak, menyatakan bahwa masyarakat Melayu Singapura, sulit untuk maju dan mendapatkan pekerjaan yang layak karena tidak bisa berbahasa Mandarin, Ini katanya, mendorong sebahagian orang Melayu untuk mempelajari bahasa itu.

Tambahnya, hanya mereka yang mampu bertutur dalam bahasa Mandarin, selain tentunya berbahasa Inggeris, yang akan diberikan prioritas untuk memegang jabatan-jabatan tinggi di Singapura. Keadaan tersebut menyebabkan orang Melayu Singapura saling berebut untuk mempelajari bahasa Mandarin, sekaligus meminggirkan bahasa Ibunda mereka sendiri walaupun bahasa Melayu juga adalah salah satu bahasa kebangsaan di negara singa tersebut.

www.sinaporeroar.com

Keadaan ini disampaikan oleh Dr.Lily berdasarkan atas kajiannya terhadap masyarakat Melayu Singapura dan ini disampaikannya dalam sebuah seminar ilmiah (Dunia Melayu dan Islam, di Institut Alam dan Tamadun Melayu (Atma) di Universitas Kebangsaan Malaysia) tanggal 25 Juni 2004 yang lalu.

Menurut Lily, sekiranya orang Melayu tidak mempunyai kemampuan bertutur dalam bahasa Mandarin, mereka akan berhadapan dengan masalah kesempatan kerja. Pada masa ini juga, kita dapat melihat bahwa tidak ramai orang Melayu yang bekerja sebagai dokter ataupun golongan professional lainnya, namun hal ini tidak langsung menjadi perbincangan di Singapura. Begitu juga dalam bidang pendidikan, ada pelajar Melayu dan India yang mendapat semua nilai A dalam ujian tetapi tidak berhasil menjadi dokter karena kuota etnik untuk bidang itu telah mencukupi.

Lily selanjutnya menyatakan, tidak seorangpun yang mengetahui berapa sebenarnya kuota yang disediakan untuk pelajar Melayu serta India di Universitas-universitas di Singapura dan perkara ini tidak pernah diperjelas karena di anggap sensitif.

Orantua Lily Zubaidah, Almarhum Abdul Rahim Ishak, yang juga merupakan saudara dari Presiden pertama Singapura, Almarhum Yusof Ishak, pada masa itu juga berkata, masyarakat Melayu Singapura kini hidup seperti dibawah mikroskop karena mereka senantiasa diperhatikan terutama sejak peristiwa 11 September. Orang Islam di Singapura dianggap berpotensi sebagai teroris dan diberikan tanggapan negatif terutama oleh surat kabar utama Republik tersebut. Menurut beliau lagi, apa yang terjadi saat ini adalah jurang diantara kaum Melayu dan China Singapura semakin melebar dalam semua aspek termasuk aspek sosial, pendidikan, dan pelayanan umum. (mzh).

Islamic Money Against Money & Dollar

Dr. Masudul Alam Chowdury*

On January 1, 1999, Europe celebrated its momentous of a single currency for its eleven participating members that have qualified to join the European Monetary Union according to its Convergence Criteria Following this, it is likely that Britain, Sweden, Denmark and Greece that have either opted out or were not qualified according to the Convergence Criteria at this time, will join by the year 2002. By the year 2002 a single currency called Euro will become the commercial medium of market exchange in Europe for the participating countries.

By establishing a single currency for the exchange of goods and services domestically and internationally, the Euro will become a determining factor of a unified monetary policy, fiscal policy, exchanges rated, interest rates and thereby, also of productivity and technological consequences of these economic changes in the participating countries. Internationally, global capital markers and investment our sources will see the rise of two competing currency mediums, the US Dollars and the Euro. Countries around the world will be holding their foreign reserves and transacting their tradable in terms of these two currencies International currencies will thus become convertible in terms of two competing units.

At such a juncture, the Muslim mind must recount as two what position the Muslim World holds in the midst of the global division of capital markets between these two competing super currencies ? what would be the state of her own resource valuation in the global scene ? Do the Muslims have an agenda for change ? If they do have an agenda, what are the constructs of that Muslim future ?

Until the end of world war II the western Hemisphere has been engaged in the most heinous kinds of wars and civil strife within itself. Yet through the Bretton Woods Institutions established in 1944, followed by a number of economic and monetary unions between the members of the Western Hemisphere, these same warring nations could rise to a social contract that eliminated wars and political dissentions between them. It was indeed a civil accord enacted within the institutions of democracy that did the work for the Western Hemisphere.

The Muslim World with its teeming millions, vast resources, and above all with the greatest miracle, the Qur'an, along with the guidance of the Prophet Muhammad, Sunnah, the great Islamic Legacy of Shura (Consultation, discourse and interaction), Ijtihad (epistemological inquiry) and Ijma (consensus), all of which are premised on the exercise of deep Islamic knowledge, tolerance and discourse-could not realize its unity. What are then the structural issues according to which Europe could unite and the Muslims could unite and the Muslims could not ?

It will be too shallow an answer to this question to differentiate the Western World in respect to its democracy and the Muslim world as being bereft of democracy. Democracy is a political philosophy that flourishes on the principle of conflict guiding markets in the form of competition and capitalism that thrives on the power of corporations and the aqcuisitive passion for wealth. Politically, democracy thrives on the back of institutions that master power and hegemony majority rule. Any moral value of doing things and of directing

economic resources is sub-directing economic resources is sub-dummed within market consequentialism.

There is no other premise from which democracy derives its rules of conduct than the collective power of individuals let looses in a world of competing behaviour. Such is the nature of individualism that aggregates itself from the level of individuals to institutions, to governments and the global capitalist order. On such an utilitarian worldview thrives the Western meaning of democracy.

Now take away from democracy the ultimate supremacy of the individual, the powerful lobby groups and thus of goverments so formed. We will find that democracy and capitalism weaken into dysfunctional states. With this weakening comes about the collapse of the entire economic, social and political edifice of which democracy, capitalism and western institutioanalizm confiscate on others to survive.

Thus the imitation of Western democracy is as self defeating as is the present days ‘ Muslim political vacuity in the absence of a well-defined Muslim Social contract. On the other hand, the divide between Islam and the West is based on two polar worlviews that cannot cross lines for a permanent convergence. Any cross-fertilization between the two can only be in terms of mechanical methods that we can share. It can never be in terms of the core methodology of understanding and conducting life in comprehensive ways. When Muslim forgot this subtle difference for a long time now they became blind to the many trappings of Western ways of thinking while being unable to understand this inimical culture, and thereby, being unable to adapt to it. When rulers and demagogues in the Muslim World imitate the Western designs and prevail over their citizenry they try to lock nations into expensive bottlenecks of development costly technological change, unequal distribution of power, deprivation of freedom and rights to masses. Western lobying is perpetuated through this machinery of autocratic governance as also by the Muslim World's lethargy and subservience to the costly technology, de-equalizing market processes and the concomitant governance of the West genre. To live a day in such inhuman bondage is yet another moment of increased slavery of the muslim mind body and soul to western masters.

The European monetary union on which is premised thye Euro was greatly financed by Petrodollars that were held as assets b the wealthy Muslim rulers in EMU. By the same token, when the capital surplus Arab countries bought assets in the International Monetary Fund, they in turn tightened the grips of the IMF over these assets by securing Arab capital in Western capital markers instead of in the Muslim countries. Consequently, the double whamy fell on the Muslim world. On the one hand, the absence of any expectations for good financial support could not generate the investment climate in the Muslim world. On the other hand there was never enough liquidity available to support investments in the Muslim world. Finally, when global capitalism in its oppressive attire of global governance over markets and institutions entered Muslim countries as speculative short term capital. These were riddled and driven by interest rates instability and proved to be unsustainable both in terms of projects and in capital markets.

Thus the alienation of the Muslim world from its own fundamental roots of understanding, and doing things and its enslavement to the alien culture drifted the Muslim World from its solidarity which could otherwise have seen the rise of parallels like The Euro and The Dollar in terms of the Islamic money, Islamic currency Integrated Islamic capital markets and a globally Interlinked Islamic common market. Here in would be solved the present days problems of economic instability, currency run-off investment needs, political subversience, inequity and poverty, all of which plague the Muslim world today. Along with this reconstruction would arise the political stability and organization for the spread and practice of Islamic Transformation. Thus would arise the Muslim march toward the Ummah as the Islamic globalization process.

Islamic money would be based on the 100 percent reserve requirement linking monetary valuation with real sectoral activities and not with speculation or promissory notes. The productive yield arising from such a real monetary mobilization would solve the problem of low productivity among factors of production. The participatory enterprises in the midst of these transformations and real monetary linkages would remove the relevance of interest rates. Such a system would replace interest transactions with resource mobilization into participatory enterprises. Consequently, economic efficiency, distributive equity, ownership, property rights and empowerment would increase across participatory enterprises. Poverty would be eradicated and alleviated through the force of such participatory entrepreneurial activity and by the direct linkages between money and real sectorial activity.

---

* IEF Chairman, kini mengajar di UCCB/ CBU, Kanada.

Pengukuran Kinerja Bank Syari'ah

A.Wirman Syafei*

"Bank *Syari'ah* seharusnya tidak hanya melaporkan informasi mengenai kemampuan kinerja ekonomi bank Syari'ah namun juga informasi keberhasilan bank dalam memenuhi prinsip Syari'ah serta peran serta dan kepedulian bank kepada masyarakat pada umumnya"

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah alat yang digunakan dalam menilai kemajuan dan perkembangan sebuah institusi bisnis atau sosial. Islam sangat mendorong adanya pengukuran kinerja (*hisaab*) baik dalam skala individu ataupun institusi karena pengukuran kinerja merupakan bagian dari pemenuhan akuntabilitas kepada Allah SWT. Dengan demikian, bank *Syariah* sebagai bagian dari institusi bisnis *Syariah* sudah sepatutnya untuk senantiasa melakukan pengukuran atas kinerja operasionalnya. Hal yang sangat krusial untuk ditelaah adalah bagaimana membuat indikator yang akan digunakan dalam mengukur kinerja bank *Syari'ah*. Menurut hemat penulis, diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja untuk bank *Syari'ah* yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik bank *Syari'ah* dan tidak hanya menitikberatkan kepada bagaimana kemampuan bank Syari'ah dalam menghasilkan laba.

Tujuan dan Karakteristik Bank Syariah

Bank *Syari'ah* merupakan bagian dari pada institusi bisnis Islam yang harus senantiasa beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip *Syari'ah*. Syaiful Azhar Rosly (1994), mengatakan bahwa operasional dan aktifitas bank *Syari'ah* sepatutnya tidak hanya berusaha untuk meninggalkan instrument bunga (*interest*) dan tidak hanya memusatkan perhatian kepada haram-halalnya transaksi atau aktifitas yang dilakukan namun lebih jauh memperhatikan keterkaitan antara aktifitas dan transaksi yang dilakukan dengan pencapaian tujuan pendirian bank *Syari'ah* dan tujuan dari penerapan *Syari'ah* (*Maqashidu Syari'ah*).

Tujuan pendirian bank *Syari'ah* adalah dalam rangka mencapai *falaah* (kemenangan di dunia dan di akhirat) dan turut menciptakan kehidupan yang baik (*hayatut thayyibah*). Menurut El-Ashker (1987), tujuan tersebut jelas menggambarkan bahwa bank Syari'ah dilarang untuk menghasilkan laba maksimum (*profit maximization*), Tetapi, bank *Syariah* tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip *Syari'ah* dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian *ummat* (masyarakat muslim).

Lewis (2001) menjelaskan bahwa paling tidak ada empat karatekristik yang harus dipenuhi dalam operasional bank *Syari'ah*, yaitu : penghidaran penggunanaan instrumen bunga (*interest*) dalam setiap transaksi yang dilakukan; tidak terlibat dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*); pengeluaran *zakat* atas kekayaan yang dimiliki oleh bank (pemegang saham); tidak melakukan transaksi yang tidak berkorelasi positif dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan *ummat*.

Indeks Pengungkapan Syari'ah

Berdasarkan tujuan dan

"Bank **Syari'ah** merupakan bagian dari pada institusi bisnis Islam yang harus senantiasa beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip **Syari'ah**"

karakteristik yang dimiliki oleh bank *Syari'ah*, penulis mencoba untuk menawarkan Indeks pengungkapan Syari'ah (*Shari'ah Disclosure Index*) yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja bank *Syari'ah*. Dengan indeks ini, bank *Syari'ah* diharapkan untuk dapat melakukan tranparansi atas seluruh aktifitasnya sehingga akan mendorong bank *Syari'ah* untuk berusaha seoptimum mungkin memenuhi prinsip-prinsip *Syari'ah*.

Islam sangat mendorong adanya pengungkapan penuh atas aktifitas yang dilakukan oleh bank *Syari'ah*. Menurut Baydoun and Willet (2000) bank *Syari'ah* berkewajiban untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan pemenuhan *Syari'ah*, dengan tetap memperhatikan aspek perbandingan antara manfaat yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Sedikitnya ada dua bagian besar informasi yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam aktifitas yang dilakukan bank *Syari'ah*, yaitu informasi tentang Dewan Pengawas *Syari'ah* dan informasi dalam pelaporan keuangan bank *Syari'ah*.

a. Informasi tentang Dewan Pengawas Syari'ah.

Menurut Briston dan El-Ashker (1986), Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) diharapkan dapat bekerja untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip *Syari'ah* dalam seluruh aktifitas yang dilakukan oleh bank Syari'ah. Untuk dapat menjalankan perannya, anggota DPS seharusnya berasal dari tiga disiplin ilmu yang berbeda yakni *Syariah*, Hukum, dan Ekonomi (Akuntansi). Dengan peran yang sangat strategis tersebut, adalah sangat relevan jika bank Syari'ah mengungkapkan informasi secara tranparan mengenai keberadaan dan aktifitas lembaga tersebut.

Informasi yang sangat perlu diungkapkan adalah informasi mengenai penunjukan dan pengangkatan anggota DPS; informasi mengenai latar belakang anggota DPS yang terdiri dari nama, keilmuan dan pengalaman yang dimiliki; informasi berupa laporan yang dikeluarkan oleh DPS dalam menilai pemenuhan prinsip-prinsip *Syari'ah* dalam semua aktifitasnya; dan informasi mengenai aktifitas dan tindakan yang dilakukan oleh DPS dalam menjalankan tugasnya (AAOIFI, 2002).

b. Informasi dalam Pelaporan Keuangan (*Financial Report*).

Menurut Harahap (2001), pelaporan keuangan merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam mengkomunikasikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berbeda dengan bank konvensional, laporan keuangan yang disusun oleh bank *Syari'ah* seharusnya tidak hanya ditujukan untuk pihak tertentu seperti pemegang saham (*Shareholders*) melainkan juga ditujukan bagi semua masyarakat (*Stakeholders*), seperti pegawai, pemerintah, kreditur, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Bank *Syari'ah* seharusnya tidak hanya melaporkan informasi mengenai kemampuan kinerja ekonomi bank Syari'ah (dalam menghasilkan laba) namun juga informasi keberhasilan bank dalam memenuhi prinsip Syari'ah serta peran serta dan kepedulian bank kepada masyarakat pada umumnya (Shahul dan Yaya, 2003).

AAOIFI standard (2002) menyatakan informasi lainnya yang seharusnya diungkapkan oleh bank *Syari'ah* dalam pelaporan keuangannya seperti: informasi mengenai perolehan dan pendistribusian *Zakat* dan *Sadaqah*, informasi mengenai; informasi mengenai peran serta dan kontribusi bank *Syari'ah* terhadap pembangunan ekonomi masyarakat; informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip *Syari'ah* serta tindakan yang dilakukan manajemen atas pendapatan dan pengeluaran yang melanggar prinsip–prinsip *Syari'ah*; dan informasi mengenai pendapatan yang menunjukkan pembagian hak yang jelas antara bank dengan pemegang deposito dan investasi.

Penutup

Indeks pengungapan *Syari'ah* (*Shari'ah Disclosure Index*) dapat digunakan dalam mengukur pemenuhan prinsip-prinsip *Syari'ah* dalam operasional bank *Syari'ah*. Semakin banyak bank Syari'ah mengungkapkan informasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam indeks tersebut semakin baik kualitas pemenuhan prinsip-prinsip *Syari'ah* yang dilakukan oleh bank Syari'ah.

Penulis menyadari bahwa kualitas pemenuhan prinsip *Syari'ah* tidak boleh hanya didasarkan kepada kualitas informasi yang diungkapkan oleh bank *Syari'ah*. Namun upaya ini tentunya diharapkan mendorong cendikia muslim lainnya untuk mengembangkan indikator dalam menilai kinerja bank *Syari'ah* selain indikator yang hanya menitikberatkan kepada pencapain laba. *Wallahu'alam*.

- Staf Pengajar Universitas Negeri Padang
- Peneliti pada Center for Human and Economic Empowerment (CHEE), Padang

Bush dan Jurang Kaya Miskin

Sofyan S. Harahap *

"Pada tahun 2001 dan 2003 hasil studi Kongres menunjukkan bahwa potongan Pajak yang dilakukan Bush menguntungkan orang kaya"

Kemenangan George Walker Bush dan Dick Cheney melawan John Kerry dan John Edwards dalam Pemilu November 2004 di Amerika akan memberikan dampak besar pada berbagai hal baik dalam skala internasional maupun domestik Amerika baik terorisme, ekonomi, politik, kesehatan, demokrasi, hubungan internasional, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Dikalangan pers di Amerika Serikat sendiri, mayoritas media massa lebih memilih pasangan Kerry–Edwards menjadi presiden dan wakil presiden Amerika berikutnya dibandingkan dengan pasangan George Bush - Dick Cheney. Demikian juga dikalangan sebagian besar akademisi menginginkan *"asal bukan Bush"*. Dikalangan masyarakat dunia, terkecuali Filipina dan Polandia, ketika dalam masa kampanye telah memberikan simpatinya kepada John Kerry secara dominan. Demikian juga masyarakat Indonesia dan mayoritas negara Arab, Islam dan dunia ketiga jelas jelas mengkhawatirkan keme-nangan Bush dan Cheney. Hal ini dikarenakan sikap arogansinya dalam kebijakan internasional yang dinilai banyak merugikan dunia Islam, demokrasi, serta dunia ketiga. Namun harapan itu ternyata hanya tinggal harapan karena pemilih AS masih memberikan mandat kepada George W Bush untuk memimpin negeri tersebut untuk kedua kalinya. Dia mengalahkan Kerry dengan angka yang meyakinkan. Bush mendapatkan 52% berbanding 48% untuk Kerry dan memenangkan 30 dari 50 kursi, dan posisi EC (*Electoral College*) adalah Bush vs Kerry berbanding 279 dengan 252.

Sebagian besar akademisi menginginkan *"asal bukan Bush"*

Kampanye dalam angka menurut catatan *Time* dapat diketahui sebagai berikut; Bush mengunjungi 34 negara bagian selama kampanye, sedangkan John Kerry 41 negara bagian. Bahkan Ohio yang dinilai kunci negara bagian dalam memenangkan pertarungan sempat dikunjungi Kerry sebanyak 36 kali. Biaya kampanye presiden secara keseluruhan kira-kira sebanyak 13 trilyun rupiah. 630.000 jumlah kampanye TV telah diudarakan. Kelompok liberal telah berhasil mengumpulkan dana kampanye US $ 140 Juta sedangkan kelompok konservatif sebesar US$ 75 juta.
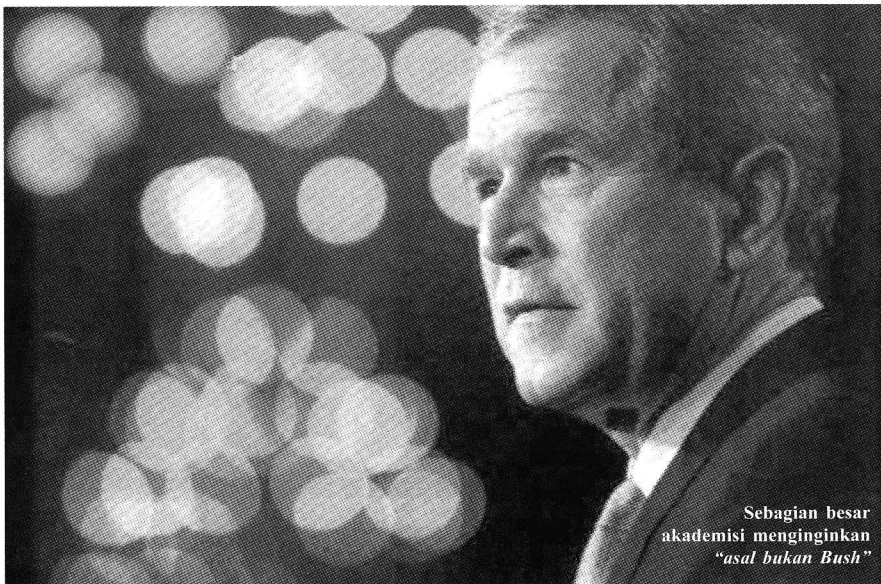
> "Mereka mendapatkan kekayaannya melalui upaya mengarahkan kebijakan Amerika untuk keuntungan mereka"

Memang tradisi di Amerika menunjukkan bahwa sangat sukar bagi calon baru untuk melawan seorang Presiden yang masih menjabat sehingga posisi John Kerry waktu itu memang relatif sulit, kendatipun ia memang sangat populer baik dimata masyarakat dunia yang menginginkan kedamaian dan keadilan maupun mereka yang menginginkan AS lebih fokus pada aspek kesejahteraan daripada keamanan. Entah kenapa, kendatipun berbagai kebohongan Bush mulai terbongkar namun dewi fortuna masih berhembus ke kubunya.

Banyak orang menilai masa kampanye presiden kali ini telah membuat AS terbagi dan menimbulkan friksi secara lebih kentara khususnya antara liberal/Demokrat dan konservatif/Republik. Di senat maupun di kongres ternyata pihak Republik berhasil mencuri kursi partai Demokrat dan mereka menguasai Kongres, House of Representatives dan Senat yang akan memudahkan Bush melaksanakan idiologi dan strateginya. Republik menguasai 231 di House of Representative sedangkan Demokrat 201. Sedangkan di Senat Republik menguasai 55 sedangkan Demokrat hanya 44. Suatu dominasi yang signifikan dalam sejarah Amerika.

Bagaimana dampak kemenangan ini terhadap masyarakat?. Menakar dampak terpilihnya Bush dari berbagai sudut dapat kita lakukan dalam tulisan ini. Pertama dari sisi ekonomi. Sudah lama diketahui bahwa selama ini Republik yang dikenal konservatif memiliki perjuangan untuk mempertahankan *status quo* dan didominasi mereka yang sudah kaya. Sehingga tidak heran jika presiden yang berasal dari Republik selalu mendukung hal hal yang bisa memberikan keuntungan bagi pemilik modal atau mereka yang kaya. *Tax cut* selalu menjadi strategi untuk mengurangi biaya hidup si kaya dan dengan pengurangan biaya ini diharapkan akumulasi modal meningkat sehingga diharapkan akan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang secara beruntun diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan akan memakmurkan masyarakat. Berbeda dengan Republik, Demokrat selalu menawarkan kesejahteraan sosial yang lebih baik dengan mendistribusikan kekayaan si kaya kepada golongan ekonomi lemah seperti pensiunan, pengangguran dan buruh.

Kevin Philips (2002) dalam bukunya "*Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich*" menyimpulkan bahwa sistem demokrasi di Amerika telah menimbulkan: "Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, Orang kaya menggunakan uangnya untuk membeli kekuasaan dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan mengumpulkan kekayaan melalui berbagai kebijakan yang mereka tempuh. Dia tambahkan: "Mereka mendapatkan kekayaannya melalui upaya mengarahkan kebijakan Amerika untuk keuntungan mereka". Mesin Tim Sukses tentu adalah uang yang diperoleh dari mereka yang memiliki duit. Tentu kita tahu siapa yang membayar biaya kampanye Bush sebesar Rp. 14 trilyun di atas.

Menurut Laura D'Andrea Tyson, selama 50 tahun terakhir distribusi pendapatan di Amerika semakin timpang. Pada dekade 1990 pertumbuhan pendapatan terkonsentrasi pada 10% keluarga yang berpendapatan tinggi. Pada tahun 2000 kelompok top 10% ini mendapatkan 44% dari keseluruhan pendapatan keluarga sedangkan pada tahun 1980 mereka ini hanya mendapatkan 33% naik 11% selama dua dekade. Keluarga terkaya 1% memiliki pendapatan lebih besar dari 40% keluarga berpendapatan terbawah. Keluarga terkaya 1% memiliki kekayaan lebih dari kekayaan 90% total keluarga dari bawah. Mereka yang 1% menerima pendapatan lebih 50% dari seluruh pendapatan nasional. Keadaan ini jauh lebih gawat jika dibandingkan era 1920an. Keadaan ini lebih parah lagi jika kita membandingkan negara maju dengan negara yang sedang berkembang.

Pada tahun 2001 dan 2003 hasil studi Kongres menunjukkan bahwa potongan Pajak yang dilakukan Bush menguntungkan orang kaya. Top 1% orang kaya beruntung 10% sedangkan penduduk berpendapatan menengah hanya 2,3%. Sedangkan keluarga 20 terbawah hanya 1,6%. Kebijakan *Tax Cut* sesuai janji Bush dalam kampanyenya akan dilanjutkan dan dipermanenkan.

Tidak heran jika berbagai kebijakan pemerintah AS serta lembaganya selalu menguntungkan segelintir orang yang memiliki kekayaan dan menguasai elite politik. Perusahaan besar dan orang kaya di negara sekuler dan kapitalis ternyata tidak memiliki perhatian menyelamatkan kemiskinan dan kepentingan sosial. Mereka hanya ingin *return* yang maksimal sesuai dengan paradigma *"rational economics"* yang merugikan sebagian besar rakyat. Perang Afghanistan misalnya dinilai bermotif bukan masalah demokrasi saja tetapi ada udang dibalik batu. Bahkan belakangan diissukan permasalahannya adalah bisnis minyak dan jalur minyak yang perlu diamankan untuk kepentingan perusahaan minyak dan kepentingan industri dan ekonomi Amerika. Demikian juga alasan perang Irak sudah merupakan rahasia umum dibalik perang terhadap terorisme yang lebih dominan adalah industri pertahanan dan persenjataan serta industri perminyakan.

Pilihan Amerika Serikat kepada pemimpinnya dan untuk hal hal tertentu sama dengan pilihan Australia kepada John Howard dari partai konservatifnya, akan terus menimbulkan meningkatnya ketidakadilan distribusi pendapatan, kekayaan, kesehatan, dan pendidikan. Dan hal ini akan mempengaruhi situasi dunia dan juga demokrasi khususnya di Amerika. Semoga pemerintah dan para pengambil kebijakan di Indonesia bisa menyadari hal ini sehingga tidak perlu terpengaruh dengan cara-cara Bush dan antek-anteknya dalam mengelola negaranya.

---

* Penulis adalah Guru Besar FE USAKTI alumni The University of Illinois at Chicago

Riba dan Bunga Bank : Tak Serupa Tapi Sama (?)

Khaeron Sirin, MA*

"Tambahan inilah yang oleh sistem perbankan konvensional disebut dengan 'bunga'"

Pada penghujung tahun 2003, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan keharaman bunga bank bagi umat Islam. Alasannya, bunga bank mengandung riba yang jelas haram dalam syariat Islam. Lahirnya sistem perbankan syariah yang tidak menerapkan sistem bunga, menghapus kebolehan umat Islam menabung di bank yang menerapkan sistem bunga.

Tak pelak, fatwa ini mendapat respon beragam dari berbagai kelompok umat Islam, baik yang mendukung atau yang menolak mentah-mentah. Tidak tahu motivasi dan kepentingan apa yang mereka usung dalam menanggapi persoalan tersebut. Yang jelas, perdebatan seputar bunga bank hingga kini terus menggelinding.

Tulisan ini berupaya menempatkan dan mengakaji persoalan ini secara lebih terbuka dan mendasar. Dengan harapan, bisa menjadi alternatif pemikiran bagi kita dalam melihat perdebatan seputar bunga bank. Sekaligus, melihat peluang sistem perbankan yang berlabelkan syariah dalam merebut hati nasabah ke depan.

Antara Riba dan Bunga Bank

Para ulama mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai konsekuensi dari waktu peminjaman. Dikatakan riba, karena tambahan tersebut disyaratkan atau diisyaratkan terlebih dahulu di awal akad (perjanjian). Ia juga bisa dikatakan sebagai tambahan yang tidak adil antara nilai barang yang diberi dengan nilai barang yang diterima. Tambahan inilah yang oleh sistem perbankan konvensional disebut dengan 'bunga'.

Pendirian Islam mengenai riba sangatlah jelas. Dalam Al-Quran, Allah telah mengharamkan riba bagi umat Islam. Hal ini, mengingat riba bukanlah sebuah keuntungan, tetapi merupakan pengambilan tanpa hak dari hasil jerih payah orang lain. Dengan kata lain, Islam menegaskan bahwa usaha mengembangkan harta adalah dengan bekerja secara halal dan menguntungkan, atau memutar modal dengan ketentuan laba dan risiko (rugi) yang ditanggung bersama. Jadi, setiap keuntungan yang didapat tidak dengan bekerja atau mengelola modal adalah haram.

Hal inilah yang oleh banyak ulama, terjadi dalam sistem perbankan konvensional. Mereka menarik bunga dari pinjaman dan piutang yang diperoleh dari perjalanan waktu. Dalam hal ini, pemilik modal hanya menunggu jatuh tempo pinjaman dari peminjam, dan kemudian menerima modalnya ditambah bunga yang sudah disepakati sebelumnya. Inilah yang ditentang keras oleh Islam, karena kita tidak boleh mengambil keuntungan dari perjalanan waktu.

Dalam sejarahnya, pengharaman riba ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa.

Bahkan, tokoh-tokoh filosof, seperti Plato, Aristoteles dan Arisophanes mengutuk praktek riba ini dan menyamakannya dengan pembunuhan. Tokoh-tokoh Kristen awal, seperti Augustinus dan Thomas Aquinas juga melaknat riba, dan menyamakan pelakunya dengan penjual arak (barang najis). Konon, hanya kaum Yahudi yang mempraktekkan riba dan menentang apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, sebagai satu cara memperoleh kekuasaan.

Dalam syariat Islam, riba adalah salah satu kejahatan yang paling berbahaya dalam masyarakat dan agama. Al-Quran sendiri melukiskan orang yang melakukan riba dengan gambaran yang menakutkan. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ia digambarkan seperti orang yang kerasukan jin, berjalan limbung seperti binatang, meracau dan mengigau layaknya orang yang tak berakal (gila). Allah Swt berfirman, "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila...". (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Karena itulah, Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan perang bagi siapa saja yang menghalalkan dan melakukan riba dalam segala transaksi ekonominya. Hal ini secara tegas dan gamblang tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Allah Swt berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu...".

Lantas, bagaimana dengan bunga bank? Hingga kini, kedudukan bunga bank dalam syariat Islam tidak lepas dari tiga alternatif hukum yang dilontarkan para ulama, khususnya di Indonesia. Yaitu, halal, haram, atau mengategorikan bunga bank sebagai sesuatu yang meragukan (subhat). Hukum haram, bermula dari persyaratan pihak bank yang menentukan keuntungan berupa suku bunga, tanpa melihat lebih dahulu untung-ruginya sebuah perusahaan atau bank yang bersangkutan. Hukum halal, mengingat bank sudah memiliki manajemen yang bagus untuk menghitung suku bunga yang diberikan kepada nasabah, dengan anggapan bahwa suku bunga itu berada di bawah level keuntungan bank yang bersangkutan. Apalagi, keberadaan lembaga bank dengan sistem bunga tidak bisa dihindari di tengah masyarakat, baik individu ataupun lembaga. Sedangkan, hukum subhat adalah karena masih meragukan pandangan kedua hukum itu. Dalam hal ini, bunga bank memang tak bisa dihindari oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan syariat Islam.

Dari sinilah, kemudian MUI menetapkan untuk memilih dan menggunakan landasan hukum pertama, yaitu mengharamkan bunga bank. Dengan pertimbangan, tidak ada perbedaan yang prinsipil antara riba dengan bunga bank. Sekiranya ada perbedaan, persamaan antara keduanya jauh lebih banyak. Sehingga, alasan untuk menyamakan bunga bank dengan riba jauh lebih kuat. Selain itu, kebolehan menerapkan sistem bunga, karena kondisi darurat atau sudah terbiasa, kini sudah hilang seiring berdirinya lembaga-lembaga perbankan yang menerap-kan sistem syariat (tanpa bunga).

Belajar dari Fatwa MUI

Sebenarnya, kita harus bisa menempatkan fatwa pada kedudukan semestinya. Yaitu, bahwa fatwa berbeda dengan hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum adalah aturan yang bersifat mengikat seluruh orang (mukalaf). Sedangkan, fatwa itu sendiri hanya mengikat bagi pihak yang meminta fatwa dan pihak yang memberikan fatwa. Dari sini, fatwa menjadi alternatif pilihan hukum seseorang, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu persoalan di tengah masyarakat.

Persoalan kemudian, bagaimana kedudukan fatwa yang dikeluarkan secara terbuka bagi umat Islam? Menurut saya, fatwa tersebut memiliki kedudukan yang lebih kuat ketimbang fatwa biasa. Bahkan, ia lebih dekat untuk disejajarkan dengan ijma ulama. Mengingat, fatwa itu sendiri dalam sejarahnya merupakan pendapat hukum seorang ulama, bukan oleh institusi atau sekumpulan ulama.

Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga (bukan perorangan), seperti MUI, jelas memiliki kekuatan yang mengikat secara moral bagi umat Islam di Indonesia. Karenanya, tidak ada alasan kuat untuk menentang ijtihad yang dihasilkan secara bersama-sama. Hal ini, terlepas apakah umat Islam di Indonesia memiliki kepercayaan dan ikatan moral yang penuh dengan institusi (MUI) ini atau tidak.

Kita akui, dalam kondisi riil seperti sekarang, fatwa tersebut memang belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Sebab, gerak roda perekonomian maupun pembangunan masyarakat masih membutuhkan jasa perbankan konvensional, terutama di daerah-daerah yang belum ada bank syariah. Namun demikian, sekali lagi, kondisi ini tidak bisa menjadi legitimasi kebolehan bunga bank, mengingat kondisi ini bisa dikatakan darurat. Sehingga, dalam kondisi di mana bank syariah sudah ada, maka kebolehan bunga bank sudah hilang dan statusnya menjadi haram.

Pada akhirnya, adanya fatwa MUI merupakan proses pembelajaran bagi umat Islam untuk lebih terbuka dalam memahami pentingnya dasar-dasar syariat dalam beribadah dan bermuamalah. Dalam hal ini, sikap kasih sayang, tolong-menolong, dan tanggung jawab bersama hendaknya menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi ekonomi kita. Hal ini penting, mengingat sistem ekonomi modern bisa menjadi momok yang mengerikan bagi kita jika tidak ditopang oleh nilai-nilai moral dan agama.

Masyarakat sendiri, tidak perlu resah dengan ketetapan fatwa MUI tersebut. Sebab, fatwa ini sekadar memberikan pertimbangan syariat (agama) tentang seluk-beluk bunga bank, yang kemudian dinyatakan sebagai hal yang terlarang. Toh, kita sendiri yang memiliki otoritas terhadap fatwa tersebut, mengikuti atau menentangnya. Jangan sampai, kita terjebak dalam 'permusuhan' gara-gara tidak memperoleh bunga dari uang yang kita simpan. Wa Allah A'lam.

---

* Dosen Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ekonomi Kerakyatan dan Peranan Perguruan Tinggi di Bangladesh

"Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh, kredit mikro atau keuangan mikro adalah salah satu masalah yang paling menonjol"

Bangladesh dengan penduduk 132 juta orang adalah negara berpenduduk terbesar nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini (dari Pakistan 1971) mempunyai pendapatan perkapita US$380 pada ahun 2002 (dari US$280 pada tahun 1998). Dengan penduduk miskin sekitar 50% dari jumlah penduduk keseluruhan, negara dengan Ibukota Dhaka ini mempunyai Sistem Pemerintahan Demokrasi Parlementer dengan 6 wilayah administratif setingkat Propinsi yaitu Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, and Sylhet. Bangladesh yang merayakan Hari Kemerdekaannya setiap tanggal 16 Desember, pernah disebut sebagi "simbol kemiskinan Asia" sehingga para pakar kemiskinan dunia akan merasa "belum pakar" jika belum datang atau mempelajari masalah kemiskinan negara ini. Juga disebut dengan *International Basketplace*, suatu istilah yang diberikan oleh Robet McNamara, ketika itu Presiden Bank Dunia, untuk menggambarkan contoh kemiskinan yang sangat parah.

Meskipun tergolong negara miskin (Laporan Pembangunan Dunia, 2000/2001 menyatakan bahwa dari segi jumlah *absolute* maka Bangladesh menempati urutan pertama, Indonesia nomor dua, Pakistan nomor tiga, Nigeria nomor empat, dan Mesir nomor lima negara Islam termiskin), Bangladesh yang dipimpin oleh seorang Presiden sebagai pemimpin negara dan Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan, berada diurutan ke-36 yang memiliki aktivitas ekonomi yang besar di dunia berdasarkan syarat-syarat GNP atas dasar keseimbangan pembelian dan berada di urutan ke-55 pada syarat-syarat nominal GNP dalam dollar Amerika.

Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh, kredit mikro atau keuangan mikro adalah salah satu masalah yang paling menonjol. Sehingga Bangladesh dianggap sebagai negara tempat kelahiran "ilmu kredit mikro" (*microcredit science*). Microcredit Science ini diaplikasikan dalam bentuk Bank Pedesaan atau dalam bahasa Bengali disebut dengan *grameen*. Bank Pedesaan atau *Grameen Bank* (GB) kini menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses program penanggulangan kemiskinan di negara tersebut. GB yang mulai beroperasi tahun 1976 yaitu 5 tahun setelah kemerdekaan Bangladesh, dirintis oleh Profesor Muhammad Yunus untuk membantu mengatasi kela-paran (*famine*) yang menelan jutaan korban di Bangladesh pada tahun 1974. GB mempunyai 4 asas hidup yaitu disiplin, bersatu, berani, dan bekerja keras. Kelompok sasaran Grameen Bank adalah penduduk miskin di suatu daerah perdesaan yang membutuhkan uluran tangan secara mendalam. Keunikan GB adalah bahwa GB diutamakan untuk membantu kehidupan dan usaha wanita miskin di pedesaan Bangladesh. Sekarang ini, model ini banyak ditiru/diaplikasikan di berbagai negara di dunia.

Dalam hal alokasi anggaran, negara yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 141.340.476 orang

(data Juli 2004), dengan mayoritas suku Bengali 98% dan sisanya non-Bengali, telah mengalokasikan anggaran belanja tertinggi untuk bidang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh percata, jika ingin mening-katkan taraf hidup bangsanya, maka dunia pendi-dikan harus ditingkatkan terlebih dahulu. Sejak tahun 1990'an pemerintah telah mencantumkan prioritas utama untuk mengem-bangkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dengan tema "Pendidikan untuk semua". Di samping sistem pendidikan umum, negara yang mayoritas berpenduduk Muslim (83%) dan selebihnya Hindu (16%) serta lain-lain (1%), terdapat pula sistem pendidikan paralel yang dikenal sebagai pendidikan Madrasah. Pendidikan ini menawarkan pendidikan Islam kepada anak-anak Muslim baik pria maupun wanita. Bagi pemeluk agama Hindu dan Budha juga mendapatkan pendidikan paralel keagamaan di institut yang bernama Tol dan Chatuspathi.

Disamping pendidikan, system transportasi dipercayai oleh Negara ini sebagai indikator yang mampu meningkatkan aktivitas perekonomian. Sehing-ga negara ini juga sangat serius dalam menangani sistem transportasinya. Jika pada tahun 1947, hanya ada 461,8 kilometer jalan-jalan yang di aspal, sekarang pada tahun 2004, keseluruhan panjang dari jalan yang di aspal lebih dari 30.000 kilometer. Mereka juga sedang membangun sejumlah jembatan seperti Banganbandhu Jamuna Bridge, Meghna Bridge, Meghna-Gumti Brigde, Bangladesh-China Friendship Bridge, dan Shambhuganj Bridge. Bahkan Bangan-bandhu Bridge yang mempunyai panjang 4,8 kilometer berada di urutan ke delapan jembatan terpanjang di dunia.

Aktivitas Ekonomi

Keseriusan Bangladesh dalam meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya juga tercermin dari aktivitas negara tersebut di organisasi-organisasi dunia. Salah satunya adalah Organisasi Developing-Eight (D-8). D-8 didirikan melalui "**Deklarasi Istanbul**", sekaligus merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-1, 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. Delapan negara yang terga-bung meliputi: Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Tujuan utama dibentuknya forum kerjasama D-8 adalah untuk meningkatkan posisi negara berkembang dalam perekonomian dunia, mem-perluas dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi negara berkem-bang dalam pengambilan keputusan di tingkat Internasional, dan meng-upayakan peningkatan taraf hidup bagi rakyatnya.

Peran yang cukup menonjol dari Bangladesh adalah pada KTT D-8 ke-2 yang diselenggarakan di Ibukota Bangladesh, Dhaka dan pada KTT D-8 ke-3 yang dilaksanakan di Cairo, Mesir. Pada kedua KTT ini Bangladesh berkal-kali mena-wakan konsep model GB yang mereka yakini dapat mem-bantu negara-negara anggota D-8 dalam menyelesaikan masalah ekonomi pedesaan mereka. Bagi Indonesia sendiri, konsep GB ini hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dapat beroperasi sampai ke wilayah pedesaan bekerja sama dengan Kantor-kantor Pos. Bangladesh juga yakin bahwa sekitar 900 juta penduduk di negara-negara D-8 atau mencapai 15 persen penduduk dunia dapat menjadi pasar yang bisa dikembangkan lagi, baik dari segi luas pasar maupun daya beli pasar. Keyakinan ini didukung lagi leh karena beberapa

anggota D-8 adalah anggota kelompok ekonomi sub-regional atau regional di kawasannya masing-masing serta memiliki atau telah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga pendanaan internasional. Misalnya, Bangladesh (sama halnya dengan Indonesia dan Malaysia) adalah juga anggota kelompok G-15, APEC, ASEM, SAARC, IOR-ARC (*Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation*) dan FEALAC (*Forum for East Asia and America Latin Cooperation*), serta semua negara D-8 adalah anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), serta memiliki hubungan dengan *Islamic Development Bank* (IDB).

Dalam KTT D-8 ke-4 di Iran, sistem ekonomi kerakyatan dalam bidang perbankan (model GB) telah banyak diaplikasikan di berbagai negara. GB juga menganjurkan alternatif lain yaitu mengorganisasikan para calon debiturnya melalui pembentukan kelompok yang berfungsi sebagai penggani jaminan (agunan). Selain berfungsi sebagai pengganti agunan, pengorganisasian para debitur GB juga dimaksudkan untuk: (1) menumbuhkan rasa aman dan rasa percaya diri dalam melakukan prakarsa baru; (2) sebagai wahana utama bagi partisipasi para anggotanya dalam kegiatan proyek; (3) sebagai sumber tekanan terhadap anggotanya agar memenuhi kewajibannya terhadap bank, dan untuk mendorong mereka agar memiliki keberanian dalam meninggalkan sikap-sikap tradisional yang tidak diperlukan, serta untuk mencegah perbuatan anti sosial; (4) melalui pembentukan kelompok, terbuka peluang bagi mereka yang lemah untuk mengubah keadaan mereka menjadi kekuatan kolektif. Sebagai kelengkapanGB juga menerapkan apa yang disebut sebagai "ikrar 16 pasal", yaitu yang ditujukan untuk meningkatkan disiplin, persatuan, kerja keras, kesejahteraan setiap anggota kelompok debitur. Ikrar terhadap 16 pasal itu wajib dilakukan setiap pertemuan kelompok yang dilakukan setiap minggu. Bahkan, terkait dengan pengembangan modal intelektual, setiap pusat juga dianjurkan mendirikan sekolah.

Bangladesh yang mempekerjakan 63% tenaga kerja di sektor pertanian, 10% di sektor industri dan 25% pada sektor jasa, juga memperkenalkan konsep Wakaf Tunai. Konsep wakaf tunai ini diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan melalui pendirian *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL telah menorehkan sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*). Menurutnya, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa. Konsep ini diyakini beliau akan berkembang. Jumlah penduduk Islam di seluruh dunia adalah kira-kira 1,700 juta orang, sementara jumlah penduduk Islam di negara-negara Islam saja mencapai 900 juta orang.Dengan jumlah itu penerimaan wakaf tunai akan sangat besar sekali.

Peran Perguruan Tinggi

Berdasarkan alokasi anggaran, tak dinyana lagi, peranan Perguruan Tinggi (PT) adalah sangat penting dalam pengembangan wawasan ekonomi, khususnya ekonomi Islam di Bangladesh. *International Islamic University Chittagong (IIUC)* adalah ujung tombaknya. IIUC didirikan oleh suatu badan yang disebut dengan *International Islamic University Chittagong Trust (IIUCT)*. Badan ini sangat dipercaya oleh pemerintah dan sudah tercatat di UU Bangladesh Nomor XXI tahun 1960. Pada tahun 1992, badan ini mulai merencanakan untuk mendirikan sebuah PT yang bervisikan dan mempunyai konsep kearah pengembangan Islam. Mereka bekerja sama dengan sekelompok intelektual Islam, pemikir-pemikir Islam, Peneliti, dan Akademisi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada 11 Februari 1995, ide ini mendapat izin dari pemerintah dan pada saat yang sama dilakukan pendirian IIUC serta memulainya dengan Fakultas Shar'iah & Islamic Studies, Faculty of Modern Sciences and Faculty of Administrative Sciences.

Saat ini IIUC adalah sebuah PT yang sangat independen dan mempunyai kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang *Shari'ah, Humanities, Social Sciences, Business Studies and Modern Sciences including Computer Science & Engineering, Environmental Sciences, Aqua-culture, Computer & Communication Engineering, Media & Information Science*, dan lain-lain. Ini meliputi program *Under Graduate* dan *Post-Graduate* termasuk program Ph.D. IIUC berada di propinsi Chittagong. Chittagong juga terkenal sebagai kota tua dan pelabuhan laut tertua Bangladesh berada di kota ini. Berbagai penelitian dan seminar yang berskala Internasional telah dilakukan oleh IIUC, dalam kapasitasnya menjalankan agenda pemerintah Bangladesh dalam perekonomian terutama perekonomian kerakyatan yang berbasiskan syari'ah Islam. Pakar-pakar Ekonomi Syariah dari negara ini sudah mulai tampil dan dikenal di kalangan akdemisi Islam Internasional.

Baru-baru ini IIUC kembali melaksanakan sebuah Seminar Internasional dengan tema: ***Harmonizing Development and Financial Instruments by Shari'ah Rules for Ummatic Integration***, bekerja sama dengan *World Islamic of Muslim Youths* (WAMY) Dhaka yaitu pada 19 dan 20 Desember 2004. Seminar ini juga diikuti oleh Pakar Ekonomi Syariah dari Indonesia yaitu Prof.Dr.Sofyan Syafri Harahap. Menurut beliau seminar ini berhasil merumuskan upaya mengharmoniskan sektor moneter dan sektor riel yang dalam ekonomi kapitalis berjalan sendiri-sendiri.

Kesimpulan

Pelan tapi pasti, Bangladesh berusaha keluar dari Negara yang tidak mempunyai apa-apa menuju kearah Negara yang sejahtera. Dengan konsep ekonomi kerakyatan yang berbasiskan syari'ah mereka mencoba untuk memberdayakan masyarakatnya. Peran dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi sudah menjadi pilihan mereka untuk mengembangkan perekonomian dan harkat hidup masyarakat mereka. Tanpa bosan mereka terus melakukan penelitian-penelitian dan kerja keras menuju kearah kemakmuran itu. (mzh)

Hablum-Minallah dan Mahmudah sebagai Tonggak Keberhasilan Perekonomian Islam : Bukti Empirik Darul Arqam di Malaysia

"Menurut Syukri Salleh (2003), kekuatan gerakan ini sebelum 1994 adalah karena kuatnya hablum-minallah dan mahmudah dikalangan angota-anggotanya. Mereka sangat menjaga ibadah utama mereka yaitu sholat"

Dalam banyak kesempatan dikatakan bahwa kekuatan orang Islam semakin lama semakin berkurang, terutama dalam aspek perekonomian (perdagangan). Dalam berbagai daftar peringkat terbesar dan terkaya, baik yang dikeluarkan oleh badan-badan domestik maupun yang dikeluarkan oleh badan-badan Internasional, jumlah perusahaan Islam maupun jumlah pribadi Islam jauh dibawah perusahaan maupun pribadi non Islam. Mengapa hal ini terjadi? Jawaban yang selalu mengemuka antara lain adalah kurangnya kesempatan bagi orang Islam, kurangnya modal yang diberikan bagi orang Islam, pemerintah berat sebelah dalam pengambilan keputusan, peraturan tata niaga yang tidak menguntungkan bagi orang Islam, cara-cara yang bukan Islam yang menghalalkan segala cara dalam menjalankan kegiatan bisnis sedangkan orang Islam terbentur akan aturan-aturan syariah. Sehingga orang Islam menjadi selalu terkalahkan.

Pandangan atau alasan seperti ini menurut Syukri Salleh (2004) adalah alasan yang sama yang juga dapat dipakai oleh kebanyakan orang, terutama orang yang bukan Islam. Artinya, siapapun orangnya akan berkata demikian apabila mereka terkalahkan dalam kegiatan usahanya. Pandangan tersebut diatas bukanlah pandangan orang Islam.

Khalifah Sayyidina Umar bin Khatab yang mengalami kekalahan pada masa perang Palestin mencoba menganalisis sebab-sebab kekakalahan pasukannya. Hal utama yang diperiksa oleh Sayyidina Umar bukanlah mengenai perlengkapan dan strategi perang yang berbentuk lahiriah, melainkan meneliti bagaimana Sholat tentara-tentaranya. Beliau menemukan bahwa tentara-tentaranya tidak lagi bersugi sebelum sholat, shaf sholat mereka tidak lagi lurus dan tidak rapat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw : 'sempurnakanlah shaf-shaf kamu karena kelurusan shaf merupakan sebahagian dari kesempurnaan sholat ' (*Hadith Riwayat Muslim 2:3*).

Peristiwa ini memberi makna bahwa di dalam menghadapi permasalahan, hal utama yang mesti diteliti dan dibetulkan adalah aspek hablum-minallah (aspek hubungan manusia dengan Allah swt) dan bukan aspek quwwah (kekuatan lahiriah). Sayyidina

Umar memaklumi bahwa kecacatan hablum-minallah dapat menghalangi bantuan Allah swt. Apabila kecacatan hablum-minallah ini telah diperbaiki tetapi bantuan Allah tidak juga sampai, barulah aspek quwwah diteliti dan diperbaiki. Menurut beliau, memperbaiki hablum-minallah ini sebenarnya berarti memelihara Allah swt. Orang yang memelihar Allah swt telah dijanjikanNya dengan dua perkara yang sangat penting: pertama, Allah swt akan memelihara mereka dan kedua, Allah swt akan senantiasa bersama mereka.

Berdasarkan kepada hakikat itu, begitulah sepatutnya kaidah yang dipakai di dalam menyelesaikan persoalan orang Islam. Perkara pertama yang perlu diteliti, diperbaiki dan diperkuat adalah perkara hablum-minallahnya. Bagaimana sholat-nya, puasanya, berzakatkah dan menunaikan ibadah hajikah? Apabila telah diamalkan, termasuk juga aspek hablum-minallah (hubungan dengan sesama manusia) terutama dari sisi mahmudahnya (sifat-sifat terpuji : jujur, amanah, pemurah, pemaaf, penyabar, ber-syukur, suka bersedekah dan sebagainya) barulah diteliti aspek quwwahnya. Dengan cara ini, barulah orang Islam akan dapat mencapai tujuannya.

Bukti Empirik Darul Arqam

Kebanyakan orang Islam akan berfikir, kejadian diatas hanya berlaku pada zaman Rasullah saw dan zaman assalafus soleh yaitu zaman di dalam lingkungan tiga ratus tahun setelah zaman Rasulullah saw saja. Dimana pada masa itu aspek hablum-minallah sangat kuat terjaga. Boleh jadi pemikiran seperti ini akan salah sama sekali. Janji Allah swt ini tidak terbatas kepada zaman kegemi-langan Islam saja (antara lain: zaman Khulafar ur-Rasyidin, zaman Umar Abdul Aziz ataupun zaman Khalifah Harun-Alrasyid) tetapi ia akan berlaku sepanjang masa. Untuk membuktikan ini, gerakan Darul Arqam di Malaysia bisa menjadi contohnya.

Gerakan Darul Arqam didirikan pada tahun 1968 oleh Ustaz Ashaari Muhammad di Kuala Lumpur. Gerakan ini berkembang sangat pesat dan berhasil membangun sistem kehidupan Islam yang hampir menyeluruh (Sayuti Omar, 2004). Gerakan ini mempunyai sistem pendidikan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik.
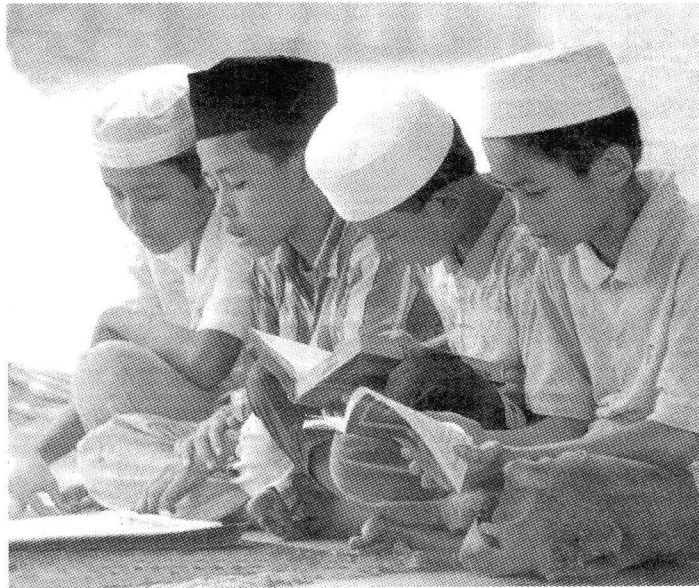
Semuanya dibangun secara berdikari tanpa bantuan siapapun. Sebahagain besar anggotanya bekerja penuh pada gerakan ini. Seperti diketahui, dengan alasan politik, pada tahun 1994 Darul Arqam dilarang oleh pemerintah Malaysia setelah berkembang kuat selama 26 tahun,.

Menurut Syukri Salleh (2003), kekuatan gerakan ini sebelum 1994 adalah karena kuatnya hablum-minallah dan mahmudah dikalangan angota-anggotanya. Mereka sangat menjaga ibadah utama mereka yaitu sholat. Sholat mereka tepat waktu. 15 menit sebelum masuk waktu sholat, mereka telah duduk di shaft sambil bersalawat. Sholat dilakukan dengan khusuk dan diikuti dengan wirid, zikir, doa taubat, sembahyang sunat dan sujud syukur. Setiap malam Senin dan malam Jum'at bertahlil berjam-jam lamanya. Kalau ada program dakwah atau diberi tugas, mereka yang terlibat akan berpuasa dan bertaubat berhari-hari lamanya untuk mensucikan diri. Mereka dididik agar senantiasa merasakan kehambaan kepada Allah swt. Diajarkan untuk memberi lebih kepada yang lain dibandingkan kepada diri sendiri. Diajarkan bertanggung jawab menyelamatkan masyarakat dari berdosa karena tidak melaksanakan fardu kifayah seperti mengeluarkan makanan halal. Sifat kasih sayang sesama mahluk disuburkan dika-langan mereka.

Beberapa tahun sebelum kehancurannya, kekuatan hablum-minallah dan mahmudah gerakan ini menjadi melemah disebab-kan karena kesibukan mereka dengan bisnis yang kian pesat dan Ustaz Ashaari sendiri yang lebih banyak berada di luar negeri untuk menyebarkan dakwah. Waktu sholat sudah tidak mereka tunggukan lagi. Tahlil, maulid, dan wirid dila-kukan sependek mungkin. Pengajian agama sudah mulai berkurangan. Kaset-kaset yang diputar sudah lebih banyak lagu-lagu kasidahan dari pada kaset ceramah agama. Kepen-tingan diri sendiri lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan bersama. Kemewahan bagi sebahagian anggota sudah menjadi kegemaran walaupun yang lain hidup dalam kesusahan. Hablum-minallah dan mahmudah sudah rusak dan akibatnya bantuan Alllah swt tidak sampai dan akhirnya mereka dihancurkn dengan mudah. Pemimpin-pemimpin tertinggi Darul Arqam termasuk Ustaz Ashaari ditangkap oleh pihak yang berkuasa di Malaysia.

"Projek ekonomi dibangun apabila insaniahnya telah ada bukan apabila modalnya telah ada. Jadi modal bukanlah masalah utama"

Pada tahun 1995, ustaz Ashaari yang telah dibebaskan oleh pemerintah Malaysia menjadi tahanan rumah menata kembali Darul Arqam. Ia memulai dari memperkuatkan kembali hablum-minallah. Memperbaiki sholat, memperbanyak sedekah dan membina kasih sayang antara sesama adalah hal pertama yang dia kerjakan. Tahun 1997, dua tahun setelah pembenahan hablum-minallah dan mahmudah, barulah ustaz Ashaari membangun kembali perusahaan, yang diberi nama Rufaga'Corporation. Hanya dalam tempo 4 tahun saja (sampai tahun 2001) Rufaga' telah mempunyai sejumlah 250 rangkaian perniagaan di dalam dan di luar negeri. Bahkan di Malaysia, bisnis ini justru subur di kawasan yang mayoritas penduduknya non muslim yaitu di Bandar Country Homes Rawang. Di luar negeri, bisnis Rufaga' berbasis di Indonesia yang dijalankan oleh Hawariyun Group. Di negara-negara lain seperti Singapura, Brunei, Thailand, Australia, Jerman, Jordan, Uzbekistan, Jepang dan lain-lain Rufaga' menjalankan bisnisnya dengan nama Zumalah Sdn,Bhd. Yakni kongsi antara Rufaga' (51%) dan Hawariyun Group (49%) (Thamo, 2001).

Pada tahun 2001 tersebut, dimana secara makro pertumbuhan ekonomi Malaysia turun, Rufaga' justru mencapai masa kemakmurannya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi?

Hal ini tidak lain karena Rufaga' menggunakan sumber-sumber kekuatan hablum-minallah secara sistematik dan istiqomah disamping tidak mengabaikan penekanan terhadap masalah quwwah. Sholat menjadi hal utama bagi ustaz Ashaari sebelum memulai pekerjaan perniagaan. Ustaz Ashaari juga mewajibkan semua calon pekerjanya mendirikan sholat tahajud dan mengahayati sifat-sifat mahmudah. Mewajibkan untuk banyak bersedekah karena diyakini Allah swt akan menambah rezeki yang berlipat ganda banyaknya.

Bagi Ustaz Ashaari, kekuatan kerohanian ini sangat penting dan ia merupakan 90% dari kekuatan perniagaan sedangkan quwwah hanya 10% saja. Beliau membagikan kekuatan suatu organisasi kepada 4 perkara yaitu: 1. iman dan taqwa; 2. ukhwah Islamiyah; 3. keselarasan dan kefahaman; dan 4. keuangan. Dari empat perkara ini terlihat bahwa kekuatan hablum-minallah adalah kekuatan yang paling diutamakan. Kekuatan modal yang selalu diagungkan dalam teori-teori konvensional bagi beliau hanya berada diurutan terakhir.

Beliau menyatakan lebih lanjut perkara modal ini. Tuhan itu adalah bank. Jadi tak perlu meminjam pada bank yang ada. Artinya tak perlu berhutang. Hal yang utama yang perlu dikerjakan adalah betulkan sholat dan tegakkan mahmudah. Projek ekonomi dibangun apabila insaniahnya telah ada bukan apabila modalnya telah ada. Jadi modal bukanlah masalah utama. Insyaallah projek akan berjalan dengan baik. Namun imbuhnya, sedikit sekali orang yang mau menyambut tawaran Tuhan ini (Tabloid Ana, Maret 2001).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian kekuatan diatas, Ustaz Ashaari menyatakan bahwa kegiatan bisnis tidak bisa dimulai walaupun modal telah terkumpul dengan banyak selagi calon-calon pekerjanya tidak mempunyai iman dan taqwa, tidak mempunyai rasa ukhqah dan tidak memahami falsafah, kaedah dan tujuan perniagaan. Sebaliknya, apabila ketiga kekuatan tersebut telah wujud, walaupun modal belum terkumpul, projek dapat dimulaikan. Karena bagi beliau, wujudnya iman, ukhwah dan keselarasan artinya wujud kepatuhan kepada Allah swt dan wujud sifat-sifat mahmudah yang lain, yang bisa menjadi penyebab Allah swt akan mengirimkan bantuan dan mengaruniakan apa yang diminta, termasuk modal dan kejayaan. Seperti firman Allah swt dalam surah ath-Thalaaq 65:2-3 "barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu"

Sholat menurut Ustaz Ashaari merupakan wadah untuk menimbulkan rasa dilihat, rasa didengar, rasa diketahui lubuk hati, rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas, rasa mengharap dan rasa rindu kepada Allah swt. Dengan rasa yang demikian maka timbullah rasa kehambaan yang mendalam terhadap Allah swt dan terbakarlah segala sifat mazmumah (seperti sombong, tamak, bakhil, hasad, dendam, riya', ujub, cinta dunia, pemarah dan sebagainya). Dengan ini maka diyakini akan terbinalah pribadi agung yang mampu membangun budaya dan kegemilangan ummah secara harmoni. Bangsa-bangsa lain diyakini akan bernaung di bawah pribadi-pribadi agung ini karena pribadi-pribadi agung ini dinaungi oleh Allah swt.(mzh)

Achyar Ilyas :

"Perlu Ada UU Sistem Ekonomi Islam"

UU ini menjadi payung besarnya, lalu di dalamnya terdapat pengaturan mengenai sektor keuangan dan sektor riilnya.

Achjar Iljas rupanya tak butuh waktu lama untuk hijrah dari perbankan konvensional ke syariah. Pada tahun 1999 mantan deputi gubernur Bank Indonesia ini sudah menjadi nasabah di di Bank Muamalat Indonesia. Lalu, ketika Bank Syariah Mandiri berdiri, ia pun menjadi nasabah di bank tersebut. Begitu pula ketika BNI Syariah dibuka. Praktis pada tahun 2001, Achjar sudah tidak lagi memiliki rekening di bank konvensional. "Jadi hijrah saya selesai pada 2001," ujarnya.

Tak hanya sekadar menjadi nasabah, kini Achjar Iljas juga dikenal sebagai salah satu corong bagi perbankan syariah di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan dan forum, ia selalu memperjuangkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Termasuk di antaranya dengan mendirikan Majalah MODAL, majalah yang bertemakan ekonomi dan keuangan syariah, bersama sejumlah jurnalis.

"Padahal sewaktu masih di BI urusan saya bukan di perbankan," ungkap Achjar. Memang sewaktu masih menjadi salah satu dari dewan gubernur BI, Achjar antara lain pernah membidangi direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, direktorat Hukum, direktorat Sumber Daya Manusia dan sejumlah bidang lainnya. Begitu juga sebelum menjadi anggota dewan gubernur, penugasan bagi alumnus Duke University, Durham, North Carolina USA dengan konsentrasi Monetary Economics dan International Economics ini juga tidak banyak yang ke perbankan. Di antaranya ia pernah menjabat sebagai asisten direktur eksekutif International Monetary Fund (IMF).

Namun bukan berarti Achjar tidak pernah bersinggungan dengan perbankan, khususnya perbankan syariah. Pada pertengahan 1990-an, ketika perbankan syariah mulai dikembangkan di BI, yang membidangi pada tahap-tahap awal itu adalah Subarjo Joyosumarto, yang juga salah seorang anggota dewan gubernur BI ketika itu. Mekanisme organisasi yang dikembangkan di BI ketika itu, bila Soebarjo berhalangan, Achjar Ilyas-lah yang menggantikannya, "Termasuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah," kata Achjar. Persinggungan Achjar secara langsung dengan perbankan Islam ini terjadi pada 1995, ketika BI menyelenggarakan konferensi internasional mengenai perbankan Islam, di Hotel Sari Pacific, Jakarta. Waktu itu ketua panitianya Subarjo dan Achjar menjadi sekretaris *organizing committee.* "Semua *proceeding*nya kan masuk ke saya, dari situ saya mulai bersentuhan dengan perbankan Islam," katanya.

Lalu setelah menjadi deputi gubernur, Achjar sering bertemu dengan tim ahli perbankan syariah yang dipimpin Prof Ali

Yafie. Persinggungan lebih langsung lagi ketika UU Perbankan hendak diamandemen pada tahun 1998, "Saya kan deputi bidang hukum ketika itu, sehingga materi-materi itu setelah digodog kan selalu melewati bidang hukum juga," katanya. Achjar mengakui ketika itu yang lebih banyak terlibat memang Subarjo, karena pada saat bersamaan ada UU BI yang sedang digodog juga. Namun ia tetap mengikuti perkembangan pembahasan amandemen UU Perbankan tersebut. "Nah darti situ saya melihat, untuk bisa berjalan lebih baik dalam hal regulasi dan supervisi, landasan hukumnya memang harus kokoh," katanya.

Dari sisi regulasi Achjar melihat perkembangan memang terus membaik. Kalau di UU no 7 tahun 1992 hanya disebutkan bank menyalurkan pembiayaan dengan kredit atau yang lainnya. "Kalimat 'yang lainnya' itu kan untuk menampung perbankan syariah. Nah di UU 98 sudah lebih jelas menyebutkan adanya perbankan dengan prinsip syariah, kemudian definisi kredit dan pembiayaan sudah jelas dibedakan," katanya. Bahkan waktu menyusun UU BI juga sudah ditambahkan, setiap kata kredit selalu disandingkan dengan pembiayaan syariah. Sehingga UU Perbankannya sudah menyebut syariah dan UU BI nya juga mendukung. Sehingga secara formal sejak 1998 Indonesia sudah menganut *dual banking system* dan diperkuat dengan UU-BI no 23 pada 1999. Nah kebetulan di BI, Achjarlah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan.

Secara pribadi Achjar justru melihat, yang harus ada adalah UU yang mengatur sistem ekonomi Islam, kemudian lebih spesifik lagi ada UU Keuangan Syariah dan selanjutnya dilengkapi dengan UU Perbanka Syariah. Untuk cakupan yang lebih luas, memang harus ada UU Ekonomi Syariah, karena bank akan berhubungan dengan sektor riil. "Lalu payungnya apa kalau sektor keuangannya sudah syariah tetapi sektor riilnya tidak syariah. Jadi payung besarnya adalah ada UU Ekonomi Syariah dan di dalamnya ada sektor finansial dan sektor riil," jelasnya. Kalaulah itu dianggap terlalu rumit, bisa saja UU Keuangannya syariah, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang mengatur perdaganganya dan sebagainya. "Atau kalau hendak memanfaatkan yang ada, ya UU Perbankan Syariah saja yang di dalamnya ada pengaturan perdagannya dan sektor riil lainnya," katanya.

Kurang Koordinasi

Achjar melihat, perkembangan perbankan syariah sebenarnya masih bisa dipacu lagi. Memang, tiga tahun terakhir ini pertumbuhanaset, dana pihak ketiga, maupun pembiayaan cukup tinggi, tetapi kalau dilihat pangsa secara nasional, aset dan dana itu baru mencapai 1,1- 1,2 persen. "Masih sangat kecil, karena itu saya bisa mengatakan kita sebenarnya bisa lebih baik lagi," katanya.

Ia melihat ada persoalan dalam koordinasi. Pemerintah, DPR, BI, ulama, universitas, pelaku perbankan, pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya, terlihat belum padu benar dalam upaya pengembangan perbankan syariah. "Misalnya saja kita lihat dari pemerintah dan DPR, upaya memperkuat landasan hukum perbankan syariah hingga sekarang masih belum selesai, padahal wacana untuk memiliki UU Perbankan Syariah itu kan sudah lama dan konsepnyapun sudah ada," kata Achjar. Ia menyarankan, kalaupun UU tersendiri belum bisa diwujudkan, paling tidak UU Perbankan yang ada sekarang diamandemen dengan memasukkan konsepsi perbankan syariah secara lebih jelas dan komprehensif.

Achjar pun melihat, ada persoalan pula di level ulama. Ketika MUI sudah mengeluarkan dan mengumumkan fatwa tentang haramnya bunga bank, lembaga keuangan bukan bank dan lainnya, organisasi-organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, belum mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan fatwa MUI itu. Padahal, MUI adalah suatu lembaga ulama yang resmi, diakui pemerintah dan organisasi-organisasi Islam. Bahkan di dalam MUI, pada pucuk pimpinannya terdapat representasi dari organisasi-organisasi Islam itu. "Yang dirasakan umat dan masyarakat pada umumnya adalah belum adanya kesatuan persepsi dan pandangan dari tokoh-tokoh ulama mengenai hal yang sebenarnya amat penting dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat," ujar Achjar. Ia

> "Sikap MUI sejak awal memang sudah menganggap bahwa bunga bank itu haram. Buktinya di awal MUI tidak setuju bila dalam satu bank ada dua sistem"

Sikap MUI sejak awal memang sudah menganggap bahwa bunga bank itu haram. Buktinya di awal MUI tidak setuju bila dalam satu bank ada dua sistem

berandai-andai, kalau fatwa itu dulu langsung disusul dengan fatwa dari masing-masing organisasi Islam yang mendukung, laju perkembangan perbankan syariah tahun lalu mungkin dapat mencapai 1.000 persen, bukan hanya 100 persen.

Dari persinggungannya dengan para ulama MUI, Achjar menyimpulkan, sikap MUI sejak awal memang sudah menganggap bahwa bunga bank itu haram. Buktinya di awal MUI tidak setuju bila dalam satu bank ada dua sistem. Tetapi, setelah memalui perdebatan dan diskusi panjang, akhirnya MUI bisa menerima bahwa ada cabang syariah, tetapi di kantor pusatnya harus ada divisi tersendiri yang memisahkan dengan konvensionalnya. "Landasannya masih sama, agar tidak tercampur. Nah, berarti kan memang haram," katanya. Lalu di tahun 2000 ada fatwa DSN yang menyebutkan ada jenis tabungan yang sesuai syariah ada yang tidak. Memang secara eksplisit MUI tidak menyebut haram tetapi esensinya kan sama saja. Barulah pada akhir 2003 dengan tegas disebut haramnya bunga bank.

Masalah *ketiga*, perbankan syariah dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan produk, dan menyampaikannya secara profesional kepada masyarakat. Achjar menyarankan, janganlah produknya hanya sekedar menacari-cari padanan dengan produk yang ada di perbankan konvensional, karena tidak semua nasabah semula merupakan nasabah perbankan konvensional. Ada pula sebagian nasabah yang semula bukan nasabah bank, karena sejak dulu memang tidak menerima sistem bunga. "Nah, nasabah yang demikian jelas berbeda kebutuhannya akan jasa perbankan," kata Achjar. Ia menyarankan agar perbankan syariah, bekerjasama dengan para ahli terkait melakukan penelitian yang mendalam atas kebutuhan masyarakat dan kemudian melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan syariah dan kebutuhan masyarakat tersebut.

Peran DSN

Bagi Achjar, Dewan Syariah Nasional (DSN) sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, khususnya dalam memberikan pegangan dan rambu-rambu serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkannya pun sudah mulai mengisi kebutuhan yang dirasakan lembaga keuangan, perbankan, dunia bisnis dan masyarakat pada umumnya.

Namun, melihat kompleksnya permasalahan ekonomi keuangan dalam era globalisasi ini, Achjar melihat, ke depan DSN perlu lebih berkonsentrasi pada penggodogan dan pemantapan fatwa. Tentu saja, lembaga ini perlu ditunjang dengan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran dan SDM. Di pihak lain, peran rangkap anggota DSN sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) di berbagai lembaga keuangan syariah, bila masih ada, sebaiknya dialihkan kepada pihak lain yang lolos *fit & proper test* nya DSN. Selanjutnya bagi lembaga keuangan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), perlu dikaji untuk untuk mengintegrasikan fungsi DPS ke dalam fungsi komisaris, dengan catatan komisaris yang akan berfungsi juga sebagai DPS harus lulus *fit & proper test* dari DSN dan BI.

Akan tetapi, kalau DPS dimaksudkan sebagai kepanjangan tangan DSN, seperti pengawas atau pemeriksa BI, sebaiknya anggota DPS merupakan anggota DSN dan sepenuhnya dibiayai oleh DSN. "Dalam hubungan ini, semestinya pendanaan DSN berasal dari Pemerintah melalui mekanisme APBN dan/atau dari Bank Indonesia" kata Achjar. (budi setyanto)

TV East & TV Peace, Televisi Kabel Muslim Amerika

> "TV East juga menayangkan berbagai program acara dengan tujuan untuk memberikan rasa senasib sepenang-gungan dengan sesama kalangan muslim asal Asia Selatan yang tinggal di kota tersebut pada khususnya dan AS pada umumnya"

Masyarakat muslim Amerika Serikat saat ini boleh berbahagia, karena mereka telah memiliki sarana untuk kepentingan hiburan serta pendidikan bagi mereka. Bermarkas di "the big apple", New York, AS, format televisi yang diberikan TV East, demikian nama televisi tersebut adalah TV Kabel. Para pengelola televisi ini pada dasarnya percaya informasi yang baik dan benar akan sangat berperan dalam mengangkat citra suatu kelompok di suatu negara. Hal inilah yang melandasi Parvez Farooqui dan Shafquat Chaudhary untuk mendirikan TV East. *"Televisi yang kami dirikan akan memberikan segala informasi dengan jujur kepada para profesional, kalangan jurnalis, intelektual, serta kalangan aktivis yang semuanya memiliki keinginan yang besar untuk bisa dapat berinteraksi dengan masyarakat lain di dunia ini* demikian mereka menjelaskan ketika ES sempat berdialog dengan mereka di New York baru-baru ini.

Sebagai sebuah televisi yang berusaha untuk menjadi televisi yang berguna bagi masyarakat muslim di Amerika, terutama mereka yang berada di pantai Timur, TV East memiliki *"positioning"* yang cukup menarik, yaitu *"sebagai sebuah televisi yang memfokuskan dirinya pada kalangan masyarakat Asia Selatan yang berdomisili di AS serta mengangkat berbagai permasalahan politik dan sosial yang ada di kalangan tersebut dan terjadi di Amerika Serikat." Selain itu tentunya berbagai isu-isu terbaru yang ada di dunia Islam tidak luput dari pemberitaan kami"* demikian kata mereka lagi. TV East juga menayangkan berbagai program acara dengan tujuan untuk memberikan rasa senasib sepenang-gungan dengan sesama kalangan muslim asal Asia Selatan yang tinggal di kota tersebut pada khususnya dan AS pada umumnya, dengan berbagai program seperti program pendidikan, kebudayaan, pelajaran bahasa, dan lain lain. Meskipun begitu, bukan berarti televisi tersebut kemudian menutup diri dengan kalangan lain yang ada di AS. Terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat muslim AS, terutama mereka yang berasal dari Asia Selatan dengan masyarakat AS yang lain merupakan salah satu tujuan dari pendirian televisi ini.

Karena masih terhitung baru, tidak semua program yang ditayangkan merupakan produksi asli mereka yang dibuat langsung di AS. Ada sebagian dari program tersebut yang diambil dari berbagai acara dan program televisi yang ada di Pakistan, Bangladesh, dan India bagian barat. Berdasarkan hal tersebut, maka ada perbedaan waktu penayangan. Acara-acara yang dibeli dari Pakistan, Bangladesh, dan India biasanya ditayangkan pada waktu siang hari, sedangkan acara-acara yang ditayangkan pada malam hari biasanya merupakan produksi lokal dari jajaran televisi itu sendiri. Acara yang mereka (TV East, red) buat tersebut biasanya berformat diskusi dan talk show dimana akan hadir berbagai kalangan dari berbagai disiplin ilmu seperti kalangan artis, dokter, kaum pebisnis profesional dan selain itu berbagai berita yang terjadi seputar dunia Islam serta perkembangan ekonomi dan politik yang terjadi di AS serta di belahan dunia lain, diskusi antar tokoh-tokoh masyarakat, serta tidak lupa acara yang ditujukan bagi anak muda yang berupa konsultasi psikologi dan konseling bagi mereka. Acara Talk Show yang mereka tampilkan juga bertujuan untuk memberikan semangat dan petunjuk bagi generasi muda mereka.

Mengingat segmen pasar dari televisi ini pertama kali ditujuan kepada kalangan muslim asal Asia Selatan yang ada di Pakistan, maka informasi mengenai lapangan kerja juga menjadi berita yang sangat berharga bagi mereka, dan sektor kewirausahaan menjadi salah satu tumpuan mereka dalam bekerja. Tidak heran dalam programnya TV East juga memyampaikan informasi mengenai para pengusaha (entrepreneur, red) yang sukses dan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi kalangan muslim yang tinggal di sana. Selain berbagai program yang ada di atas, maka TV East juga menyediakan berbagai informasi yang bersifat lintas-budaya dalam rangka mengintegrasikan kehidupan masyarakat muslim yang ada di AS dengan masyarakat setempat serta dalam rangka menghindar-kan pandangan-pandangan yang negatif dari masyarakat AS. Acara-acara yang ditampilkan diantaranya adalah kehidupan para keluarga imigran muslim yang ada di sana serta bagaimana anak-anak mereka tumbuh di tengah budaya yang sangat berbeda dengan tanah kelahiran mereka, perubahan peraturan keimigrasian negara paman sam tersebut semenjak tragedi 11 September 2001, serta dialog dengan kalangan intelektual tentang kehidupan masyarakat muslim pasca 11 September. Hampir keseluruhan program ini dibuat oleh TV East sendiri dan disiarkan langsung dari studio mereka yang terletak di New York.

Kalau begitu, apakah tidak ada hiburan sama sekali dalam acara-acara yang ditayangkan oleh TV East? "Tentu tidak", jawab Chaudary menjawab pertanyaan ES. *"Kami juga menyediakan hiburan seperti animasi kartun dengan berbagai serial yang ada, kemudian acara-acara pendidikan untuk anak-anak yang dikemas dalam bentuk yang lucu dan menarik bagi mereka, pelajaran Al-Qura'n serta animasi kartun tentang cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan dan berbagai dongeng mendidik bagi mereka. selain itu kami tampilkan pula acara sejarah Islam bagi para penonton, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di negeri ini agar mereka selalu ingat akar dan budaya asli mereka*" demikian Chaudary menambahkan dengan bersemangat. Selain itu, secara rutin TV East juga memberikan jadwal shalat dalam setiap tayangannya secara langsung. Hal ini terasa sangat penting di negara 4 musim seperti AS, karena seiring dengan perubahan musim yang ada, maka jadwal shalat pun bisa bergeser sedemikian jauh. Bagi mereka yang sehari-harinya bekerja, ketiadaan jadwal shalat ini akan terasa mengganggu. Akan tetapi, dengan adanya jadwal yang sudah disediakan oleh TV East, maka shalat tetap bisa dikerjakan pada waktunya karena mereka yang sudah bekerja sudah mengetahui waktu yang tepat untuk menjalankan ibadah tersebut.

Setelah berhasil dengan TV East-nya, maka Chaudary berencana untuk mengeluarkan sebuah televisi baru dengan nama TV Peace. Direncanakan segementasi pasar TV ini akan lebih luas dibandingkan dengan TV. East. " Bila cakupan penonton TV East adalah masyarakat muslim yang ada di kawasan Amerika Utara, termasuk yang ada di Kanada, maka TV Peace diharapkan akan dapat menggapai penonton yang lebih banyak" demikian tambahnya lagi menutup pembicaraan (ssh/hkl)

Sisi Lain Konflik

Judul Buku	:	Target Sudan, What's Really Behind The Crisis In Darfur ?
Pengarang	:	El Hajj Mauri' Salakhan
Penerbit	:	The Peace and Justice Foundation, Washington DC, USA
Halaman	:	144 Halaman

Sudan merupakan sebuah negara yang terhitung luas di benua Afrika serta memiliki sejarah yang panjang bila dihubungkan dengan sejarah kerajaan-kerajaan Afrika di jaman dahulu. Dalam masa ini, Sudan tercatat sebagai sebuah negara di Afrika yang penduduknya mayoritas menganut agama Islam (hampir 80%), 15% menganut kepercayaan tradisional Afrika, dan 5 % sisanya menganut agama Kristen. Saat ini Sudan dapat dikategorikan sebagai sebuah negara "dunia ketiga" dan sedang menghadapi masalah yang cukup rumit sehubungan dengan adanya tuduhan terjadinya *"genocide"* atau pembersihan etnis di kawasan Darfur, sebuah propinsi di negara tersebut. Dan pemerintah Sudan dituduh berada di balik terjadinya aksi tersebut, atau paling tidak dianggap telah kurang dalam memberikan perlindungan serta tindakan agar aksi tersebut tidak terjadi. Bahkan secara lebih jauh lagi, pemerintah Sudan dituduh telah memberikan perlindungan kepada kelompok "Janjaweed" yang dianggap sebagai pelaku teror dan pembersihan etnis di Darfur. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang dituduhkan terhadap pemerintah Sudan tersebut adalah benar ? Buku karangan El-Hajj Mauri' Salakhan ini tampak berusaha untuk menjawabnya.

Diawali dengan bagaimana pandangan yang dikemukakan oleh para wakil pemerintah Sudan yang berada di luar negeri, terutama AS dan sekutu-sekutunya tentang konflik yang terjadi di Darfur. Mereka adalah Menteri Luar Negeri Sudan Dr Mustafa Osman Ismail serta Duta Besar Sudan untuk AS, Khidir Haroun Ahmed. Mereka secara tegas menandaskan bahwa yang terjadi di Darfur adalah sebuah konflik kemanusiaan yang sangat kompleks, akan tetapi tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah aksi *"genocide"* atau pembersihan etnis. Selain pandangan yang dikemukakan oleh kedua pejabat tinggi Sudan tersebut, pandangan bahwa konflik yang terjadi di Darfur memang memprihatinkan juga disampaikan oleh Uni Eropa, Uni Afrika, Liga Arab, OKI, Gerakan Non-Blok (GNB), Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta kelompok *Doctors Without Borders*. Dalam buku ini disampaikan bahwa mereka semua, setelah bekerja dan menangani para pengungsi yang ada di Darfur dalam jangka waktu yang lama menyimpulkan bahwa konflik di sana bukanlah sebuah "pembersihan etnis"., kesimpulan yang sama tentang hal ini juga disampaikan oleh JP Pronk, Utusan Khusus Sekjen PBB Kofi Annan untuk Sudan.

Selain itu dalam buku ini juga disebutkan beberapa fakta yang diketemukan oleh para anggota tim pencari fakta *Islamic Society of North America* (ISNA) dari AS untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dari krisis yang terjadi di Darfur. Mereka menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Darfur yang para penduduknya notabene hampir semuanya muslim menjadi "terkesan" lebih parah dan mendapatkan pemberitaaan negatif di kalangan pers AS (dan sekutu-sekutunya, red) karena sikap dari sebagian kalangan oposisi muslim Sudan sendiri yang memiliki keinginan untuk mengganti pemerintah Sudan. "Sebagian karena mereka kehilangan kekuasaan mereka dalam pemerintahan ini" ujar Imam Johari Abdul Malik, pemimpin Islam dari Howard University, Washington DC, AS. Tidak heran dalam buku ini disebutkan bahwa untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik di Darfur perlu dilakukan pemisahan antara fakta dengan ilusi. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang anggota tim pencari fakta dari ISNA, Imam Khalid Fattah Griggs. Bahkan para pemimpin oposisi muslim yang ada di Sudan juga menegaskan bahwa yang terjadi di Darfur bukanlah sebuah aksi pembersihan etnis. Informasi yang terjadi tentang terjadinya aksi pembersihan etnis di Darfur, Sudan lebih dikarenakan adanya aksi propaganda hitam terhadap pemerintah Sudan pada khususnya dan masyarakat Sudan pada umumnya.
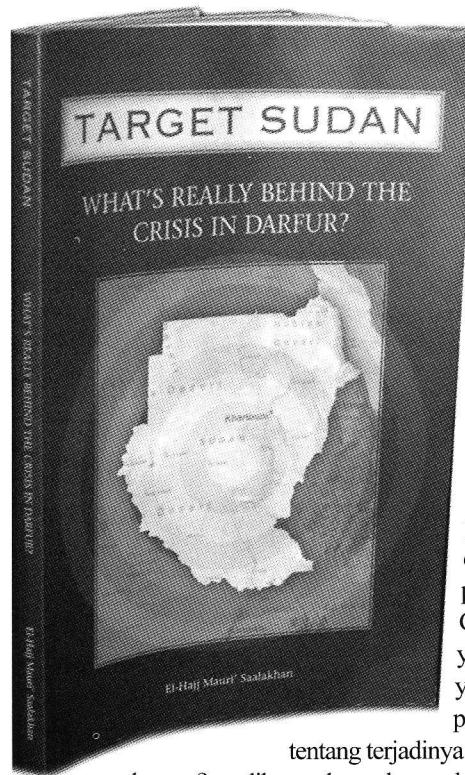
Buku yang ditulis oleh El-Hajj Mauri' Salakhan ini berusaha untuk menampilkan sebuah sisi yang lain dari konflik yang terjadi di kawasan Darfur, Sudan. Profesi sang penulis yang merupakan seorang aktivis hak asasi manusia membuat integritas dari isi buku ini hampir tidak diragukan lagi. Apa yang ditulisnya bukan hanya perwujudan dari sikapnya sebagai seorang muslim, akan tetapi juga merupakan perwujudan dari aktivitasnya sebagai seorang aktivis hak asasi manusia (hkl)

Membongkar Interpretasi Riba

Judul Buku	:	Menyoal Bank Syariah : Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis
Pengarang	:	Abdullah Saeed, PhD
Penerbit	:	Paramadina
Halaman	:	257+

Benarkah bank syariah sudah beroperasi sesuai dengan syariah? Begitulah kira-kira yang hendak diungkapkan penulis dalam buku yang berjudul asli *Islamic Banking and Interest : A Study of Riba and its Contemporary Interpretation* . Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba membongkar kembali interpretasi riba dalam kerangka Al-Qur'an dan Sunnah. Ada dua pandangan penafsiran riba di zaman modern yang dikemukakan. Pandangan kaum modernis yang menekankan pengharaman riba kepada kezaliman, dan pandangan kaum neo-revivalis menekankan pada bentuk legal dimana riba terkonseptualisasi secara formal dalam hukum Islam. Pandangan kaum modernis diwakili oleh Fazlurrahman (1964), Muhamad Asad (1984), Said al-Najjar (1989) dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989), sedangkan kaum neo-revivalis diwakili Maududi dan Sayyid Quthb.

Penulis sependapat dengan dengan kaum modernis. Menurutnya, dalam konteks ayat-ayat yang terkait dengan riba menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengharamkan riba dengan pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum. Pandangan ini didukung oleh komparasi-komprarasi riba dengan *shadaqah* yang dilakukan Al-Qur'an, dan juga penyebutan secara khusus pengharaman, yaitu kezaliman, di akhir-akhir ayat yang mengharamkan riba.

Saeed juga mengkritik sistem *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yamg dipraktekkan oleh kebanyakan bank Islam. Bank-bank Islam ingin tampak 'Islami' di mata para kliennya, sekaligus 'menguntungkan' dalam investasi usaha-usaha yang berisiko rendah atau bebas risiko. Oleh karenanya, bank Islam harus menanggalkan kedua konsep *mudharabah* dan *musyarakah* dari sejumlah karakteristik dasarnya guna membuat keduanya menjadi kongsi-kongsi jangka pendek yang nyaris bebas risiko dimana bank dapat menyalurkan modal berdasarkan keuntungan yang kurang lebih ditetapkan terlebih dahulu.

Begitu juga pembiayaan *murabahah* yang telah mencapai lebih dari tujuh puluh lima persen pembiayaan bank Islam. Perubahan dari sistem berbasis bunga menuju sistem berbasis *mark-up* hanyalah sekedar perubahan nama tanpa mengubah substansi sama sekali. Pembiayaan murabahah dan harga kreditnya yang lebih tinggi jelas menunjukkan bahwa ada nilai waktu dalam pembiayaan berbasis *murabahah,* yang mendorong, meski secara tidak langsung kepada pengakuan nilai waktu pada uang dan secara logika menggiring kepada pengakuan terhadap bunga. Kalaupun kita mengakui kebolehan *murabahah* secara hukum, kita memiliki kaidah hukum yang membatalkannya, yaitu bahwa segala hal yang mendorong kepada sesuatu yang haram adalah haram.

Bahkan dalam bab kesimpulan buku secara gamblang memaparkan bahwa dalam konteks transaksi-transaksi keuangan dan perbankan, maka faktor ketidak adilanlah yang akhirnya menentukan apa yang riba dan apa yang bukan. Suatu 'tambahan' dalam transaksi keuangan yang diberikan kepada kreditur hanya karena itu adalah semata-mata tambahan tidaklah menjadi riba. Ini berarti bahwa tidak semua jenis bunga adalah riba, kecuali jenis bunga yang mengandung ketidakadilan kepada salah satu pihak yang melakukan kontrak. Sama halnya suatu transaksi, meskipun tidak secara eksplisit .mengandung elemen bunga tetapi mengarah kepada ketidakadilan salah satu pihak dapat dianggap sebagai suatu transaksi bunga.

Isi buku ini memang sangat kontroversial ketika kita sedang semangat-semangat nya memperjuangkan bank syariah menjadi satu alternatif perbankan nasional yang 'lebih baik' dibandingkan perbankan konvensional. Bahkan Fatwa MUI pun telah keluar untuk mendukung perjuangan ini. Namun, bukan berarti dengan membaca buku ini kita harus kembali ke titik nol untuk memperdebatkan kembali apakah bunga bank haram atau tidak. Buku ini dapat menjadi renungan dan cambukan untuk bank syariah supaya tidak pernah berhenti menjadi lebih *syar'i.* Label syariah tidak saja cukup untuk menjadi bank syariah, namun juga perjuangan menjadi lembaga perbankan yang lebih manusiawi, mampu membuat orang memiliki akses dana berdasarkan syarat-syarat yang manusiawi, dan dengan biaya yang pantas. Jenis perbankan seperti inilah yang diperlukan untuk membantu meningkatkan standar hidup rakyat dunia Muslim, yang kebanyakan masih hidup di bawah garis kemiskinan. *Wallahu a'lam* (njm)
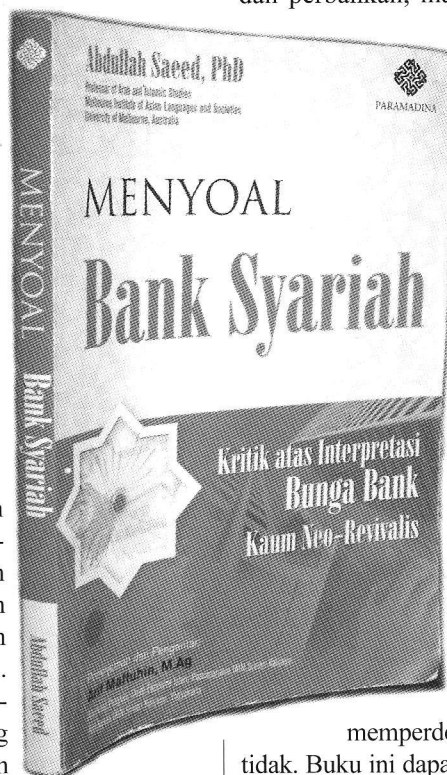
Muhammad Zilal Hamzah

Kebohongan Publik : Perpajakan Tak Islami

"Sudah lumrah apabila seorang kepala Kanwil mempunyai 1 BMW dan 1 CRV di garasinya, padahal gajinya paling banyak 15 juta per bulan. Darimana ia mendapatkannya?"

Hari itu saya mengikuti sebuah seminar yang diselenggarakan oleh *Akses Research Indonesia*. Tema seminar kala itu adalah Revitalisasi Direktorat Jenderal Pajak : Evaluasi Kinerja Tahun 2004. Saya mengharapkan dari seminar ini saya akan mendapatkan masukan yang menyokong kajian saya bahwa peningkatan tarif pajak bukanlah yang terbaik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab temuan kajian saya dengan menggunakan data dari tahun 1991-2002, menunjukkan hasil yang tidak signifikan untuk itu. Meskipun disisi lain, besarnya *tax rate* kita memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

Diawali dengan kata pembuka oleh ketua Panitia, yang menyatakan bahwa pada dasarnya pajak adalah sumber utama Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekarang ini. Lebih kurang 80% penerimaan dalam negeri sekarang sudah berasal dari pajak. Sebab sudah dibayangkan bahwa sumber lain yang menjadi primadona sebelumnya yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah tidak bisa diharapkan lagi. Bahkan untuk tahun-tahun mendatang Indonesia sudah menjadi importir bagi BBM kebutuhan Indonesia. Sampai disini saya masih berharap banyak tentang isu-isu yang akan muncul dari seminar ini. Artinya, Apakah Indonesia memang harus mengoptimalkan sumber penerimaan pajaknya? Tidak adakah alternatif lain? Peningkatan Ekspor Agribisnis atau Hutang yang terencana dengan baik misalnya?

Selanjutnya pembicara utama Faisal Basri, MA., mempresentasikan makalahnya. Alangkah lain yang saya dapatkan dari presentasi yang dipaparkan oleh Faisal Basri. Perut saya mual mendengarnya. Cobalah bayangkan, menurut Faisal, hanya 10% saja dari pajak yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak yang masuk ke kas negara. Jadi kemana ang 90% lagi. Dalam paparan yang berdasarkan pengalaman pribadinya ketika memimpin sebuah Instansi (Perbanas,Red), terjadi kesimpangsiuran penjelasan yang disampaikan oleh petugas pajak mengenai pajak yang harus dibayar oleh Perbanas, dari seharusnya terdapat kelebihan pembayaran sebesar lebih kurang 70 juta rupiah, menjadi kekurang bayarang yang jumlahnya diatas angka 1 milyar rupiah. Tetapi apabila Perbanas mau *mengerti*, boleh saja dibayar kurang daripada itu. Demikian usul si petugas pajak. Masya Allah. Inikah kerja petugas pajak?

Lanjut Faisal, seorang pengusaha di daerah kota Jakarta menyampaikan kepada Faisal bahwa hanya sebanyak 60.000 unit saja dari *Hand Phone* yang diperjualbelikan di kota yang dikenai pajak pada tahun 2002, padahal unit yang diperjual belikan pada tahun itu mencapai 100.000 unit. Ini juga hasil saran petugas pajak. Tahukah Dirjen Pajak mengenai ini?

Imbuh Faisal lagi, menurut Dirjen Pajak, pada tahun 2004 pengumpulan pajak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 239 Trilliun rupiah dan pada tahun 2005 ini menargetkan penerimaan pajak sebesar 256 Trilliun rupiah. Menururut Faisal, target ini hanya lebih besar secara nominal, tetapi secara ratio terjadi penurunan target pajak dari 14,11% pada tahun 2004 menjadi hanya 11,13% untuk tahun 2005 dan rasio ini sangat jauh dibandingkan rasio yang di targetkan oleh negara tetangga yaitu sebesar 22%. Sebenarnya Dirjen Pajak bisa mendapatkan pajak yang lebih besar dari itu bahkan sampai dengan angka 280 Trilliun rupiah masih dimungkinkan. Kenapa hal ini tidak sampai, karena selama ini Dirjen pajak dalam mengumpulkan pajak seperti pemburu yang berburu di kebun
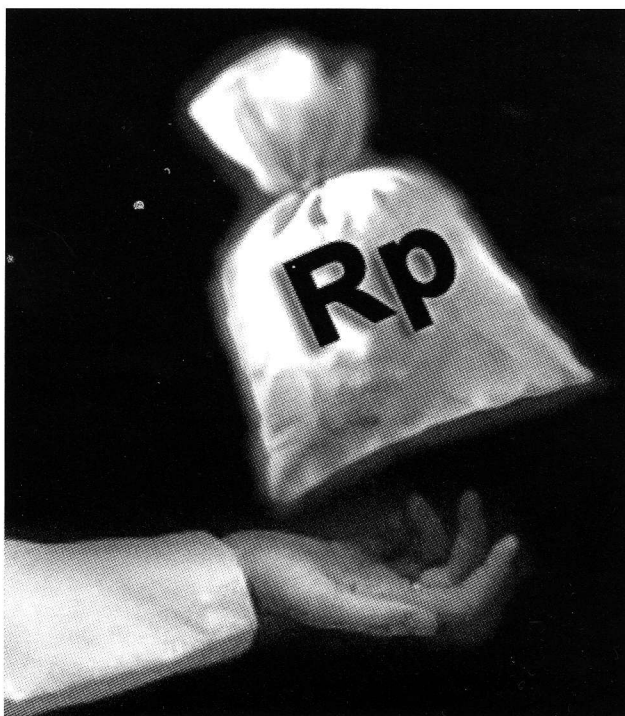
binatang. Artinya tak ada usaha Dirjen Pajak untuk menambah *tax base* pajak, mereka hanya menunggu wajib pajak yang datang. Jadi walau tampaknya Ditjen Pajak selalu dapat memenuhi target pajaknya, ini jadi tak mengherankan. Sebab target ditentukan sendiri yang *nota bene* mereka sudah tahu kemampuannya. Betul-betul tak percaya saya mendengarnya

Pembicara berikutnya adalah Sugiharto. Dia menjelaskan bahwa dari penerimaan Dirjen Pajak sebesar 239 Trilliun rupiah pada tahun 2004 tidak dijelaskan oleh Dirjen Pajak; apakah uang itu benar-benar diterima dari wajib pajak untuk tahun itu ataukah termasuk didalamnya penerimaan yang baru akan diterima pada bulan Januari tahun 2005 dan dimasukkan sebagai penerimaan tahun 2004. Atau apakah juga termasuk didalamnya penerimaan dari pemerintah (karena pemerintah mensubsdi penghasilan tidak kena pajak bagi penghasilan kurang dari 1 juta rupiah). Ini berarti target tadipun belum jelas sepenuhnya. Ditjen Pajak harus mengklarifikasi ini!

Disisi lain, Ismet sebagai pembicara ketiga, yang baru dihubungi 1 (satu) jam sebelum acara dimulai membagi, pengalamannya. Sebagai seorang pengusaha menengah, ia banyak berurusan dengan hal perpajakan dan inilah yang membuat saya harus meninggalkan cepat-cepat tempat tersebut. Karena tak saya duga saudara-saudara saya tega melakukan kerja seperti itu.

Berdasarkan pengalamannya sebagai pengusaha di beberapa daerah seperti Bengkulu, Klaten, Makassar, Surabaya, Palembang; perilaku petugas pajak itu sangat parah: pertama mereka malah mempersulit apabila ada objek pajak baru yang akan mengurus MPWP; kedua, setiap komplain terhadap mereka baru akan tejawab setelah enam bulan lamanya; ketiga, dalam perkara penempatan pegawai (mutasi pegawai) pajak, diperlukan dana sebesar Rp.100 juta rupiah dari calon ke atasannya dan meneken kontrak untuk memberikan upeti kepada Kakanwil selama 3 tahun berturut-turut. Masya Allah. Imbuhnya, Serpong, Bekasi, dan Tangerang merupakan objek pajak yang sangat diminati oleh petugas pajak karena disana banyak kantor-kantor atau tempat-tempat usaha-usaha. Di daerah tersebut, pelaku usaha bukannya takut kepada departemen pembinanya tetapi lebih mengkuatirkan petugas pajak. Sudah lumrah apabila seorang kepala Kanwil mempunyai 1 BMW dan 1 CRV di garasinya, padahal gajinya paling banyak 15 juta per bulan. Darimana ia mendapatkannya? Lazim pula bagi petugas pajak untuk bertemu kliennya di Hotel/Restaurant dan bukannya di kantor. Hebatnya merekalah yang mentraktirnya.

Benar-benar tak habis pikir saya. Mual saya semakin menjadi-jadi. Dalam perjalanan pulang saya menyesal karena saya tak mendapatkan sesuatu yang menyokong kajian saya di seminar ini. Tapi satu hal yang jelas bagi saya hádala bahwa target pajak ditentukan sendiri oleh Dirjen Pajak yang pasti mereka tahu dengan pasti kemampuannya untuk mencapai itu dan mereka sendiri yang mengukurnya. Seharusnya target pajak ditentukan oleh badan lain. Kemudian keberhasilan penarikan pajak jangan diukur dengan target tetapi diukur dengan keberhasilan penarikan pajak itu sendiri. Seperti yang saya pahami dalam skala mikro, misalnya urusan retribusi perparkiran DKI. Tahun 2004 lalu, PAD DKI memperoleh 19 milyar dari parkir. Tetapi DKI juga mengeluarkan subsidi untuk BP ini sebesar Rp.17 milyar. Jadi hanya Rp.2 milyar sebenarnya sumbangan BP terhadap PAD DKI. Untuk apa saja uang Rp.17 milyar itu? Hanya mereka yang tahu. Kemudian mereka akan meningkatkan tarif parkir sampai 200-300 persen pada tahun 2005 ini. Ya, hanya mereka yang tahu untuk apa itu. Karena kita tak menerima kelebihan apa-apa dari menajemen perpakiran Jakarta. Malah kalau ada kerusakan, kehilangan atau mobil hilang, itu semua menjadi tanggungan pemilik.

Oleh karena itu, agar segala kerja-kerja aparatur pemerintah tampak bermamfaat bagi masyarakat yang telah membayarnya, sebaiknya pemerintah harus sudah melaksanakan hal-hal berikut, seperti: perbaikan terhadap SDM perpajakan itu sendiri, perbaikan terhadap aparat pengawasan seperti BPK, keseragaman identitas, pembuktian terbalik untuk petugas pajak yang melakukan korupsi, hukuman yang seberat-beratnya bahkan hukuman mati bagi pelaku korupsi di lingkungan tersebut, mendirikan penilai independen untuk hasil kerja orang pajak, dan tentunya komitmen pemerintah terhadap budaya anti korupsi. Disamping itu, juga mesti diperhatikan untuk konsep makronya bahwa Ditjen Pajak mempunyai kaitan dengan BPK,BPKP,DPR dan Dirjen Keuangan. Ini juga harus dibenahi. Mudah-mudahan ini berhasil. Semoga kerja kita diridhoiNya.

10 Besar Top 500 Perusahaan Indonesia Tahun 2003

BERDASARKAN PENDAPATAN			
	Nama Perusahaan	Pendapatan	%
1	Pertamina (persero) PT	202.697,0	23,5
2	PLN (persero) PT	54.430,8	6,3
3	Bank Mandiri (persero) Tbk PT	28.895,2	3,3
4	Telkom Tbk PT	27.115,0	3,1
5	Gudang Garam Tbk PT	23.137,4	2,7
6	Astra International Tbk PT	20.214,8	2,3
7	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	17.871,4	2,1
8	Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk PT	16.007,8	1,9
9	Bank Negara Indonesia (persero) Tbk PT	15.286,7	1,8
10	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	14.675,1	1,7
	Sub Total	**420.331,2**	**48,7**
	Total Top 500	**863.149,9**	
BERDASARKAN TOTAL ASET			
	Nama Perusahaan	Total Aset	%
1	Bank Mandiri (persero) Tbk PT	245.811,7	11,1
2	PLT (persero) PT	207.615,6	9,4
3	Bank Central Asia Tbk PT	132.969,4	6,0
4	Bank Negara Indonesia (persero) Tbk PT	131.246,1	6,0
5	Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk PT	94.709,7	4,3
6	Pertamina (persero) PT	92.981,0	4,2
7	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	52.283,2	2,4
8	Telkom Tbk PT	50.283,2	2,3
9	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	46.070,2	2,1
10	Bank International Indonesia Tbk PT	34.589,4	1,6
	Sub Total	**1.088.956,4**	**49,4**
	Total Top 500	**2.205.697,8**	
Berdasarkan Perolehan Laba Bersih (Teruntung)			
	Nama Perusahaan	Laba Bersih	%
1	Telkom Tbk PT	6.087,2	8,7
2	Pertamina (Persero) PT	5.848,5	8,3
3	Bank Mandiri (Persero) Tbk PT	4.586,1	6,5
4	Astra International Tbk PT	4.419,4	6,3
5	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT	2.250,4	3,6
6	Bank Central Asia Tbk PT	2.390,9	3,4
7	Toba Pulp Lestari Tbk PT	1.847,0	2,6
8	Gudang Garam Tbk PT	1.838,7	2,6
9	Indosat Tbk PT	1.570,0	2,2
10	Bank Danamon Tbk PT	1.529,6	2,2
	Subtotal	**32.619,7**	**46,4**
	Total	**70.241,6**	

15 Saham Top Volume Periode 14-18 Januari 2005

NO	CODE	NAMA SAHAM	HARGA SAHAM		NILAI
			TERTINGGI	TERENDAH	
1	BNGA	Bank Niaga Tbk	520	500	496.212.265.000
2	BNII	Bank International Ind	205	200	164.790.407.500
3	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk	40	40	24.057.117.500
4	BUMI	Bumi Resources Tbk	910	880	516.680.400.000
5	PNLF	Panin Life Tbk	185	180	82.190.897.500
6	UNSP	Bakrie Sumatera Plt Tbk	390	370	128.739.710.000
7	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	520	510	154.425.755.000
8	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper	1310	1240	398.152.670.000
9	BMRI	Bank Mandiri Tbk	1870	1830	572.430.080.000
10	BLTA	Berlian Laju Tanker Tbk	830	810	228.391.925.000
11	BRPT	Barito Pacific Timber Tbk	840	450	131.346.812.500
12	INDF	Indofood Sukses Makmur	90	890	183.066.095.000
13	CFIN	Clipan Finance Ind	465	450	83.260.512.500
14	PLAS	Palm Asia Corpora	970	950	178.729.745.000
15	GJTL	Gajah Tunggal	880	840	136.538.275.000

Tenaga Edukatif

Anna Dasril, Dr, MS.
Antar Sianturi, Drs, Ak, MBA
Aruna Wirjolukito, Dr, MM, MSi.
Basri Musri, Drs, Ak, MM.
Binsar Simanjuntak, Dr, Ak, MASc.
Edison, Dr.
Edwin Jaya P., MAc, MBA
Effendi Syahril, Ir, PhD.
Farida Jasfar, Prof, Dr.
Gunadi, Prof. Dr, MSc
H. Hamzal, MS, MQM, MBA.
Haryono, Drs, Ak, Msc.
Harsini Sutomo, Dr.
Herman Josep, M.Com, CISA, CISP
I. G. Oka S. Pribadi, Dr
Indra Wijaya, Dr
M. Haniv, MST
Moelyono P.S., Dr.
Moenaf H. Regar, Prof, MAcc
Mutiara S.P., Dr, ME
Puspahadi Boenjamin, Msi
Rahman Untung B., MBA, CFA
Rasyid, Prof, Dr
Riri Satria, S.Kom, MM
Robert Pakpahan, Dr
Roy Gony, MM.
Salip, Dr, MSc
Sensi Wondabio, SE, MM
Soekrisno Agoes, Dr, Ak, MM
Sofyan S. Harahap, Prof, Dr, MSAc.
Sudarman, Dr.
Sumihar P. Tambunan, Dr.
Syarif Hidayat, Dr.
Thoby Mutis, Prof, Dr.
Victor Siagian, Dr.
Yvonne Augustine, Dr, Ak, ME

Informasi

Sekretariat Program Pasca Sarjana
Universitas Trisakti
Kampus A, Gedung I lantai 1,
Jl. Kyai Tapa (Grogol) Jakarta 11440
Telp. (62-21) 56969067, 5663232 ext. 322
Fax. (62 21) 5668639
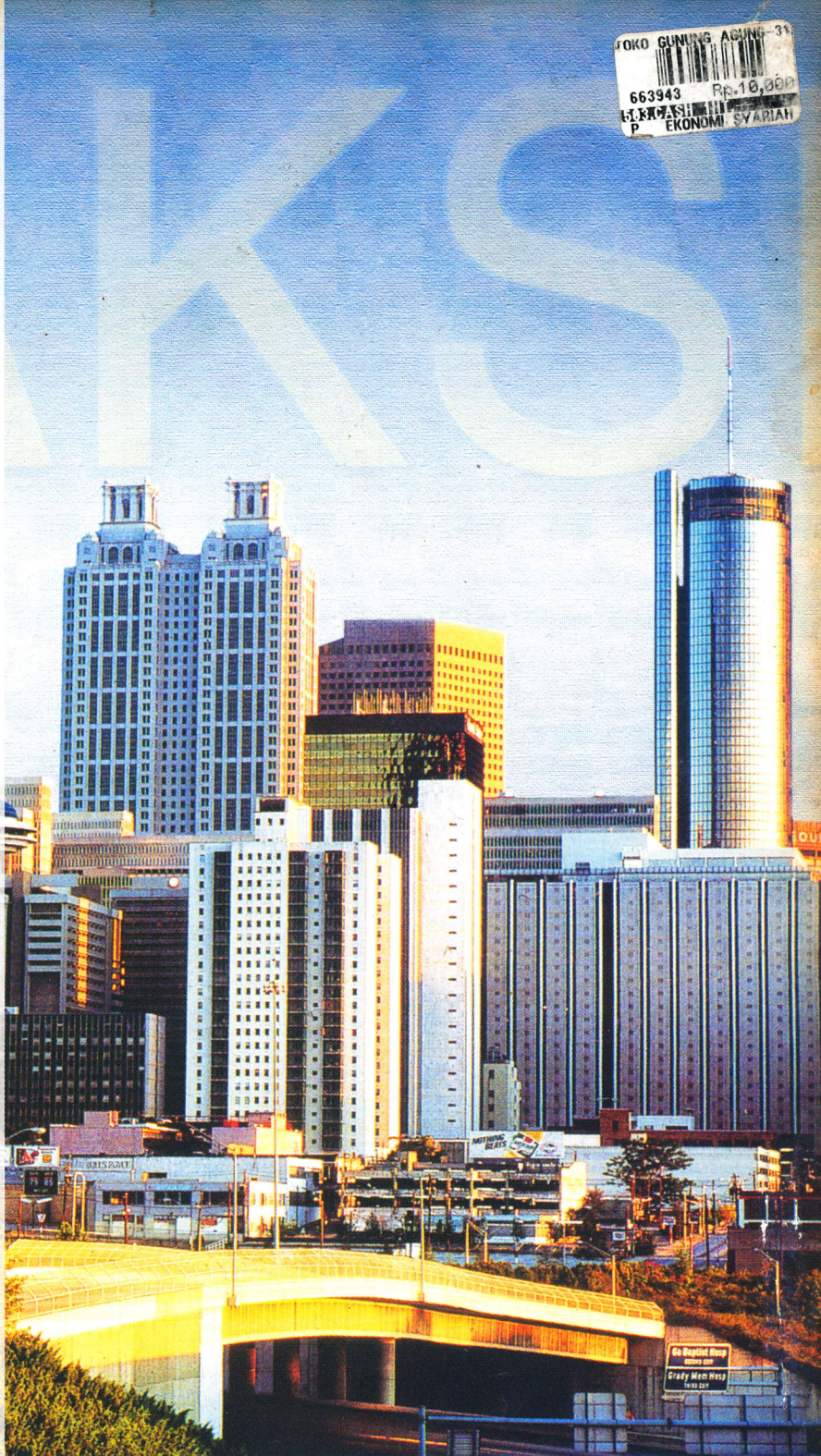
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI

Konsentrasi
- Pemeriksaan Akuntansi & Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Manajemen
- Perpajakan